

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 258
22 Jumadil Awal - 12 Jumadil Akhir 1441 H
17 Januari - 6 Februari 2020

Media **umat**

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam

KOMISI



SUAP KPU, RAGUKAN HASIL PEMILU

■ MEDIA NASIONAL

Rezim Zalmi,
Advokat Kritis
Ditangkap Sewenang-wenang

■ FOKUS

Orang Istana
di Pusaran
Skandal Jiwasraya?

■ WAWANCARA

Haris Azhar,
Direktur Eksekutif Lokataru
Korupsi
Sudah Menjadi Rezim



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Apa kabar Anda? Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Aamiin.

Pembaca yang dirahmati Allah, bencana dan musibah melanda negeri ini. Hujan yang lama ditunggu-tunggu membawa air yang melimpah. Sebagian wilayah Jakarta terendam. Di daerah lainnya, tanah longsor tak terhindarkan. Bukannya turun tangan membantu para korban, ada kalangan masyarakat yang memanfaatkan musibah ini demi kepentingan politik.

Berdasarkan prakiraan BMKG, intensitas hujan masih cukup tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Artinya, masih sangat mungkin bencana dan musibah kembali melanda. Pernyataannya, sudahkah negara menyiapkan antisipasinya?

Lalu, sudahkah negara mengajak masyarakat untuk introspeksi diri atas kejadian alam selama ini? Ataupun negara hanya melihat musibah ini sebagai fakta empiris saja tanpa mengaitkan dengan kekuasaan langit. Kalau yang terjadi yang terakhir, kita tentu miris. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.

Pembaca yang dirahmati Allah, di saat yang sama, publik dihebohkan dengan skandal Asuransi Jiwasraya. Bagaimana mungkin perusahaan plat merah itu tiba-tiba gagal bayar kepada nasabahnya. Dan, terbongkar bahwa perusahaan itu mengalami kerugian triliunan rupiah. Lagi-lagi publik mempertanyakan, bagaimana mungkin perusahaan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan merugi sedemikian besar dibiarkan dan akhirnya harus gagal bayar. Benarkah uang sebesar itu hanya hilang karena transaksi ekonomi biasa atau ada kepentingan politik di belakangnya yang sengaja

menggunakan uang rakyat ini untuk pemilu?

Lagi-lagi umat ini disuguhi berbagai bentuk pengkhianatan. Kasus BLBI belum beres, demikian pula kasus Century, e-KTP, Sumber Waras, kini muncul Jiwasraya, Garuda, Bumiputera, Pelindo, dan lainnya. Kekuasaan ternyata hanya menjadi jalan menggarong uang rakyat.

Pembaca yang dirahmati Allah, terakhir terbongkar kasus korupsi yang menggemparkan karena melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kongkalikong KPU dan partai politik menjadi pertunjukan nyata yang dimainkan di hadapan rakyat. Dan, rakyat lagi-lagi disuguhi permainan yang akan menguntungkan para elite kekuasaan atau kita kenal sebagai oligarki.

Mengapa? Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menampakkan ketidakberdayaannya. Kok bisa? Inilah yang akan menjadi bahasan Media Utama kali ini.

Pembaca yang dirahmati Allah, rakyat memang dalam posisi lemah dan dilemahkan. Janji-janji pemilu yang tidak terwujud hingga sekarang. Ketika dulu berjanji akan mempertahankan kedaulatan, rakyat disuguhi kelemahan ketika harus berhadapan dengan Cina di perairan sekitar Natuna—pulau Indonesia yang berada di Laut Cina Selatan. Kapal perang Indonesia tak berdaya berhadapan dengan kapal penjaga pantai Republik Rakyat Cina (RRC) yang sedang mengawal kapal nelayan mereka mengambil ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Inilah kenyataan yang harus dicermati. Sistem sekuler-liberal menjadikan negeri ini kian lemah dan tak berdaya. Kapan kita bisa terlepas dari semua itu? Semua tergantung kita.

Selamat membaca!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Pemuda Muslim

Budaya *food, fun, and fashion* yang mereka usung dari Barat, menambah merosotnya pemikiran generasi muda. Kebebasan yang menjadikan segalanya legal, ditambah fasilitas yang telah disediakan menjadikan budaya hedonis dan permisif.

Lalu, hendak dibawa ke mana arah dan energi pemuda Muslim saat ini?

Di sinilah, Islam beserta seperangkat aturannya benar-benar kita butuhkan, yang akan mengembalikan peran pemuda Muslim dalam barisan para pejuang. Menegakkan Islam dengan metode kenabian, sebagaimana yang kita rindukan. **Naur Afkar.**

Probolinggo. +6285325752xxx

Ulama Harus Peka

Jangan dikira ulama yang diam tidak ikut bertanggung jawab ketika hukum syariat tidak ditegakkan secara kaffah ketika banyak Muslim, Muslimah dibantai, diperkosa, kekayaan alam dirampok dan lain-lain.

Ulama adalah figur publik yang punya ilmu dan sebagai panutan umat punya pengaruh besar di tengah umat. Ketika umat diam lantaran meneladani ulama yang diam, bisa menjadi legitimasi penguasa bersekongkol untuk diam ketika musuh beraksi.

Aksi musuh tak lepas dari pertimbangan opini di tengah umat. Coba bayangkan seandainya mereka yang dibantai diperkosa adalah kita. Semestinya ulama peka.

Rusdi. Sukadana. 08132268xxx

Hukuman Pantas

Mengimani kenabian Muhammad SAW harus diikuti dengan mencintai dan memuliakan sosoknya. Mencintai Baginda Nabi Saw, bukanlah sebagaimana mencintai sesama insan. Kecintaan seorang Muslim kepada beliau harus di atas kecintaan kepada yang lain, baik itu harta, kedudukan, jabatan, keluarga, bahkan diri sendiri. Belum sempurna kecintaan seseorang bila masih ada kecintaan yang melebihi kecintaan kepada Baginda Nabi SAW.

Allah SWT memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang cintanya kepada Rasul SAW terpingal oleh kecintaan kepada yang lain.

Jika mencintai Rasulullah SAW merupakan kewajiban dan kebaikan yang amat luhur, maka menista (*istihza'*) terhadap kemuliaan beliau adalah dosa besar.

Bagi orang Islam, hukum menghina Rasul jelas haram. Pelakunya dinyatakan kafir. Hukumannya adalah hukuman mati.

Penistaan terhadap Nabi SAW terjadi karena prinsip kebebasan berbicara yang diberikan sekularisme liberalisme yang memberikan panggung kepada orang-orang yang mendengki dan terus menyerang Islam.

Agama ini sungguh tak akan dapat terlindungi jika umat tak memiliki pelindung yang kuat. Sungguh, umat membutuhkan pelindung itu. Itulah Khilafah! **Ummu Silmi. Bandung. +6287877721xxx**

Atasi Stunting

Dengan tingginya angka *stunting*, WHO menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus gizi buruk. Karenanya pemerintah melalui usulan dari staf kepresidenan Moeldoko dan didukung Mentan, akan meluncurkan gerakan nasional pelihara satu ayam tiap keluarga. Akankah hal ini jadi solusi?

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai program untuk menurunkan angka *stunting*, namun ternyata penurunannya tidak mencapai target. Hal ini wajar terjadi mengingat *stunting* adalah permasalahan yang kompleks dan sistemik, di mana realitas yang terjadi di alam kapitalis sekuler saat ini, sulit bagi masyarakat untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga bahan pokok yang terus merangkak naik berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat akan makanan yang bergizi.

Walhasil, pemerintah seharusnya membuat



LBH Pelita Umat Korwil DIY selenggarakan *Islamic Lawyer Forum (ILF) Edisi 3: Dikotomi Moderat dan Radikal Menjerat Muslim?* Sabtu (11/1) di Jogja.[]

MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN



SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

kebijakan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mengelola SDA secara benar sehingga hasilnya bisa digunakan untuk memberikan layanan kebutuhan masyarakat secara gratis dan berkualitas. Bukannya dengan membuat gerakan yang justru bertumpu pada keaktifan anggota masyarakat. Karena hal tersebut sama saja dengan pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi kemaslahatan masyarakat.

Ummu Fairuz, Kabupaten Bandung. +6289663825xxx

Perayaan Menyesatkan

Kesedihan dan keceriaan berbau jadi satu, karena melihat suasana tahun baru semakin meningkat di kalangan umat Islam. Pesta kembang api dan meniup terompet sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka.

Dalam negara kapitalis-sekuler, kebiasaan ini sudah tidak asing. Apalagi pelakunya mayoritas kaum Muslimin yang sebenarnya perayaan tahun baru Masehi ini tak pernah diajarkan dalam Islam alias batil dan haram.

Kaum muslimin hanya akan terselamatkan dari budaya kufur seperti tahun baru Masehi tersebut, jika hidupnya diatur sempurna dengan syariah kaffah dalam naungan khilafah yang sudah terbukti mampu menjaga kemurnian akidah Islam beribu tahun lamanya, hanya dengan prinsip: "Lakum diinukum waliyadhin". Wallahu 'alam bi ash shawab.

Linda YK. Palembang. +62895366973xxx

Stop LGBT!

Viralnya kasus Reynhard Sinaga membuktikan pada dunia bahwa masyarakat sangat membutuhkan lingkungan yang memberikan rasa aman. Setelah sekian waktu kaum pelangi meminta pengakuan, harusnya kasus tersebut menjadikan masyarakat paham bejatnya aktivitas LGBT.

Meski berdalih suka sama suka, LGBT adalah tindakan laknat yang patut diperangi. Bagaimana tidak, pergerakan kaum pelangi melebarkan sayapnya dan menggempuk jumlah anggotanya cukup menakutkan. Para korban kaum pelangi, mereka berpotensi tinggi menjadi pemain yang mencari korban demikian seterusnya.

Maka bisa dibayangkan ancaman rusaknya generasi mendatang, mewabahnya PMS dan penyakit sosial masyarakat.

Jelas Islam telah melaknat dan mengharamkan aktivitas kaum pelangi. Islam melaknat laki laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki laki.

Islam membenarkan pernikahan laki laki dengan wanita sehingga terjadi keberlangsungan keturunan, kejelasan nasab beserta seluruh hukum yang muncul setelah ada 'aqdun nikah.

Dari keluaraga yang sakinah mawaddah dan penuh rohmah inilah terlahir generasi penerus yang beriman, taat, sehat, cerdas, dan kuat.

Jika menginginkan generasi unggul pilihan di masa mendatang, Stop LGBT, Dan terapkan Islam Kaftan. **Layyin. Tulungagung.+62 856-4813-3xxx**

Khilafah Muara Perjuangan

Banyak kalangan meragukan Khilafah akan tegak kembali. Namun demikian pula, tak sedikit yang yakin bahwa Khilafah adalah janji Allah SWT. Khilafah adalah kabar gembira dari

Rasulullah SAW. Karena itu Khilafah pasti akan berdiri kembali. Suka atau tidak suka.

Kita yakin Khilafah bakal tegak kembali dengan memperjuangkannya. Betapa pun dihalang-halangi khilafah dengan opini-opini negatif. Betapun para pejuangnya diintimidasi, dipersekusi bahkan dikriminalisasi, akan terus berjuang memenangkan agama Allah

Karena perjuangan penegakan khilafah harus dibaca sebagai wujud kepedulian untuk melepaskan negeri-negeri Muslim dari kerusakan akibat penerapan sistem kapitalisme-liberalisme. **Lisa Satriyana. Jember. +62 853-8747-5xxx**



Pemimpin Bervisi Akhirat

Hal penting yang hilang di tengah umat saat ini ketika menghadapi bencana adalah pemimpin yang bervisi akhirat. Pemimpin yang mengajak umatnya bertaubat dan bersabar ketika bencana datang. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatthab ra saat gempa bumi terjadi di Madinah. Khalifah bukan sekadar datang ke lokasi bencana, tapi Khalifah mengingatkan rakyat. Kemaksiatan apa yang sudah dilakukan. *"Wahai Manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi!"*

Ini pula yang dilakukan Rasulullah SAW saat gempa terjadi di Madinah. Rasulullah SAW lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, *"Tenanglah ... belum datang saatnya bagimu." Lalu, Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian ... maka jawablah (buatlah Allah ridha kepada kalian)!"*

Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat terjadi gempa bumi, segera mengirim surat kepada seluruh wali di wilayah kekhilafahannya. Isinya mengingatkan bencana yang terjadi adalah teguran dari Allah dan memerintahkan seluruh rakyat untuk bertaubat, keluar pada hari tertentu dan bersama-sama bersedekah membersihkan diri. Sebagaimana firman Allah SWT: *'Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan taubat ataupun zakat). Lalu, dia mengingat nama Tuhannya, lalu ia shalat.'* (QS Al-A'laa [87]:14-15).

Ini adalah pemimpin yang bervisi akhirat. Pemimpin yang tahu persis bahwa bencana bisa jadi merupakan ketentuan Allah, ujian bagi orang beriman sehingga harus disikapi dengan bersabar, dan juga bisa jadi bencana terjadi akibat kemaksiatan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ar Rum: 41. Para ulama menjelaskan apa yang disebutkan kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia (*kasabats aydinnas*) adalah kemaksiatan dan dosa-dosa manusia (*bi sababi ma'asinasi wa dzunubihim*). Dosa dan maksiat karena merajalelanya kemusyrikan dalam hal akidah dan akibat tidak diterapkannya syariah Islam secara kaffah (totalitas). Kemaksiatan zina, riba, LGBT, kezaliman terjadi di mana-mana.

Termasuk kemaksiatan dalam sistem ekonomi, yang mengadopsi kapitalisme liberal. Sistem ekonomi yang melahirkan manusia-manusia rakus, demi keuntungan materi semata.

Lihatlah bagaimana kerakusan negara-negara imperialisisme Barat saat menjajah negeri-negeri lain. Mereka tidak peduli apakah harus membunuh jutaan orang, menindas penduduk bumi, kerja paksa. Semuanya karena kerakusan mengejar 3 G (*glory, gold, dan gospel*).

Karena kerakusan menguasai minyak di Timur Tengah, mereka menduduki Irak, Suriah, Libya. Membuat kerusakan dan makar. Menciptakan penguasa boneka yang menindas rakyatnya sendiri. Menjerat negara lain dengan riba dan memeras kekayaan alamnya.

Kemaksiatan pun terjadi dalam sistem politik demokrasi, yang menjadikan hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Padahal Allah SWT sudah memerintahkan kita untuk ber hukum pada hukum Allah SWT. Sistem demokrasi ini menjadi habitat subur elite-elite politik yang korup. Untuk mengembalikan modal politik mereka yang besar, mempertahankan kembali kekuasaan mereka, yang itu juga berarti membutuhkan modal yang besar, mereka gunakan kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi, manipulasi. Terjadilah kerja sama jahat antara politis liberal dengan pengusaha rakus. Tidak bisa dibantah, pengusaha rakus ini berada di balik kerusakan alam yang bisa menyebabkan bencana. Mereka leluasa melakukan itu, karena mendapatkan dukungan politik dari elite politik. Bekerja sama pula dengan penegak hukum yang lemah di hadapan para penjahat-penjahat ekonomi ini.

Nyaris tak terdengar, pemimpin negeri ini, saat bencana mengajak bertaubat. Justru rezim inilah yang mempertahankan sistem kapitalisme liberal yang bertentangan dengan syariah Islam. Bukan hanya itu, mereka pun memerangi para aktifis dakwah, hamba-hamba Allah yang menyerukan untuk menerapkan syariah Islam. Dikriminalkan, bahkan dimonsterisasi. Syariah, jihad, khilafah yang sesungguhnya ajaran yang mulia, bahkan diperangi.

Padahal syariah Islam inilah yang akan menyelamatkan negeri ini, menyelesaikan persoalan negeri ini yang tak kunjung kelar. Sementara khilafah adalah institusi politik yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah, menyatukan dunia Islam, hingga tegaklah negara adi daya Khilafah *ala minhajin nubuwwah*, yang bisa mengimbangi kejahatan negara imperium kapitalisme Amerika. Membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan maupun penguasa boneka yang menjadi kaki tangan dan penjilat negara-negara penjajah!

Sudah saatnya kita bergerak melawan rezim zalim yang menindas, dan mengganti sistem kapitalisme liberal yang menghancurkan. Berjuang bersama menegakkan syariah Islam dan Khilafah *ala minhajinnubuwwah* yang membawa berkah dan ridha Allah SWT. Allahu Akbar! **farid wadjudi**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Jagat politik Indonesia kembali ramai. Ini setelah Wahyu Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/1). Petinggi sebuah lembaga yang mengesahkan pimpinan nasional Indonesia ternyata didakwa menerima suap.

Meski tidak secara langsung berkaitan dengan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019, fakta ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini makin kuat. Muncul kekhawatiran publik, jangan-jangan ada main mata pula dalam penentuan hasil rekapitulasi sebelumnya.

"Siap mainkan," begitu jawaban Wahyu Setiawan, begitu tersangka lainnya Agustiani Tio Fridellina, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Wahyu.

KPK mengungkapkan, dalam rangka menjadikan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW), Wahyu meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta. Uang itu diberikan kepada Wahyu dalam dua tahap. Pertama, pada pertengahan Desember 2019, salah satu sumber dana yang masih didalam KPK memberikan uang Rp 400 juta kepada Agustiani, Doni, dan Saeful Bahri untuk kemudian diberikan kepada Wahyu. Uang diserahkan Agustina sebesar Rp 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang Rp 850 juta kepada Saeful melalui salah seorang staf di DPP PDI-P. Saeful kemudian memberikan Rp 150 juta kepada Doni.

Sisa uang sebesar Rp 700 juta yang masih di Saeful dibagi menjadi Rp 450 juta kepada Agustina, Rp 250 juta untuk operasional. Dari Rp 450 juta yang diterima Agustina, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk Wahyu Setiawan.

Menjadi pertanyaan, benarkah Wahyu bermain sendiri. Pasalnya, keputusan KPU adalah keputusan kolektif kolegial, bukan perorangan. Itulah mengapa banyak pihak mendesak KPK untuk memeriksa seluruh komisioner KPU.

Menariknya, kasus ini melibatkan partai pemenang Pemilu 2019 PDIP. Nama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ada dalam pengakuan para pelaku. KPU sendiri mengungkapkan, PDIP sampai tiga kali meminta KPU agar menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Semua surat itu ditandatangani oleh Hasto. Dan tersangka Saeful, sempat mengatakan bahwa uang itu berasal dari Hasto.

Fakta ini pun mengungkap negeri ini berada di bawah bayang-bayang oligarki. Sekelompok elite kekuasaan mengatur dengan semauanya negara ini. Para petinggi partai politik memegang kendali. Maka jangan heran sebelum ini lima ketua umum partai politik ditangkap KPK karena memanfaatkan kedudukannya merampok uang negara dalam berbagai kasus. Akankah Hasto akan menyusul masuk penjara? Sejauh ini KPK tampak kikuk. Ini tampak dari rencana penggeledahan yang diumumkan dan diberi tenggat waktu—hal yang baru ada dan jadi bahan lelucon warganet.

Rakyat akhirnya hanya menjadi objek penderita. Atas nama demokrasi, mereka mengambil legitimasi dan memanfaatkan kedudukannya bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Maka, wajar bila banyak kalangan mengajukan gagasan perubahan sistem bernegara. Sistem yang ada telah rusak dan merugikan rakyat. Oligarki telah mengancam dan menghancurkan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Karenanya, bila negeri ini mau baik, pilihannya hanyalah sistem Islam. Inilah yang akan menjamin keadilan, dan mencegah praktek oligarki serta korupsi. Kenapa tidak? **■ mujiyanto**



Berbagai kalangan meragukan kredibilitas dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih. Saat itu, Selasa (21/5) dini hari sekira pukul 01.00 KPU mengumumkan rekapitulasi hasil Pemilu Pilpres 2019 dengan pemenang pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tak berselang lama muncul tagar: #RakyatTolakHasilPilpres. Warganet marah, sebab sebelumnya sudah dijadwalkan bahwa pengumuman hasil rekapitulasi akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Dan berbagai kecurangan tidak ditanggapi oleh KPU dan Bawaslu. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar saat itu. Beberapa kalangan lalu mempertanyakan kredibilitas KPU.

Tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan operasi penangkapan dengan operasi penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesaat sebelum ia terbang ke Bangka-Belitung pada Rabu (8/1) lalu.

KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR-RI terpilih tahun 2019-2024. Selain Wahyu, KPK juga menjerat mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridellina (ATF) yang juga orang kepercayaan Wahyu, dan

Saeful Bahri. Sedangkan politikus PDIP Harun Masiku hingga saat ini masih belum tertangkap dan pergi ke Singapura beberapa saat sebelum penangkapan para terdakwa dilakukan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Wahyu menerima suap Rp 600 juta untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

"Dari Rp 450 juta yang diterima ATF, sejumlah Rp 400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE, Komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF," ujar Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Kamis (9/1).

Ia menjelaskan, saat penerimaan uang Rp 400 juta dalam bentuk dolar Singapura itulah kemudian tim penindakan KPK mengamankan Wahyu. "Pada Rabu, 8 Januari 2020, WSE meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura," kata Lili.

Sebelum menerima Rp 400 juta, Wahyu telah lebih dahulu menerima uang Rp 200 juta pada pertengahan Desember 2019. "WSE menerima uang dari dari ATF sebesar Rp 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan," kata Lili.

Membenarkan

Tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan seolah membenarkan anggapan masyarakat selama ini bahwa ada yang tidak beres di KPU. Asumsi negatif publik yang tertuju kepada KPU tak bisa dibendung. Banyak tanggapan ramai di media sosial, mempertanyakan kredibilitas KPU.

Ketua KPU Arief Budiman mencoba meredam citra buruk yang mendera lembaganya itu. Ia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia tak lama setelah KPK mengumumkan Wahyu sebagai tersangka. Akan tetapi, ucapan maaf itu tak bisa menjadi obat penawar yang mujarab atas asumsi negatif yang beredar.

Buktinya, nama Wahyu Setiawan sempat menjadi *trending topic* Indonesia di Twitter. Berbagai meme pun bermunculan dengan nada mengejek Wahyu serta KPU.

Ketua Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, seperti dikutip *cnnindonesia.com*, menganggap wajar jika masyarakat langsung mempertanyakan kredibilitas KPU usai Wahyu tersandung kasus korupsi.

"Nah itu pastilah satu hal yang memang akan serta merta berdampak pada kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata Veri, Jumat (10/1).

Ia menjelaskan, penyeleng-



Ada indikasi Wahyu tidak bermain sendiri dari kode yang dikatakan Wahyu: 'Siap, mainkan'.

gara pemilu kerap dihantui godaan untuk berlaku curang. Godaannya tergolong besar sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para Komisioner KPU, baik level pusat mau pun daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mengatakan, tertangkapnya Wahyu Setiawan menggambarkan tidak transparannya proses birokrasi dari lembaga negara, yang dimanfaatkan adanya kepentingan dari oknum partai politik tertentu.

"OTT itu menunjukkan transparansi birokrasi dari lembaga negara, termasuk KPU. Satu sisi, pengawasan internal lemah, sisi lain ada penumpangan kepentingan dari oknum partai politik," kata Busyro di Malang, Jawa Timur, Jumat (10/1) seperti dikutip *Antara*.

Posisi KPU, lanjut Busyro, rentan ditunggangi oleh oknum dari partai politik yang memiliki kepentingan. Padahal, baik KPU maupun partai politik, merupakan pilar demokrasi Indonesia yang sudah seharusnya transparan dan jujur.

"Keduanya seharusnya menjadi pilar demokrasi dan demokrasi itu harus jujur. Nyatanya sebaliknya, keduanya berperan des-

truktif, parpol iya, KPU iya," kata Busyro.

Kolektif Kolegial

Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syaputra menduga Wahyu Setiawan tidak bermain sendiri dalam kasus ini. Ia menengarai ada keterlibatan komisioner KPU lainnya. Pasalnya, pintu masuk dugaannya melalui produk keputusan komisioner KPU secara kolektif.

"Jika benar dan sudah final dirapat plenokan dan dinyatakan nama Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia. Terus kenapa lagi komisioner masih "mau berani mengubah" hasil rapat pleno KPU dan "mau diakali" dan dijanjikan pada Harun Masiku? Ini masalah utamanya, artinya keputusan di KPU masih bisa ditawarkan atau berubah," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu, Jakarta, Senin (13/1).

Azmi menegaskan, bahwa keputusan KPU tidak bisa diputuskan sendiri. Keputusan itu mesti bersifat kolektif kolegial. "Harus rapat dengan lima komisioner dan minimal disetujui empat komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai apalagi yang ditujukan pada individual (otomatis PAW jatuh pada nama caleg suara terbanyak berikutnya), prosedur dan

mekanismenya demikian, jadi final dan konkrit, tentunya karena sudah tahu demikian Wahyu Setiawan sebagai komisioner tidak bisa main sendiri," sindirnya.

Azmi membaca potensi keikutsertaan komisioner lain atau ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU. "Karena dia tidak mungkin dapat mengubah keputusan dalam pleno sendiri, harus ada peran dan persetujuan komisioner yang lainnya, karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial apalagi sampai detik akhir satu hari sebelum OTT, Komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya, bukan tunduk pada judicial review MA," jelasnya.

Gunung Es

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Sebab, Wahyu berani bermain-main dengan suara rakyat. Pernyataan Fadli ini tertuang dalam cuitan Twitter miliknya, @fadlizon. Ia menilai kasus suap yang dilakukan oleh Wahyu sebagai bentuk kejahatan demokrasi.

"Kejahatan demokrasi yang mempermainkan suara rakyat adalah kejahatan luar biasa," tulis Fadli, Sabtu (11/1).

Ia memprediksi kasus Wahyu Setiawan ini bisa menjadi puncak gunung es. Ia berharap agar kasus tersebut bisa diusut secara tuntas

Jurus Mencret Sekjen PDIP

Penangkapan Wahyu Setiawan menyeret nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Ini terkait dengan uang suap yang diberikan kepada Wahyu.

Perantara suap itu adalah Saeful Bahri, orang kepercayaan Hasto. Usai diperiksa penyidik KPK mengakui bahwa uang itu berasal dari Hasto. "Iya, iya (dari Hasto)," kata Saeful saat dicecar pertanyaan oleh wartawan perihal sumber uang suap tersebut.

Tak heran bila tim KPK mengembangkan kasus ini ke ruang kerja Hasto, kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta. Namun upaya menggeledah itu gagal karena dihalang-halangi petugas keamanan kantor itu.

Sehari setelah penangkapan para tersangka, Hasto tidak muncul di depan publik dari pagi hingga sore. Seharusnya ia hadir dalam gladi resik Rakernas PDIP di Jl-Expo Kemayoran dan mengadakan jumpa pers pukul 12.30. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Hasto terkena diare alias mencret. Baru sore hari ia hadir dengan memegang perutnya dan mengatakan baru sembuh akibat diare berkat puyer 'Cap Kupu-kupu'.

Majalah Tempo edisi 11 Januari 2020, Jejak Hasto dan Puyer Kupu-kupu dalam laporannya mengungkapkan, Rabu malam sebelumnya, Hasto diduga berada di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan. Selain Hasto, Harun Masiku juga ditengarai berada di sana.

Tim KPK mengawasi Hasto dan Harun. Namun, tim malah sempat ditahan oleh polisi di kampus tersebut selama sekitar tujuh jam, diinterogasi, dan dites urine.

Hasto membantah pergi ke kampus PTIK dan bertemu Harun. Lalu ia di mana? [] *emje*

oleh penegak hukum.

Selain itu, Fadli berharap Indonesia tak akan melahirkan pemimpin palsu yang membeli suara rakyat. "Mudah-mudahan bisa terkuak segera sehingga tak lahir pemimpin-pemimpin palsu yang memimpin Indonesia dengan kepalsuan juga," ungkapnya.

Inilah mengapa banyak kalangan mendesak KPK tidak berhenti memeriksa Wahyu Setiawan saja. Komisioner lainnya perlu diperiksa mengingat keputusan KPU bersifat kolektif kolegial.

Menurut pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad, ada indikasi Wahyu tidak bermain sendiri dari kode yang dikatakan Wahyu: 'Siap, mainkan'.

"Saya kira ini memang menjadi sesuatu yang penting ya momentum betul bagi KPK termasuk juga membongkar di internal KPU sendiri apakah Wahyu itu bisa main sendiri," jelasnya di Jakarta, Sabtu (11/1).

"Kalau kalimat dia mainkan, berarti dia kan ada teman lain kan, gak mungkin bermain sendirian gitu, berarti ada partnernya," tambah banya.

Menurut Suparji, KPK harus memanggil semua komisioner KPU dan para elite partai politik yang terkait untuk menelusuri keterlibatan pihak lain. "KPK harus mengusut lebih jauh berdasarkan postur gaji dan aset yang dimiliki, termasuk komisioner-komisioner lain," katanya.

Pembelaan

Politikus PDIP Kapitra Ampora menganggap, pihak-pihak yang mengaitkan kasus dugaan

suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan Pilpres 2019, adalah orang-orang frustrasi.

"Itu adalah orang-orang yang frustrasi. Kalau orang frustrasi itu *nggak* perlu *move on*. Mereka itu *kan* mencari *opportunity*, mencari kesempatan, maka dia pakai. Apa pun dikait-kaitkan," kata Kapitra kepada wartawan, Senin (13/1).

Menurutnya, orang-orang frustrasi itu akan selalu mencari celah untuk menyerang Presiden Jokowi. Frustrasi mereka itu ditambah dengan melihat rival Jokowi di Pilpres yaitu Prabowo Subianto kini telah bersatu. Akibatnya, pihak-pihak itu makin frustrasi.

"Betapa frustasinya orang-orang itu. Orang-orang yang sudah frustrasi menjadi tambah frustrasi, maka dia lihatnya celah ini dia masuk. Tapi dia terjebak sendiri dalam kefrustasian itu. Mudah-mudahan dia *nggak* sampai bunuh diri," dalihnya.

Ia menegaskan, anggapan yang dikait-kaitkan dengan Pilpres itu sama sekali tidak rasional. Menurutnya, sangat tidak masuk akal PDIP kongkalikong dengan KPU soal Pilpres. Pasalnya, dalam proses PAW DPR di daerah pemilihan Sumatera Selatan I saja yang kini menjadi polemik, KPU menolak nama caleg Harun Masiku yang diajukan PDIP menggantikannya Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan kenapa partainya ngotot sampai tiga kali mengirim surat ke KPU agar Harun harus jadi anggota DPR. Ada apa? [] *emje*



Wahyu Setiawan (kiri) dan Hasto Kristiyanto.

Oligarki dan Korupsi, Ancaman Negeri

Para petinggi partai politik itulah yang bersekongkol mengendalikan negeri ini. Kongkalikong itu tentu tidak gratis. Ada transaksi.

Mengenakan rompi kuning dan tangan diborgol, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan akhirnya dibawa ke Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Ia harus mempertahankan perbuatannya, menerima suap sebagai pejabat negara, guna memuluskan jalan calon wakil rakyat duduk di kursi DPRRI.

Berdasarkan pengakuan tersangka pemberi uang, Saeful Bahri, uang suap itu berasal dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Ini sebagai buntut Pergantian Antar Waktu (PAW) Nazarudin Kiemas yang meninggal ketika masih proses pemilihan. Kursi warisan Nazarudin Kiemas ini yang menjadi pangkal terbongkarnya kongkalikong PDIP dan Komisioner KPU.

Sebelumnya KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas. Namun, PDIP menginginkan Harun Masiku yang jadi anggota Dewan, padahal ia hanya memperoleh suara terbanyak kelima di Dapil Sumatera Selatan I. Suara

Harun 5.878 suara, sedangkan Riezky 44.402 suara.

Menurut pengakuan Ketua KPU Arief Budiman, setelah proses penetapan calon, PDIP sempat tiga kali berkirim surat kepada KPU. Tiga surat tersebut pada intinya meminta agar KPU mengalihkan suara Nazarudin Kiemas kepada Harun Masiku dan membatalkan penetapan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR PAW atas Nazarudin.

Pertama, DPP PDIP mengirim surat dengan nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan MA Republik Indonesia No. 57P/HUM/2019, yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Sumatera Selatan I. Surat ini ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Kedua, pada 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat PDIP perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI yang pada pokoknya meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan PDIP untuk mengalihkan suara Nazarudin Kiemas kepada Harun Ma-

siku. Surat ditandatangani Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketiga, pada 18 Desember 2019, KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung dengan lampiran fatwa Mahkamah Agung pada angka 17, yang pada pokoknya permohonan kepada KPU untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"Terhadap surat ini, KPU membalas tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW Anggota DPR," ujar Arief.

Diduga PDIP mencari jalan lain agar Harun Masiku tetap bisa masuk ke gedung DPR melalui jalan 'belakang'. Jalan itu diduga dibukakan oleh Wahyu Setiawan, sang komisioner KPU. Permainan busuk itu pun terbongkar.

Kuasa Parpol

Penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menguatkan dugaan selama ini bahwa ada politik transaksional di pusat kekuasaan. Partai politik bisa memainkan kehendaknya melalui berbagai jalan demi memuluskan tujuannya.

Mekanisme demokrasi hanya sebagai kedok di permukaan saja untuk menunjukkan bahwa semua proses demokrasi itu berjalan. Tapi di balik itu, ada proses-proses tersembunyi yang dimainkan oleh partai politik menggunakan segala cara, termasuk dengan uang.

Para ketua partai memegang kunci dalam hal ini. Tak mengherankan sejauh ini sudah ada lima ketua umum partai politik yang ditangkap KPK. Mereka adalah Romahurmuzy dan Suryadharma Ali (PPP), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hassan Ishaq (PKS), dan Setya Novanto (Golkar). Mereka semua divonis menerima uang suap.

Fakta ini menguatkan bahwa oligarki—yakni pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat—itu nyata ada. Para petinggi partai politik itulah yang bersekongkol mengendalikan negeri ini. Kongkalikong itu tentu tidak gratis. Ada transaksi.

Bahaya

Berbagai pengungkapan kasus keterlibatan politikus dan pejabat publik dalam tindak pidana korupsi oleh KPK menunjukkan Indonesia darurat korupsi. Korupsi tidak hanya berlangsung di level pelaksana di lapangan tapi sudah sampai pada elite kekuasaan yang menggunakan kedudukannya untuk menggarong uang rakyat.

Aksi mereka bukannya reda dengan adanya KPK, namun makin menggila dengan kerugian negara yang sangat besar. Bahkan, belakangan ada upaya untuk melemahkan KPK itu sendiri agar lembaga anti rasuah itu tak bisa bergerak lebih leluasa. Dan peleman itu pun disponsori partai politik lewat DPR.

Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto ini bisa menjadi cermin betapa KPK menjadi begitu lemah sekarang. KPK tak bisa masuk ke kantor PDIP untuk menggeledah kantor Hasto. Bahkan penyidik KPK pun malah ditangkap dan diinterogasi oleh polisi gara-gara sedang membuntuti Hasto yang konon bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dan, yang menjadi bahan tertawaan publik, KPK mengumumkan akan menggeledah kantor Hasto sepekan kemudian. Bagaimana mungkin menggeledah diberi tenggat waktu begitu lama dan tanpa ada penyegelan?

Itulah mengapa, banyak kalangan menyebut korupsi menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Bahkan calon presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4.

Prof Tb Ronny R Nitibaskara menyebutkan bahwa dilihat dari segi eskalasinya dan pihak yang terlibat, tidak salah jika pada saat ini korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional. Meskipun korupsi bersifat kekuatan lunak (*soft power*), ternyata daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme atau perang. **emje**

Mempertanyakan Integritas KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini sangat menentukan kepemimpinan nasional. Mereka-lah yang menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan perhitungan suara.

Kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi tamparan keras lembaga itu. Beberapa kalangan mempertanyakan integritas KPU, terutama terkait dengan penetapan pimpinan nasional saat ini.

Pasalnya, banyak kejanggalan dalam pelaksanaan penghitungan suara dalam pilpres yang lalu. Tiba-tiba di tengah ketidakpuasan publik, KPU mengumumkan hasil Pilpres sebelum saat yang ditentukan dan dilakukan tengah malam, waktu yang tidak lazim.

Dan belakangan, Mahfud MD sendiri mengakui terjadi kecurangan pemilu yang bersifat horizontal. Tapi kok tidak ada tindak lanjutnya? Ada apa? **emje**



Sistem Islam, Cegah Oligarki dan Korupsi

Pertanggungjawabannya tidak hanya bersifat duniawi kepada rakyat, tapi juga kepada Allah SWT. Hal inilah yang tidak ada dalam sistem mana pun di dunia.

Mungkin hanya terjadi di Indonesia, lima ketua umum partai politik terjerat korupsi. Itu belum termasuk jajaran pengurus partai lainnya. Dan, data menunjukkan hampir semua partai politik pengurusnya baik di tingkat pusat maupun di daerah terlibat korupsi.

Bila yang korupsi satu atau dua orang, mungkin ini karena kesalahan perorangan. Faktanya, korupsi dilakukan oleh banyak orang, baik para politikus maupun pejabat publik. Ini artinya, sistem pemerintahan itu sendiri yang menyebabkan orang korupsi.

Demokrasi diyakini menjadi penyebab korupsi merajalela. Demokrasi membutuhkan modal yang besar. Sementara kemampuan tidak ada. Maka, caranya adalah meminjam modal kepada para kapitalis/pemilik modal dengan kompensasi. Inilah mengapa ada kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Terjadilah oligarki. Di sisi lain, para politisi harus mengembalikan modal dan menghidupi partainya, jadilah mereka mencari jalan pintas mendapatkan pundi-pundi uang.

Aturan dan kebijakan negara dibuat sedemikian rupa agar menguntungkan para penguasa dan pengusaha yang bersamanya serta tidak akan merugikan dan menjerat mereka. Melalui instrumen negara yang legal, mereka berlindung.

Lalu bagaimana negeri ini akan baik bila para penguasa dan pengusaha hanya mencari keuntungan bagi diri mereka dan kelompoknya sendiri?

Alternatif

Jalan satu-satunya untuk le-

pas dari kondisi yang ada hanya lah ganti sistem. Sistem sekuler-liberal harus diganti dengan sistem Islam. Mengapa harus sistem Islam? Sebab Islam adalah satu-satunya sistem yang layak bagi manusia karena diciptakan oleh tuhan manusia. Dan secara empiris, Islam pernah diterapkan selama kurang lebih 13 abad dengan membawa kemajuan yang luar biasa dan didukung oleh peradaban yang tiada duanya.

Islam memiliki sebuah sistem yang jelas. Tata laksana pemerintahan telah diatur sedemikian rupa sehingga siapa pun pemimpinnya tidak bisa seenaknya sendiri dalam mengatur negara. Ada prinsip-prinsip yang harus ditaati. Meski begitu, penguasa masih bisa 'berkreasi' pada hal-hal yang memang dibolehkan.

Para penguasa, pejabat negara, birokrasi, hingga pegawai negara bekerja berdasarkan tolok ukur yang jelas yakni syariah Islam. Ada faktor keimanan, ketakwaan. Pertanggungjawabannya tidak hanya bersifat duniawi kepada rakyat, tapi juga kepada Allah SWT. Hal inilah yang tidak ada dalam sistem mana pun di dunia.

Bersamaan dengan itu, sistem itu dijaga dengan sistem hukum yang jelas pula yakni syariah Islam. Jaminan hukum inilah yang menjadikan sistem tidak akan berubah-ubah dengan bergantinya pemimpin atau pejabat publik. Hukum yang diterapkan sama yakni hukum Islam.

Tidak mungkin ada kongkalikong partai politik dan pengusaha karena tata aturannya sudah tetap. Oligarki bisa dicegah sejak awal sebab oligarki lahir karena ada pintu/celah untuk mempermainkan aturan baik dalam penyusunan maupun dalam pene-

rapannya. Sementara dalam sistem hukum Islam, penguasa sekali pun tak boleh mengubah aturan-aturan prinsip.

Keberadaan partai politik/wakil rakyat hanyalah berfungsi melakukan kontrol kepada negara atas pelaksanaan hukum Islam. Mereka tidak ada hak untuk membuat hukum [baca: legislasi] karena hukum sudah ada yakni hukum Islam—digali dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan duduknya orang-orang yang amanah dan sistem hukum yang adil inilah akan melahirkan sebuah tatanan yang adil serta menempatkan masyarakat—siapa pun dia—sama di hadapan hukum. Tidak ada pihak-pihak yang kebal hukum, meski dia penguasa atau pimpinan partai politik.

Cegah Korupsi

Lalu bagaimana sistem Islam bisa mencegah suap-menyuap/korupsi? Yang utama, seorang pemimpin haruslah orang yang

amanah. Memiliki ketakwaan dalam arti sebenarnya kepada Allah SWT. Ada dimensi ruhiyah. Ketakwaan individu ini menjadi benteng mencegah korupsi. Hanya saja pemimpin yang seperti ini akan lahir dalam atmosfer sistem yang islami/imani. Kecil kemungkinan muncul pemimpin yang amanah dalam sistem yang rusak dan busuk seperti sekarang di mana manusia mendewakan harta dan dipaksa mencari harta sebanyak-banyaknya oleh sistem demokrasi yang mahal.

Di sisi lain, penegakan hukum yang adil akan menjerakan orang untuk korupsi. Dalam pandangan sistem hukum Islam, korupsi tidak terkategori mencuri sehingga hukumannya tidak potong tangan bila telah sampai nisab. Namun korupsi adalah tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Maka, hakim bisa saja memutuskan hukuman mati bagi para koruptor. Bukankah dengan sanksi hukum sedemikian

berat akan menakutkan para calon koruptor?

Sebelum itu para penguasa dan pejabat publik harus bisa membuktikan dengan sendiri hartanya dari mana didapatkannya. Apakah dengan cara yang halal atau haram. Sebab, penguasa dalam Islam tidak diperkenankan untuk berbisnis. Praktis harta yang didapatnya hanyalah berasal dari negara. Jumlahnya terukur dan pasti. Bila ada kelebihan dari jumlah yang didapatkan, ini bisa dicurigai. Makanya, ada pembuktian terbalik.

Itu semua ada teladannya di masa Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Contoh di masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Sebelum aparat negara menjabat, dihitung dulu harta kekayaannya. Di akhir jabatannya dihitung lagi, jika ada kelebihan dan si pejabat itu tidak dapat membuktikan bahwa kelebihannya itu diperoleh dengan cara halal, kelebihan tersebut diambil atau dibagi dua dengan kas negara. [] **emje**

Berkah dari Langit dan Bumi

Pernahkah Anda memperhatikan perjalanan sejarah Islam? Hanya dengan Islam, peradaban baru lahir di muka bumi. Bangsa Arab yang awalnya tidak diperhitungkan di masanya, menjadi bangsa yang memimpin dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka memegang teguh Islam.

Tidak ada peradaban yang begitu lama bertahan di muka bumi ini selain Islam. Pada masa ini lahir berbagai temuan yang mengubah wajah dunia. Ilmuwan-ilmuwan Muslim menjadi mercusuar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia yang awalnya gelap berubah menjadi dunia yang beradab dan maju.

Kaum Muslim mampu menunjukkan dirinya

sebagai umat terbaik (*khairu ummah*) di antara umat-umat yang lainnya. Berkah dari bumi dan langit turun sehingga kehidupan yang baik berlangsung di tengah-tengah kaum Muslim.

Sekali lagi, karena kaum Muslim berpegang teguh kepada syariah Islam. Dan secara imani, ada jaminan dari Allah SWT bila seluruh kaum Muslim beriman dan bertakwa, baik sebagai individu, masyarakat, dan negara, maka keberkahan itu pasti datang.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi" (TQS Al-A'raf: 96). [] **emje**

Haris Azhar,
Direktur Eksekutif Lokataru

Korupsi Sudah Menjadi Rezim

Adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Septiadi semestinya menjadi kotak pandora yang bisa mendelegitimasi KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan Presiden. Tetapi apakah itu mungkin terjadi? Di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Berikut petikannya.



Tanggapan Anda dengan OTT KPK terhadap seorang komisioner KPU?

Pemilu lalu sudah memunculkan banyak pertanyaan ke KPU. Tapi KPU tidak bisa menjawab itu semua. Jadi KPU yang sekarang ini memang integritasnya rendah. Dan kasus OTT Wahyu ini malah semakin menghilangkan kepercayaan publik.

Kasus OTT ini bukan kabar baru dalam cerita Indonesia, negeri para koruptor. Apalagi dengan kewenangan besar Komisioner KPU, godaan dan otak bulus bisa melintas dan digunakan. Wahyu sendiri, dalam catatan organisasi masyarakat sipil yang melakukan pemantauan sejak awal seleksi masuk radar kualifikasi merah. Saat Pemilu kita juga bisa melihat kiprahnya yang asal-asalan, tidak bisa menjawab rasio publik soal ketidakgenahan kerja KPU.

Tanggapan Anda dengan pernyataan KPK terkait OTT ini yang baru akan menggeledah Kantor Pusat PDIP sepekan kemudian...

Itu kayak orang mau liburan. Direncanakan jauh-jauh hari. Itu terjadi karena UU KPK yang baru yang mengharuskan KPK mendapat izin Dewan Pengawas untuk menggeledah. Itu sesuai dengan rencana membumihanguskan KPK memang.

Jadi itu memberikan banyak waktu buat PDIP menghilangkan barang bukti ya?

Saya enggak menyorot pada PDIP-nya, tetapi ini merupakan masalah sistemik yang dibangun dengan UU KPK yang baru. Siapa pun yang

melakukan korupsi bisa punya banyak waktu untuk bersih-bersih. Masak orang mau menggeledah ngasih tahu!

Siapa itu yang bikin UU yang menguntungkan para koruptor?

Ya, parpol itu semua. Tapi lucu ya... untuk kasus pertama UU yang baru ini malah parpol. Parpol yang paling besar lagi.

Patut dicurigai dong, kasus suap ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kasus caleg lain dari partai lain...

Makanya KPK juga perlu memeriksa apakah penyuapan PAW ini adalah modus atau kasus tunggal. Kalau di lapangan Panwaslu memang berulang kali sering dengar. Kita juga sering dengar. Memang ini perlu investigasi tetapi kita juga sering dengar memutarbalikkan suara terjadi di sidang-sidang lokal itu.

Panitia penyelenggara pemilu ini kan luas ada di mana-mana. Siapa yang sanggup mengawasi? Jadi saling mengawasi satu sama lain. Tetapi orang yang saling mengawasi ini bisa dikondisikan oleh yang berkepentingan, berarti sudah tidak ada pengawasan lagi.

Maka yang terjadi adalah kesepakatan di antara mereka siapa yang duduk dan lain-lain. Saya pikir Wahyu bagian dari kultur seperti itu.

Apakah kasus ini akan berpengaruh pada legitimasi keabsahan anggota DPR bahkan presiden terpilih?

Secara sosial, iya. Masyarakat jadi makin meragukan KPU. Tetapi juga politisi-politisi itu dan KPU juga mau bilang begini: "Seneng gak seneng tetap kan gue yang jadi!?"

Karena ini kan bukan makanan di toko kue. *Eenggak* suka ke toko ini, lalu beli ke toko sebelah. Dalam UU penyelenggara pemilu ya KPU. Sedangkan KPU-nya ya.. muka badak saja.

Artinya apa?

Korupsi itu sudah menjadi rezim. Rezim alam pikir dan rezim praktik. Semua orang berlomba-lomba untuk ikut. Karena itu cara termudah untuk cari duit. Mereka pun berpikir kalau bukan mereka yang melakukan berarti nanti orang lain yang akan melakukan.

Bagaimana kalau sampai publik sudah tidak percaya lagi kepada mereka?

Mereka siapa? Orangnya atau institusinya? Kalau orangnya, yaa cuma pasangan hidup komisioner saja yang percaya. Kalau masyarakat luas, tidak punya pilihan. Mereka akan menerima hasil kesepakatan politisi saja.

Sebelumnya juga ada OTT Ketum Golkar, Ketum PPP, Ketum Demokrat. Sedangkan Ketum PKB baru tahap diperiksa KPK. Tanggapan Anda?

Ya itulah makanya KPK dikubur hidup-hidup lewat UU nomor 19/2019. Karena KPK berhasil menjaring mereka, para politisi tersebut. Ini menandakan bahwa para politisi itu hidup dan berpraktik hanya untuk memperkaya diri, kelompok dan kepentingannya saja. Tidak ada yang bekerja untuk rakyat.

Apakah bisa dibilang mereka yang OTT itu hanya 'apes' saja karena ini semacam fenomena gunung es?

Bisa benar juga pertanyaan Anda. Ini mengingat praktik

korupsi ada di mana-mana.

Menurut Anda, apakah ini kesalahan individu, atau ada yang tak beres dengan sistem yang berlaku?

Sekarang ini, segala-gala, sedikit-sedikit, pakai cara kekerasan, harus ada uangnya, dan pamer pengaruh. Itulah kehidupan yang ada di sekitar kita. Sistem dan budayanya sudah saling menikmati, sebagai sistem yang materialistis, hostilities. Tidak ada lagi tujuan bersama, tidak ada lagi solidaritas, tidak ada tanggung jawab negara.

Kalau begini terus, umur Indonesia sampai kapan?

Ya, kalau yang seperti ini dibiarkan bangkrutlah negeri ini, bubar. Menurut saya sekarang pun sudah mulai kelihatan tanda-tanda kebangkrutannya. Karena, di bidang ekonomi misalnya, akan terjadi kesenjangan ekonomi yang luas karena ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang dan didapatkan dengan cara-cara yang curang. Persaingannya itu tidak fair.

Situasi ini akan meledak. Otomatis nanti akan ada masyarakat yang mengoreksi ini semua. Kapan itu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti indikator bangkrutnya negara ini sudah banyak bermunculan hari ini.

Apa saja itu indikasinya?

Kita akan masuk ke krisis ekonomi yang jauh lebih berat lagi daripada hari-hari ini. Negara tersandera oleh para oligarki. Jadi mendapatkan uang hanya melalui korupsi. Siapa kuat, dia yang menang. Terjadilah pertarungan yang brutal.

Ini semua akan terjadi.

Karena penderitaan rakyat ini semakin meluas. Dari situlah nanti Indonesia akan didefinisikan ulang.

Dulu pada 1998 Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendefinisikan ulang Indonesia. Tetapi rupanya masyarakat kita terlalu permisif kepada penjahat.

Wah?

Buktinya hari ini. Misalnya, untuk melawan Jokowi, sosok yang didukung malah Prabowo. Padahal Prabowo bagian dari masa lalu. Ya, kelompok Islam (yang mendukung Prabowo pada Pemilu 2019) ini ahistoris dengan yang seperti itu. Itu menurut saya salah. Melawan kesalahan dengan menggunakan cara yang salah itu salah.

Itulah mengapa oposisi atau 02 kalah. Karena menggunakan cara yang salah. Kesalahan mereka itu gampang diintervensi oleh pihaknya Jokowi. Ternyata terbukti, orang yang dianggap orang ini (Prabowo) oposisi untuk melawan Jokowi, mengandung unsur-unsur kejahatan juga. Dengan kata lain tidak bisa dipercaya. Dan, terbukti membelot. Pasti ada sesuatu di balik pembelotan itu.

Jadi harus bagaimana dong...

Makanya harus ubah sistem, serta mengedepankan generasi atau kelompok politik baru. Berani, tegas, beragendakan kepentingan rakyat, transparan, teruji. Bukan akal-akalan.

Memang harus muncul orang yang *genuine* (omongannya bisa dipercaya) dan tidak *dirty hands* (terlibat dalam suatu pekerjaan yang ilegal, tidak pantas, atau tidak bermoral). []

Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Koruptor, Musuh Negara Sebenarnya



Pantas saja selama ini yang dituding mengancam negara oleh para pejabat tinggi adalah ajaran Islam dan para aktivis dakwah. Tak tahunya satu per satu mereka yang teriak radikal radikal 'Saya Pancasila' ternyata terbukti korupsi. Terbaru dicokoknya komisioner KPU oleh KPK. Apakah ini masalah individu semata atau terkait dengan sistem yang berlaku? Lantas bagaimana solusinya? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Tanggapan Anda dengan OTT KPK terhadap seorang komisioner KPU?

Saya sama sekali tidak kaget. Pejabat tinggi tertangkap negara korupsi di negeri ini sudah seperti makanan sehari-hari.

Ada yang bilang mereka yang OTT itu hanya 'apes' saja karena ini semacam fenomena gunung es, sebenarnya lebih banyak yang tidak kena OTT...

Betul. Jikalau KPK bisa bersikap lebih independen, dan bertindak lebih lugas, trengginas dan berani, saya kok yakin akan lebih banyak lagi pejabat baik di pusat maupun di daerah di negeri ini yang bakal ditangkap negara korupsi.

Benarlah jika disebut korupsi di negeri ini bagaikan gunung es. Kecil terlihat, tapi sesungguhnya di bawah sana sangat besar. Ada sekian kasus korupsi besar yang tidak diungkap hingga kini, seperti kasus BLBI, Century, Hambalang, e-KTP dan lainnya karena pertemanan atau perlindungan politik. Kita tunggu saja, apakah megaskandal Jiwasraya dan Asabri bisa terungkap.

Sebelumnya Ketum Golkar, Presiden PKS, Ketum Demokrat, PPP dua ketumnya malah, ditangkap KPK. Sedangkan Ketum PKB konon dalam proses. Dan sekarang Ketum PDIP disebut-sebut terkait...

Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik telah jauh melenceng dari asas dan tujuan,

serta tugas pokok dan fungsi yang sebenarnya. Bila awalnya partai politik didirikan dengan tujuan sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, kini tak lebih sebagai alat transaksi politik para elitnya dengan lumuran uang komisi, gratifikasi dan korupsi di sana-sini.

Bila yang dijalankan parpol adalah politik transaksional, maka semua yang menjadi kewenangan parpol mulai dari pembuatan undang-undang hingga pemilihan pejabat-pejabat publik, termasuk di dalamnya komisioner KPU, pasti tak lepas dari transaksi-transaksi itu. Apa yang bisa diharap dari politik semacam ini?

Maka, jika diidealkan parpol didirikan untuk memperbaiki bangsa dan negara, dengan fakta yang ada ini justru parpol telah menjadi instrumen yang sangat destruktif. Perusak. Karena pasti perumusan peraturan perundang-undangan dan pemilihan pejabat-pejabat itu tidak didasarkan pada kaidah yang benar, tapi berdasar siapa yang 'mbayar'. Berbahaya sekali, kan?

Jadi apa akar masalahnya sehingga bisa rame-rame jadi koruptor seperti itu?

Apa yang terjadi pada salah satu komisioner KPU, juga sejumlah pejabat publik sebelumnya yang tertangkap tangan menerima uang suap mengorfasikan satu hal penting: negeri ini sesungguhnya dalam keadaan darurat korupsi.

Sudah tak terhitung sekian banyak bupati, wali kota, gubernur bahkan juga menteri,

begitu juga anggota DPR pusat maupun daerah serta para hakim, jaksa, pengacara termasuk hakim konstitusi yang kena OTT. Nyata sekali, semua lini baik di area eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah terjangkiti wabah korupsi.

Ini semua terjadi karena politik biaya tinggi serta budaya materialisme dan hedonisme yang sudah demikian parah. Mereka menggunakan kewenangan politiknya untuk mengumpulkan kekayaan guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan saat mendapatkan jabatan itu serta guna membiayai kehidupan mewahnya, serta bekal untuk mempertahankan jabatan itu atau meraih jabatan yang lebih tinggi.

Apakah ini semata kesalahan individu, atau ada yang tak beres dengan sistem yang berlaku?

Individu koruptor jelas salah. Tapi kesalahan tidak hanya pada individu saja, tapi juga pada sistem atau budaya. Kita saat ini, telah terperosok pada budaya politik transaksional. Semua putusan politik dan jabatan politik ada bayarannya.

Ketika hal ini telah terjadi di semua lini dan di semua level, maka praktek korupsi telah menyatu ke dalam sistem politik itu sendiri. Ini sangat berbahaya, karena siapa pun akan terdorong bertindak korup atau setidaknya terpapar korupsi jika tidak ingin terlempar dari arena politik ini.

Jadi, sebenarnya yang mengancam negeri ini bukan orang-orang yang dituduh

radikal oleh para koruptor yang mengaku pancasilais, tapi mereka yang korup itu ya?

Benar sekali. Satu per satu mereka yang kemarin teriak paling kencang 'saya Indonesia, saya Pancasila', sambil menuding aktivis dakwah Islam sebagai radikal, seperti Romy, Imam Nakhrawi dan lainnya dicokok satu per satu negara OTT korupsi.

Ini fenomena sangat menarik. Ini membuktikan, slogan saya Pancasila itu hanya bualan belaka, tak lebih sekadar pemanis bibir, sementara kelakuan mereka ternyata lebih busuk dari copet pasar. Merekalah sebenarnya, para koruptor busuk itu, yang harus dinyatakan sebagai musuh negara. Bukan para aktivis dakwah Islam.

Bagaimana agar terlahir para politisi dan para penyelenggara negara yang bersih? Meski tak semua, minimal mayoritaslah.

Pertama, tentu saja harus dibangun pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi, yang tak mudah tergoda korupsi. Tertanamnya nilai-nilai tauhid dan ketakwaan yang kokoh menjadi kunci. Lalu, ditumbuhkan budaya takut maksiat, takut pada Allah dan takut jilatan api neraka. Insyaallah dengan cara itu bakal tercipta basis yang kuat bagi lahirnya masyarakat anti korupsi.

Kedua, harus dibangun partai, kelompok atau organisasi yang juga berintegritas seperti pribadi tadi. Dari partai atau organisasi ini biasanya semua budaya, korup atau tidak,

bermula.

Ketiga, harus ditumbuhkan budaya politik bersih. Ini hanya akan mungkin tercipta dalam sistem politik yang bersih. Politik biaya tinggi, seperti pemilu langsung harus dihentikan. Kalau ada pemilu langsung, cukuplah itu di level pemilihan kepala negara, bukan pada semua tingkatan.

Lalu, kepala negara itulah yang memilih para pejabat yang diperlukan. Dengan cara ini, bisa diminimalkan transaksi-transaksi di antara para politikus.

Memang, dalam sistem seperti ini masih memungkinkan adanya penyimpangan, yakni yang dilakukan oleh kepala negara itu sendiri. Di situ pentingnya pengawasan. Dan mengawasi satu orang lebih mudah dari sekian ribu orang.

Ada yang bilang, tak mesti sistem Islam, yang penting tegas menegakkan hukum, korupsi pasti berkurang signifikan. Buktinya: di negara-negara Skandinavia, juga New Zealand juga Singapura tidak pakai sistem Islam, korupsi rendah...

Memang benar, di negara-negara tersebut korupsi relatif rendah. Apalagi jika menggunakan sistem Islam. Jika hukuman tegas dengan teladan pemimpin didasarkan pada nilai tauhid dan ibadah, insya Allah hasilnya akan lebih dahsyat. Mengapa? Karena di dalamnya ada nilai-nilai transendental (spiritual) yang mempunyai efek serta dorongan lebih besar ketimbang nilai-nilai profan (material).[]



Mereka Bicara Korupsi KPU Bukti Rusaknya Demokrasi



Edy Mulyadi,
Sekjen GNPF Ulama

Bukti Demokrasi Transaksional

Ini dapat kita anggap pemilu dan pilpres yang lalu memang *nggak* bersih dan *nggak* jujur. Ini sedang Allah buka satu-satu. Dan kalau rakyat mau menuntut, bisa. Dalam konteks meragukan legitimasi pemilu khususnya pilpres. Ini *nggak* bisa *nggak*-lah pasti ada kecurangan. Apalagi prinsipnya pimpinan KPU kolektif kolegial, jadi kalau mengaku pemain tunggal itu bohong sekali.

Dampaknya keabsahan pemilu ini dipertanyakan. Soalnya secara kasat mata saat sidang itu banyak sekali membuktikan pelanggaran-pelanggaran, tapi karena *setting*-nya mereka harus menang. Digiring agar bisa memenangkan presiden yang sekarang.

Maka dari itu kalau Islam *kan* tidak pemilu. Dalam khilafah bagaiman cara pengangkatan khalifah melalui orang-orang yang dianggap tokoh, tidak seperti sekarang. Demokrasi itu mahal sekali, dari demokrasi prosedural pilih memilih segala macam lalu menjadi demokrasi transaksional karena penuh dengan *deal-deal* dan pada akhirnya demokrasi kriminal yang menghalalkan segala cara seperti sekarang ini. Ya sudah tidak ada cara lain selain khilafah sebagai solusi.[]



Jeje Zaenuddin,
Waketum Persis

Mereka Sembunyikan Kejahatan

Kalau kita melihat dari tinjauan teologis, itu adalah pembuktian dari Allah SWT bahwa kebusukan, keburukan kapan pun disembunyikan serapat apapun suatu saat akan terungkap. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi "Pada hari kiamat segala rahasia akan dibuka oleh Allah,". Jadi jangankan Hari Kiamat sekarang pun sudah dibongkar rahasia buruk oleh Allah, persengkongkolan.

Dalam pribahasa Arab dikatakan: serapat-rapatnya kita menyembunyikan keburukan, suatu hari akan terbongkar.

Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang beriman dan berketuhanan Yang Maha Esa harusnya menyadari harus menjadi ruh politik apapun bahwa serapat-rapatnya kita menyembunyikan keburukan pasti akan terbongkar.

Kemudian, ini juga menjadi tanda bahwa memang selama ini orang-orang yang pro terhadap rezim atau kekuasaan itu ternyata mereka memang menyembunyikan kejahatan-kejahatan, itu catatan pentingnya.

Kasus yang terjadi baru-baru ini adalah fenomena gunung es dari keburukan moralitas para penyelenggara negara ini, bayangkan saja kalau penyelenggara pemilihan umumnya sudah tidak bisa dipercaya seperti itu, maka bagaimana produk-produknya, ini menghilangkan kepercayaan umat.

Akhirnya sekarang tinggal menunggu saja nanti giliran institusi mana lagi, siapa lagi yang akan dibongkar atau diperlihatkan oleh Allah SWT.

Sebetulnya kalau buruk dan tidaknya sebuah politik, kembali kepada integritas dari si penyelenggara, bisa jadi orang-orang yang tidak berbasis kepada agama tetapi komitmen terhadap menjaga integritasnya pribadi bisa bagus, karena adakalanya juga berbasis agama tapi integritas pribadinya tidak bagus bisa jadi merusak nilai agama.

Jadi ini menggambarkan rusaknya moralitas, integritas, para penyelenggara politik dan proses politik di Indonesia, ditambah lagi kepada sistemnya yang tidak berbasis kepada nilai-nilai agama, basisnya adalah sekularisme.

Ya tentu saja Islam mempunyai solusi terbaik bagaimana bahwa politik itu diasaskan kepada politik ketuhanan, harus semuanya menyadari bahwa kekuasaan mutlak, pengawasan mutlak itu hanyalah pada Allah SWT. Sebagus apapun aturan dibuat, sistem diciptakan kalau manusi tidak percaya kepada pengawasan yang mutlak dan absolut, akan gagal.[]



Slamet Maarif,
Ketua Umum PA 212

Seluruh Komisioner KPU Harus Diperiksa

Sangat memprihatinkan dan membuktikan apa yang para ulama dan tokoh sampaikan dalam Ijtima ulama semakin terbukti bahwa pemilu 2019 penuh kecurangan yang masif dan tersistematis.

Masyarakat pastinya makin meragukan hasil pemilu sehingga keabsahan dan legimitasi dipertanyakan. Kami yakin seiring waktu berjalan Allah akan bukakan kecurangan dan kejahatan pemilu 2019. Keputusan KPU itu kolektif kolegial, jadi seluruh komisariat KPU harus bertanggung jawab. KPK harus berani bongkar ini semua. Partai yang terlibat semuanya harus mendapatkan sanksi berat. Jika PDIP terbukti secara organisasi terlibat wajib dibubarkan, dan itu sudah sangat jelas mencederai demokrasi.

Dengan itu juga segera harus dibuat Pansus di DPR untuk mengusut tuntas kasus OTT tersebut, untuk mengawasi KPK agar jangan sampai lolos dikarenakan komisioner KPU tersebut telah diduga kuat memenangkan (paslon 01) dengan TSMB (terstruktur, sistematis, masif, dan brutal).

Dan saya menyarankan untuk kembali kepada sistem musyawarah yang Allah atur dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan sila ke-4 Pancasila.[]



Asyari Usman,
Mantan Wartawan BBC London

Partai Politik Busuk

Kita akan lihat beberapa hal, bahwa saya pribadi tidak begitu yakin OTT terhadap Wahyu Setiawan adalah upaya pimpinan KPK yang baru untuk menunjukkan bahwa mereka hadir di sana atas keinginan siapapun, karena pernah kita dengar bahwa pimpinan KPK yang sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa atau pimpinan KPK yang baru akan berada di bawah pengaruh siapa-siapa, atau keinginan pihak-pihak yang menginginkan KPK tidak

seperti sebelumnya. Jadi apakah ini keinginan KPK ingin membantah itu, dan menjawab opini publik terhadap KPK sekarang.

Kenapa saya mengatakan seperti itu, karena KPU ini adalah institusi yang paling dekat para pemegang kekuasaan selama ini. Agak mengejutkan juga ketika terdengar OTT terhadap Komisioner KPU, OTT terkait dengan pemegang kekuasaan politik terbesar yaitu PDIP.

Saya lihat ada dua, bahwa PDIP ingin mengubah orang yang mana tidak berhak menempati yaitu Harun Masiku. Yang berhak itu adalah Riezki Aprilia, itu menurut KPU. Jadi ada upaya dari kalangan PDIP untuk memaksakan agar yang menjadi PAW adalah Harun. Dan itu menurut KPU, ada tiga pucuk surat yang dilayangkan dan ditandangi Bu Mega dan Sekjen Hasto Krostiyanto dari PDIP. Jadi saya pikir OTT yang bisa jadi "tak sengaja".

Kalau saya berpendapat, sejak dulu tidak ada yang bisa dipercaya di kalangan partai politik. Hanya satu atau dua partai yang bisa saya percaya, lalu puluhan orang politisi saja yang saya percaya karena saya tahu pribadinya. Secara umum sistem politik saat ini memang saya sendiri tidak percaya.

Tapi kita mau tidak mau hidup di alam seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain. Jadi kalau Anda katakan OTT ini adalah terbongkarnya busuk sistem politik kita, tidak perlu dibongkar pun saya mengatakan sudah busuk ini.

Mengenai solusi, saya melihat bahwa sekarang ini komponen yang relatif belum tercemar ini adalah komponen umat Islam yang garis lurus. Bukan yang sudah masuk dunia perpolitikan yang mengatasnamakan Islam seperti PKB, PPP, dan sebagainya. Itu saya anggap mereka dari bagian yang busuk itu, mohon maaf.

Gerakan umat Islam seperti 212, lalu ormas-ormas yang lain, NU pun saya kira akan saya bedakan yaitu NU garis lurus, Muhammadiyah dan sebagainya, inilah yang kita harapkan akan menjadi penggerak perubahan untuk Indonesia ini ke depannya. Solusinya kalau Anda mau *kocok-kocok* dari yang ada ini, saya kira tidak akan berubah Indonesia ini.[]



Siti Zuhro,
Peneliti Politik LIPI

Publik Curigai Hasil Pemilu

Kasus suap PAW anggota DPR RI yang menjerat anggota komisioner KPU Wahyu sangat memprihatinkan. Dan kalau masalah hukumnya tidak dituntaskan akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan publik yang serius. Karena masalahnya bisa ditarik ke mana-kemana, khususnya hasil pemilu 2019. Apalagi pemilu ini dinilai curang oleh sebagian publik.

Politik transaksional yang dilakukan antar elite dan *vote buying* itu riil. Dari pemilu ke pemilu senantiasa muncul dan makin marak. Dampaknya sangat buruk terhadap demokrasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. KKN tak bisa diganyang oleh sistem demokrasi karena perilaku distortif peserta pemilu (parpol) dan penyelenggara pemilu (KPU).[] **fatih-ghifari**

Bersabar dan Bertasbih

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam (39); Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai salat (40); (QS Qaf [50]: 39-40).

Dalam ayat-ayat sebelumnya diingatkan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa disertai dengan kelelahan atau kepayahan. Dalam sabab nuzulnya, ayat ini turun berkenaan dengan perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi selama enam hari, dan hari ketujuh Dia kelelahan sehingga perlu istirahat.

ka itulah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya: *Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka* (QS Qaf [50]: 36).

Sehingga ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersabar terhadap perkataan orang-orang musyrik. Artinya, "Sepelekanlah urusan mereka atasmu!" Demikian dikatakan al-Qurthubi. Ibnu Katsir berkata, "Bersabarlah kamu terhadap mereka dan tinggalkanlah mereka

kepada mereka seorang pemberi peringatan dari (kalangan) mereka sendiri (QS Qaf [50]: 2).

Ada juga yang mengatakan itu terkait dengan perkataan Yahudi yang mengatakan bahwa Allah SWT beristirahat pada hari Sabtu. Penafsiran ini juga disampaikan Abu Bakar al-Jazairi. Bahwa makna ayat tersebut adalah: "Bersabarlah wahai Rasul Kami dalam menghadapi orang-orang Yahudi dan lainnya tentang sikap mereka yang telah menyerupakan Allah SWT (dengan makhluk-Nya) dan mendustakan sifat-sifatnya."

Ada juga yang menggabungkan semua penafsiran tersebut. Wahab al-Zuhaili berkata, "Wahai Nabi, bersabarlah terhadap ucapan orang-orang musyrik berupa pengingkaran terhadap Hari Kebangkitan. Sebab, Dzat yang berkuasa menciptakan alam tanpa kelelahan, tentulah Dia berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia dari kematian dan menghukum mereka. Juga, bersabarlah atas ucapan kaum Yahudi dan yang lainnya yang menyerupakan Allah SWT, mendustakanmu, dan kufur."

Diperintahkan Bertasbih

Kemudian disebutkan: *Wasabbih biḥamdi Tabbika qabla thulū' al-syams wa qabla al-ghurūb* (dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam). Di samping bersabar, beliau juga diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Tuhannya. Kata *sabbih* merupakan *fi' l al-amr* (kata perintah) dari kata *al-tasbīḥ*. Kata tersebut bermakna menyucikan Allah SWT.

Bertasbih kepada Allah SWT adalah menjauhkan hati dan pikiran dari pemikiran dan persangkaan kekurangan atau disandarkan kepada-Nya kejelekan. Dan membersihkan dari semua aib yang disandarkan kepada-Nya oleh orang musyrik dan atheis.

Perintah tasbih itu disertai dengan pujian kepada Allah SWT. Menurut sebagian mufassir, makna ini pula yang terkandung dalam ayat ini. Al-Syaukani berkata, "Sucikanlah Allah SWT dari segala yang tidak layak bagi-Nya disertai dengan memuji-Nya pada waktu fajar dan ashar." Menurutny, makna ini yang lebih tepat pada ayat ini dibanding beberapa pe-

nafsiran lainnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan al-Qinujī.

Sebagian mufassir lainnya menafsirkan perintah bertasbih dalam ayat ini sebagai perintah untuk shalat. Para ahli tafsir itu pun berbeda tentang shalat yang dimaksud. Ibnu Katsir menyebut sebuah pendapat yang mengatakan, perintah ini sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika itu shalat yang difardhukan hanya dua waktu, yaitu sebelum matahari terbit, tepatnya pada waktu subuh sekarang, dan sebelum terbenamnya, tepatnya pada waktu salat ashar. Dan *qiyamul lail* atau salat malam pernah diwajibkan atas Nabi SAW dan umatnya selama satu tahun, kemudian *di-mansukh* hukum wajibnya bagi umatnya (tidak bagi Nabi SAW).

Setelah itu semuanya itu dinasakh oleh Allah SWT pada malam Isra' Mi'raj dan diganti dengan shalat lima waktu, yang di antaranya terdapat shalat Subuh dan shalat Ashar, keduanya dilakukan sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya.

Dikatakan Qatadah, maksud ayat ini shalat Subuh sebelum terbitnya matahari dan shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari. Pendapat serupa juga dikemukakan Abu Shalih, Ibnu Jarir al-Thabari, dan al-Khazin.

Ibnu Abbas mengatakan shalat sebelum terbenamnya matahari adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Sehingga ayat memerintahkan shalat Subuh waktunya sebelum terbitnya matahari, dan shalat Zhuhur dan shalat Ashar yang waktunya sebelum terbenamnya matahari.

Kemudian dilanjutkan: *Wamin al-layl fasabbihū wa adbār a-sujūd* (dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat). Sebagian ulama memahaminya sebagai perintah bertasbih. Sebagaimana dikatakan al-Syaukani, kata *min* pada firman-Nya: *Wamin al-layl* mengandung makna *li al-tab'īdh* (untuk menunjukkan sebagian). Artinya, bertasbihlah pada sebagian malam.

Menurut sebagian lainnya, yang dimaksud dengan bertasbih pada sebagian malam adalah shalat Maghrib dan Isya.

Yang dimaksud dengan *wa adbār a-sujūd* adalah selesai shalat. Setelah shalat wajib lima waktu diperintahkan juga untuk

IKHTISAR:

1. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum Muslimin untuk bersabar dan bertasbih kepada-Nya.
2. Dalam memohon kepada Allah SWT, kaum Muslimin diperintahkan untuk bersabar dan shalat.

bertasbih memuji Allah SWT. Itu seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar.

Bisa juga mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu. Ali ra berkata, "Dua rakaat setelah Maghrib." Penjelasan yang sama juga dinyatakan Abu Hurairah ra, Ibnu Abbas ra, Ibrahim bin Muhajir, Mujahid, dan al-Sya'bi.

Wahab al-Zuhaili berkata, "Mohon maksudnya tunaikanlah sunnah sesuai shalat fardhu tasbih yang sudah dikenal pada waktu-waktu tersebut disertai pujian."

Abu Bakar al-Jazairi berkata, "Perintah dalam ayat ini dapat berarti perintah untuk shalat lima waktu. Karena sebelum terbit matahari ada shalat Subuh, sebelum terbenam matahari ada salat Zhuhur dan ashar, sedangkan pada waktu malam ada shalat maghrib dan isya. Sebaik-baik sarana untuk meminta tolong dalam rangka kesabaran adalah dengan melaksanakan shalat. Oleh karena itu, Nabi SAW jika ditimpa suatu masalah, beliau melaksanakan shalat.

Tentang perintah untuk meminta kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat, juga disebutkan dalam firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu* (QS al-Baqarah [2]: 153).

Itu pula yang dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah SAW. Dari Hudzaifah ra: *Adalah Nabi SAW apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan shalat* (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Demikianlah. Allah SWT memerintahkan rasul-Nya untuk bersabar dan bertasbih. Perintah itu juga berlaku bagi kaum Muslimin. Dalam meminta kepada Allah SWT, kita diperintahkan untuk bersabar dan menegakkan shalat. Semoga kita termasuk orang yang bisa menjalankan perintah-Nya. *Wal-lāh a'lam bial-shawāb.* []



Ayat ini pun memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersabar terhadap perkataan orang-orang kafir dan bertasbih kepada-Nya.

Diperintahkan Bersabar

Allah SWT berfirman: *Fa[i]shbir 'alā mā yaqūlūna* (maka bersabarlah engkau (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan). *Khithāb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Sedangkan *dhamīr* atau kata ganti pada kata *yaqūlūna* (mereka katakan), kembali kepada orang-orang musyrik. Dengan kata lain, mereka adalah *al-mukadzdzibin* (orang-orang yang mendustakan). Mere-

dengan cara yang baik."

Kesabaran yang diperintahkan ayat ini lebih terkait dengan tugas Nabi SAW sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan beliau. Ibnu 'Asyur berkata, "Maka, bersabarlah atas perkataan orang-orang musyrik yang mendustakan Hari Kebangkitan dan risalah. Semua itu terkumpul dalam frasa: *Mā yaqūlūna* (apa yang mereka katakan). *Dhamīr* (kata ganti) kata *yaqūlūna* kembali kepada orang-orang musyrik yang dituju dari nasihat dan peringatan itu, yang dimulai dari firman-Nya: *(Mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang karena telah datang*

Rezim Zalim, Advokat Kritis Ditangkap Sewenang-wenang

Negara demokrasi tidak perlu alergi akan kritik maupun diskusi mengenai pemahaman khilafah.

Dug! Dug! Dug!... suara gedoran pintu yang keras memecah keheningan malam yang sunyi itu. Sejumlah pria tegap menggedor pintu rumah Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin. Bukan saja membangunkan seisi rumah advokat kritis tersebut tetapi juga sejumlah tetangga terdekat. Jumat (10/1/2020) sekira pukul 02.30 WIB di Bekasi, Jawa Barat.

Setelah dibuka pintu, mereka yang mengaku Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri itu menangkap sang advokat dengan status tersangka atas tuduhan menyebar hoaks dan melawan penguasa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan 15, UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan/atau pasal 207 KUHP.

Aneh, tanpa proses pemeriksaan awal tetiba advokat tersebut jadi tersangka. Ia baru diperiksa dan diambil keterangan setelah dibawa ke Mabes Polri. Tentu saja lelaki yang melek hukum ini protes keras dengan penangkapan yang arogan dan tanpa prosedur hukum yang benar itu. Sialnya, ia tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari penyidik. Bahkan salah satu anggota penyidik pun menghardik Ahmad dengan kata "Bajingan".

Padahal Ahmad adalah seorang advokat yang juga memiliki kedudukan sebagai penegak hukum berdasarkan undang-undang.

Setelah 21 jam ditahan, Jumat malam Sabtu tepatnya pukul 23.30 WIB, Ahmad dibebaskan. Kemudian terbang ke Jogja untuk mengisi sebuah acara yang sudah diagendakan.

Dari Jogja Ahmad pun mengelurkan rilis tertanggal 12 Januari 2020. Menurutnya, ia ditangkap karena unggahan lima artikel dari penulis Nasrudin Joha yang disalin (*copy paste*) di laman Facebook milik Ahmad. Kelima artikel itu adalah kritik terhadap sejumlah kebijakan rezim Jokowi terkait isu Jiwasraya, Pancasila, dan Khilafah. Tetapi menurut polisi kelima artikel tersebut menebar hoaks dan melawan penguasa.

Di hari yang sama sejumlah pengamat mematahkan argumen aparat yang menyebutkan kelima artikel Nasjo tersebut menebar hoaks dan melawan penguasa.

"Menurut saya dan saya yakin menurut jutaan pembaca tulisan Nasrudin Joha lainnya, tulisan Nasjo tersebut bukan hoaks, karena saya ini juga jurnalis dan banyak pula membaca berita dan juga tulisan Nas-

jo, yang ditulis Nasjo itu sesuai fakta, karena datanya juga banyak mengutip dari berita kok. Kalau hoaks ya pimred media massa saja yang harusnya ditangkap lebih dulu. Jangan tiba-tiba menangkap orang-orang yang membagikan tulisan Nasjo!" ungkap pengamat sosial politik Joko Prasetyo kepada *suaranasional.com*, Ahad (12/1/2020).

Ia menilai jutaan orang membaca dan membagikan tulisan Nasjo termasuk Ahmad Khozinudin karena selain faktual, juga sesuai jeritan hati rakyat yang terus menerus dizalimi rezim.

"Sudah demikian parah dan panikkah penguasa negeri ini? Sehingga tulisan-tulisan yang mengandung kritik di media sosial ditanggapi dengan penangkapan gelap buta, atas ustadz, aktivis, ketua LBH Pelita Umat yang serius membela ulama-ulama yang dipersekusi dan ditahan?" kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi dalam rilis yang diterima *Media Umat*, Ahad.

Sedangkan menurut pengamat politik Pradipa Yoedhanegara, polisi kurang optimal membedakan antara kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dengan ujaran kebencian (*hate speech*).

"Padahal narasi dalam tulisan Nasjo menurut saya pribadi bukanlah merupakan



■ Ahmad Khozinudin

hate speech, tapi lebih kepada *free speech*," ujarnya.

Ia menegaskan, tulisan Nasjo masih dalam kaidah dan norma yang sama sekali tidak melanggar hukum di era demokrasi. Menurutnya, negara demokrasi tidak perlu alergi akan kritik maupun diskusi mengenai pemahaman khilafah.

Ia juga mengingatkan, berkali-kali sejarah membuktikan tiada kekuasaan zalim yang tak tumbang. "Lawan!" pungkasnya. **fs**

Tanggap Bencana Banjir dan Longsor Posko ISN Sinergi Bersama Ormas Islam

Yang justru banyak membantu korban bencana di banyak daerah justru didominasi ormas-ormas Islam



Awal tahun 2020 musibah banjir dan longsor hampir merata di beberapa daerah, terutama di Jakarta dan Bogor. Berbagai aksi tanggap darurat muncul dari masyarakat. Salah satunya relawan Islam Selamatkan Negeri (ISN). Bersama dengan Ormas Islam lainnya, Posko ISN menyalurkan bantuan bagi para korban.

Bey Laspriana, koordinator relawan Islam Selamatkan Negeri (ISN) tanggap bencana mengungkapkan, meski tak secara resmi, relawan ISN dan ormas Islam serta instansi lainnya bekerja sama memberikan pertolongan terbaik di lokasi bencana.

"Secara resmi kita tidak bekerja sama dengan ormas Islam lain, tapi ketika di lapangan begitu kita ketemu biasa-

nya kita langsung bekerja sama dengan lembaga lain, ada yang dari kesehatan, ada dari pemerintahan, kemudian kita juga bekerja sama dengan TNI saat melakukan evakuasi," jelasnya kepada *Media Umat*.

Bey menjelaskan, aksi yang sudah dilakukan oleh ISN di lokasi bencana. Di hari pertama, timnya mengutamakan evakuasi korban yang terjebak di banyak tempat. Setelah itu melakukan penyaluran logistik yang dibutuhkan.

"Seperti obat-obatan kebutuhan pakaian, seperti pampers lalu kebutuhan wanita, kemudian yang ketiga pembuatan dapur umum, lalu bantuan medis, ada beberapa posko yang kita datangkan dokter, atau ada yang akhirnya sekarang bekerja sama dengan relawan kesehatan," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Bey timnya juga menggalang dana untuk membantu para korban banjir dan longsor. Dana itu diperuntukkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Para relawan ISN secara masif membuka banyak posko di Jakarta. Di Jakarta Timur, ada sebanyak empat posko, di Tambora satu posko, lalu di sekitaran banjir lainnya ada empat posko, kemudian di Jakarta Selatan itu ada dua, serta tiga posko di daerah Kalideres dan Ciledug. Mereka juga membuka posko di Bogor.

Ia menjelaskan, tim bergerak berdasarkan perencanaan. Tim disebar berdasarkan pemetaan daerah terdampak bencana. Setelah itu tim mengumpulkan informasi terkait kerusakan dan bantuan yang dibutuhkan. Bersamaan itu tim pusat melakukan penggalangan dana. Di lapangan, tim

membuka dapur umum dan menyalurkan logistik.

Tidak hanya sampai di situ, tim ISN pun memikirkan bagaimana membantu masyarakat pasca bencana. "Di tahap ini yang kita lakukan adalah bersih-bersih lingkungan karena dari banjir kan saat surut luar biasa apa yang ditinggalkan, bukan hanya lumpur tapi juga sampah. Bahkan mobil-mobil kendaraan itu kan saling bertumpuk, nah kita lakukan bersih lingkungan itu. Sambil juga terus melakukan penggalangan dana," jelas Bey.

Di daerah Bogor, ISN juga bersinergi dengan ormas Islam di sana, hingga menurunkan relawan berkuda yang berhasil menembus lokasi yang terisolasi. "Ini yang unik jadi teman-teman di sana dengan kuda itu bisa menembus lokasi yang aksesnya sudah terputus, yang mobil dan motor sudah tidak masuk. Alhamdulillah," jelas Bey.

Ia mengungkapkan, yang banyak membantu korban bencana di banyak daerah justru didominasi ormas-ormas Islam. Timnya di lapangan tidak melihat ada ormas selain Islam atau mungkin memang tidak ada.

"Kita tidak melihat ormas-ormas sekuler yang menggunakan nama resmi kelompok mereka yang sekuler, justru yang kelihatan itu memang dari FPI, Hizbut Tahrir juga ada, kemudian kelompok masyarakat, bahkan DKM juga bergabung bergerak. Ormas sekuler saya lihat tidak ada, atau kami tidak melihat di titik posko kami yang merata di tempat bencana," pungkash Bey. **fs**

Dampak Negatif UU KPK

KPK Gagal Geledah Kantor PDIP

Secara logika, tidak akan mungkin KPK melakukan pengeledahan apabila tidak ada keterkaitan.



Kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPP PDIP dinilai sebagai dampak negatif pelemahan KPK melalui UU KPK yang baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Chandra Purnawirawan, pengamat hukum dan politik. Menurutnya, UU KPK terbaru mengharuskan pengeledahan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Itu semakin menegaskan bahwa revisi UU KPK memperlemah kerja KPK.

"Penindakan korupsi akan semakin berbelit-belit jika harus menunggu izin De-

wan Pengawas. Ini bisa berdampak buruk dalam pengumpulan barang bukti. Konteks hukum acara pengeledahan seharusnya tidak diumumkan. Tujuan pengeledahan itu agar barang bukti didapatkan segera dan tidak dihilangkan. Apabila diumumkan seminggu kemudian digeledah, maka berpotensi terjadinya penghilangan barang bukti," ungkapnya kepada *Media Umat*.

Pengeledahan tersebut diduga terkait dengan pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga melibatkan politisi PDIP Harun Masiku.

"Saya tidak mengetahui dengan pasti apakah PDIP terkait kasus tersebut, tetapi dapat kita tarik kesimpulan dari adanya maksud KPK akan menggeledah kantor DPP PDIP. Karena secara logika, tidak akan mungkin KPK melakukan pengeledahan apabila tidak ada keterkaitan," jelas Chandra.

Ia menilai keberanian PDIP menghadapi KPK yang akan menggeledah kantornya dikarenakan PDIP merasa saat ini adalah partai yang paling berkuasa di pemerintahan.

"Saya menduga PDIP berani menghadapi karena partai yang sedang berkuasa, tetapi semestinya sebagai partai yang berkuasa menunjukkan bahwa dirinya menghormati proses penegakan hukum. Apabila ada upaya menghalangi maka masyarakat menilai adanya dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut," ungkapnya.

Mantan ketua KPK Abraham Samad juga satu suara, gagalnya KPK dalam menggeledah kantor PDIP adalah wujud dari pelemahan pemberantasan korupsi melalui UU yang baru. Ia menyebut seharusnya PDIP jangan meremehkan KPK seperti itu, karena menurutnya orang-orang KPK juga bukan anak kemarin sore.

"Peristiwa ini kita ambil hikmahnya, bahwa sebenarnya adanya polemik ini di-

karenakan hasil dari revisi undang-undang KPK sebelumnya," ungkap Abraham.

Ia menjelaskan dalam UU KPK sebelumnya tidak ada mekanisme harus adanya izin melakukan pengeledahan. "Menurut saya seharusnya kita sudah menyimpulkan," jelasnya.

Abraham menyatakan, pengeledahan yang seharusnya bisa dilaksanakan justru menjadi tertunda-tunda, dengan konsekuensi barang bukti kemungkinan besar tidak akan lagi ditemukan.

Abraham juga mengungkapkan bahwa orang-orang di KPK sudah berpengalaman dalam bidang tersebut, maka sudah pasti saat mereka datang ke kantor DPP PDIP sudah sesuai dengan aturan yang lengkap.

"Orang KPK ini bukan anak kemarin, dia tahu ini mau datang di kantor PDIP Perjuangan, kantor partai pemenang pemilu yang harus betul-betul punya aturan lengkap baru kita datang ke sana," jelas Abraham.

Dan Abraham menegaskan seharusnya tetap melakukan proses pengeledahan. "Kalau misalnya teman-teman KPK itu memang sudah mengantongi izin dari Dewan Pengawas, maka apapun hasilnya tetap harus dilakukan pengeledahan," jelasnya. **■ fs**

Revisi PP Minerba Menantang KPK

"Jangan meneruskan proses revisi PP Minerba sebelum dilakukan revisi UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 di DPR."

Proses revisi ke-6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Minerba dulu sudah dihentikan oleh Mensesneg atas dasar surat KPK kepada Presiden Jokowi. KPK menilai, revisi PP tersebut bertentangan dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009.

Namun entah atas perintah siapa dan alasan apa, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan kembali revisi tersebut melalui surat Nomor 516/30/ MEM.B/2019 tanggal 18 November 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara, perihal membahas kembali revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahkan beredar penjadwalan rapat dari Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negara dari Kamis menjadi Jumat (10/1/2020) di kantor Sekretariat Negara. Pembahasan itu meng-

undang Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Direktur Eksekutif CERl Yusri Usman menilai, pesan yang disampaikan oleh KPK kepada Presiden Jokowi sekitar bulan Mei 2019 sudah sangat jelas. "Jangan meneruskan proses revisi PP Minerba sebelum dilakukan revisi UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 di DPR," tulisnya di *klikanggaran.com*.

Ia menjelaskan, rekomendasi dari KPK kepada Presiden itu dikeluarkan berdasarkan kajian tim hukum KPK dan atas nama lembaga KPK. Meskipun pimpinannya sudah berganti, rekomendasi itu tetap hidup dan mengikat sebelum dibatalkan secara resmi dan kolektif oleh semua pimpinan KPK sekarang.

Yusri menduga, ada potensi kerugian negara sekitar USD 1 miliar pertahun dari produksi 8 tambang PKP2B (PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT



■ Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

Kidco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Kendilo Coal, PT Multi Harapan Utama dan PT Tanito Harum) yang total produksi pertahun semua itu sekitar 200 juta metrik ton, dengan asumsi pesimis keuntungan bersih USD 5 per metrik ton maka didapat angka diatas tersebut.

"Bagaimana kalau keuntungannya selama ini sekitar USD 8 sampai USD 10 per metrik ton? Tentu sangat dahsyat dan mudah memancing penguasa berkolaborasi dengan pengusaha ini. Sehingga dengan asumsi pesimis saja kalau diperpanjang dalam bentuk IUPK selama 20 tahun, maka potensi kehilangan pemasukan bagi BUMN Tambang sekitar USD 20 miliar," paparnya.

Ia mendesak KPK segera memanggil Menteri ESDM untuk mendapat konfirmasi

sinya karena seolah-olah pemerintah menantang keputusan KPK. Begitu juga Presiden seharusnya menegur semua menteri yang terlibat dalam proses revisi PP Minerba ini untuk mengindahkan rekomendasi KPK, yaitu melakukan upaya percepatan RUU Minerba di DPR atau Presiden berani mengeluarkan Perppu Minerba.

"Kalau tetap dipaksakan revisi ke-6 PP Nomor 23 tahun 2010 hanya untuk memperpanjang PKP2B menjadi IUPK kepada pengusaha ini, maka kedua unsur tindak pidana korupsinya terpenuhi sesuai UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara mudah dihitung dengan kasat mata," jelasnya. **■ ah**

Seruan Ulama: Istiqamah Tegakkan Islam

Perlu adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk mempersiapkan umat dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam



Para ulama tak henti-hentinya menyerukan kepada seluruh kaum Muslim agar kembali kepada aturan Allah. Islam harus ditegakkan di muka bumi. Mereka mengingatkan agar umat Islam istiqamah dalam perjuangan di tengah kondisi bangsa yang karut marut seperti sekarang.

Seperti di Kota Bogor, para ulama berkumpul dalam acara Multaqa Ulama pada Ahad pagi, 29 Desember 2019 di Majelis Pancaran Amal Gunung Pancar, Babakan Madang, Bogor yang dipimpin Kyai AA Syamri. Di kediaman ulama kharismatik keturunan pahlawan Aceh ini multaqa diselenggarakan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kyai Yazid Busthomi dari Ponpes Nizhomul Islam Sukamakmur yang tampil

pertama menyerukan agar umat Islam bersatu memperjuangkan khilafah dan tetap istiqamah dalam dakwah, mengkaji kitab dengan halaqah.

Sementara itu Kyai Abdul Mujib, dari Majelis Mu'ahidil Islam Dayeuh Jonggol tak kalah keras. Ia mengatakan bahwa satu satunya solusi bagi umat Islam saat ini untuk bangkit kembali memimpin dunia adalah dengan menegakkan khilafah. Namun ada syaratnya, yaitu harus memiliki ilmu. Oleh karena itu, ia menyerukan para hadirin agar ikut halaqah dalam rangka membekali perjuangan ini karena setiap amal harus dibarengi dengan ilmu, sementara ilmu tentang khilafah dan perjuangannya ada dalam halaqah. "Mari kita bertekad kuat memenuhi semua kebutuhan diri ini dengan ilmu dan taqwa," paparnya.

Di Pasuruan, selain istiqamah dalam memperjuangkan Islam, para ulama juga mengajak umat untuk memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah Islam. Dalam acara Multaqa Ulama Pasuruan pada Sabtu, 11 Januari 2020, di TPQ Al-Arqom, Gus Rohibni selaku tuan rumah menyampaikan perlu adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk mempersiapkan umat dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam, serta hanya menjadikan Islam sebagai satu satunya solusi dalam menghadapi segala krisis multidimensi yang melanda negeri tercinta ini.

"Karena keberkahan yang sejati hanya bisa diraih dengan cara menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui institusi khilafah," tegasnya.

Kemudian di Banjarmasin, para ulama menyeru untuk tetap istiqamah untuk berdakwah meskipun dilabeli radikalisme atau ajaran terorisme. "Bagaimana Ustadz menghadapi label yang diberikan orang lain kepada orang Islam sebagai teroris?" demikian pertanyaan salah seorang jamaah.

Ustadz Abdul Jabar menjawab dengan menjelaskan bahwa labelisasi terhadap pengemban dakwah itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. "Dahulu Nabi pernah dibilang sebagai tukang sihir, sihir yang bisa memisahkan seseorang dari keluarganya. Namun Nabi tetap istiqamah dalam berdakwah tanpa mempedulikan celan orang-orang yang suka mencela," ung-

kapnya.

Ia kemudian menyampaikan bahwa definisi teroris itu harus diperjelas. Kalau yang dimaksud adalah membuat kehancuran atau pembunuhan massal, maka yang layak disebut teroris adalah Amerika, RRC, dan Israel serta negara-negara yang telah banyak membunuh kaum Muslim di berbagai negeri. Bahkan umat Islamlah sesungguhnya korban terorisme.

"Kita harus tetap istiqamah dalam berdakwah dan menjalankan syariat Islam, tanpa memedulikan celan orang yang suka mencela, sebab kemuliaan seseorang itu tergantung pada keridhaan Allah, walaupun manusia banyak yang mencacinya tetapi Allah ridha terhadapnya maka cacian dan celan itu tidak ada nilainya," tegasnya. **fs**



MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Istidraj Trap

Waspadalah... Waspadalah... Jika Hidup Tetap Tak Mau Taat Syariat, Tetap Menolak Taat, Tetap Membenci Syariat, Tetap Bergelimang Maksiat NAMUN Berlimpah Nikmat, Itu Tanda ISTIDRAJ, Pembiaran Dari Allah Swt Agar Ybs Semakin Larut Dalam Dosa!

Begitu judul sebuah kiriman muhasabah yang setiap hari abah terima. Lengkap dengan dalilnya di situ. Dari hadits, atsar sahabat hingga pernyataan ulama.

"Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya, maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu, mereka terdiam berputus asa." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)

"Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus menerus melimpahkan nikmat atas dirimu sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepada-Nya." [Ali bin Abi Tholib ra]

"Hendaklah engkau takut jika selalu mendapat karunia Allah, sementara engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepada-Nya, jangan sampai karunia itu semata-mata istidrajoleh Allah." [Ibnu Athaillah]

Yup, istidraj trap. Jebakan istidraj. Pembiaran agar yang bersangkutan semakin larut dalam dosa. Serem sekali. Seolah-olah pelakunya mendapatkan nikmat yang banyak berlipat padahal pada saat yang sama ia melakukan amal yang salah alias maksiat. Maksiat di rumah, di luar rumah. Maksiat dalam kerja, bisnis dan lain-lain. Hemmm.

Dari puluhan forum komunitas yang acap dikunjungi abah, hampir semua menyebut, maksiat yang paling sering mereka lakukan dan masih berlangsung sampai dengan kini adalah utang riba! Kenapa setelah paham riba itu haram dan bahkan dosa besar, masih terus terlibat riba? Mereka seperti tak kuasa melepaskan diri dari riba. Lepas aset jika perlu! Tapi tidak juga mau mereka lakukan karena mereka sudah punya hitungan sendiri. Lantas bagaimana dengan dosa riba yang terus menemani? Nantilah, toh masih ada waktu buat bertaubat di akhir nanti! Justru dengan utang riba ini, mereka merasa bisnis malah semakin berkibar, pundi-pundi kekayaan makin berlimpah! Duh! Kalau sudah begini, mereka terkena istidraj trap!

Seorang pengusaha kelas kakap ibukota yang

sempat jumpa abah di sebuah lounge bandara beberapa waktu lalu, bahkan sempat meminta pengertian abah. Katanya, "Saya ini Muslim tulen. Jangan ragukan kemusliman saya. Saya juga yakin tentang dosa riba. Itu saya sependapat dengan abah. Tapi tolong pahami saya abah, izinkan saya untuk mengambil pinjaman riba itu. Kenapa? Karena saya Muslim. Muslim itu amanah. Jadi saya terpaksa ambil dana riba itu karena saya pasti amanah!"

Duh kuadrat! Kok bisa dia bersikap begitu. Nama besar yang satu ini ternyata sudah terlalu jauh terperosok dalam jebakan riba. Tak lama, dua bulan kemudian, abah mendapat kabar usahanya bangkrut! Allah kariim.

Dari riba merembet ke yang lain. Karena nyaman dengan pelanggaran riba, akhirnya berani juga melanggar aturan yang lain. Akhirnya tak mau lagi taat syariat. Akhirnya menolak taat, bahkan membenci syariat! Serem sekali. Lebih gawat lagi kalau mereka menjelma menjadi azazil-azazil baru. Naudzubillahi mindzalik...

Jadi, benar sekali tagline khas bahwa bisnis itu bukan sekadar untung-rugi, tapi surga neraka. Ada akhirat tempat segala pertanggungjawaban. So, Pengusaha Muslim, hayuk jangan tunda lagi Bisnis, Ngaji dan Dakwah agar terhindar dari istidraj trap! Yuk serius. Bismillah!

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Isu Kerugian Asabri dari Salah Investasi hingga Dikorupsi

Persaingan yang ketat dan keserakahan mendorong para manajer investasi untuk mencari imbal hasil terbaik untuk kepentingan perusahaan dan nasabahnya.



Belum selesai kasus Jiwasraya, kini perusahaan asuransi Asabri, BUMN asuransi dan dana pensiun khusus TNI dan Polri, diterpa isu korupsi. Isu ini mulanya dihembuskan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ungkap Mahfud (10/1).

Mahfud mengklaim pernyataannya itu merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, modus korupsi serupa dengan Jiwasraya. Bahkan, orang-orang yang terlibat diduga sama. "Polanya sama dengan Jiwasraya. Modus operandinya sama," terang Mahfud (13/1).

Belakangan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, membenarkan isu tersebut. PT Asabri, menurutnya, mengalami

kerugian akibat salah menempatkan investasi menempatkan portofolio di 14 emiten yang sahamnya anjlok. "Memang ya seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi saham," ujar Kartika (13/1).

Ia mengatakan penurunan nilai saham tersebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Kartika menilai, kasus Asabri ini berbeda dengan yang terjadi pada Jiwasraya yang menderita triliunan rupiah akibat gagal bayar klaim. Asabri disebutkan merupakan perusahaan asuransi sosial, sementara Jiwasraya lebih bersifat asuransi privat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai kerugian pada asuransi Asabri diakibatkan oleh praktik saham gorengan. Toto melihat ada modus kesamaan antara perusahaan itu dengan kasus asuransi Jiwasraya yang juga ikut melakukan saham gorengan.

"Kalau lihat modusnya agak mirip. Sebagai BUMN asuransi, melakukan investasi di pasar modal. Cuma terlalu berisiko karena

mengoleksi saham-saham gorengan. Akibatnya terjadi kerugian karena harga saham yang berguguran," ujar Toto (13/1).

Liberalisasi Sektor Keuangan

Kasus Asabri menjadi pelengkap berbagai skandal industri asuransi jiwa yang terjadi di negara ini. Beberapa kasus yang mencuat di publik, yaitu Jiwasraya, AJB Bumiputera, dan Bakrie Life. Di luar negeri, skandal industri asuransi merupakan perkara jamak.

Peneliti Core Indonesia, Muhammad Ishak, menyatakan maraknya kerugian industri merupakan buah dari liberalisasi sektor keuangan. Persaingan yang semakin ketat, membuat perusahaan asuransi dituntut kreatif untuk menarik nasabah. Salah satunya adalah menciptakan produk asuransi yang dikawinkan dengan investasi, terutama di sektor keuangan yang penuh dengan transaksi riba, perjudian, dan spekulasi.

"Akibatnya tingkat risiko semakin tinggi karena produk-produk mereka masuk ke dalam ranah investasi di pasar modal dan pasar uang yang sangat spekulatif," ujar Ishak (13/1).

Ia menambahkan, persaingan yang ketat dan keserakahan mendorong para manajer investasi untuk mencari imbal hasil terbaik untuk kepentingan perusahaan dan nasabahnya. Jika tidak, investor mereka akan mengalihkan dana mereka kepada perusahaan lain yang memberikan imbalan yang lebih tinggi. Manajer investasi kemudian menggunakan berbagai strategi, termasuk membeli produk-produk yang berisiko tinggi.

Selain itu, tambahnya, kerugian perusahaan keuangan juga rawan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal untuk berbagai kepentingan. "Contohnya, pada tahun 1995, dana Asabri sebesar Rp410 miliar dibobol oleh direktornya sendiri," pungkash Ishak. ■ **muis**

MUAMALAH

Biaya Pengobatan dan Kesembuhan

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Upah seorang dokter hukumnya boleh karena merupakan manfaat (jasa) yang mungkin diperoleh oleh *mustajir*. Tetapi, tidak bisa melakukan *ijarah* atas kesembuhan. Karena itu berarti bekerja atas sesuatu yang tidak jelas. Seorang dokter dapat memeriksa pasien, karena itu merupakan manfaat (jasa) yang jelas. Pasien boleh juga meminta dokter untuk menanganinya beberapa hari tertentu, karena itu merupakan pekerjaan yang jelas.

Diriwayatkan dari Anas ra yang mengatakan: Nabi SAW memanggil seorang pemuda. Lalu pemuda itu membekam baginda. Kemudian baginda memerintahkan untuk memberinya satu, atau dua *sha'*. Beberapa budak Nabi menuturkan, bahwa baginda merasa lebih baik, setelah pemuda itu keluar [Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Lihat, *Fath al-Bâri*, Juz IV/424; *Shahih Muslim*, Juz 3/1203; Malik, *al-Muwatha'*; Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Abi Syaibah dalam *al-Mushanna'*].

Bekam pada masa itu termasuk bagian dari pengobatan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berobat. Dengan demikian, upah bekam menunjukkan kebolehan untuk mempekerjakan dokter. Nabi memang pernah bersabda, "*Pendapatan seorang tukang bekam adalah kotor.*" [HR Muslim, *Shahih*, Juz III/1199, dan Abu Dawud, *Sunan*, Juz IX/290]

Hadits ini tidak menunjukkan larangan memberi

upah kepada tukang bekam, tetapi menunjukkan makruhnya mencari penghasilan dengan melakukan bekam. Dalilnya, Nabi pernah menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai *khabits* (kotor), meski keduanya mubah.

Dengan demikian, bisa disimpulkan, bahwa celaan Nabi terhadap bekam yang sebenarnya boleh, karena



Nabi sendiri pernah melakukan, itu menunjukkan bahwa hukum mendapatkan penghasilan dari pekerjaan membekam ini adalah makruh. Kemakruhan ini disimpulkan dari celaan Nabi terhadap pendapatan yang diperoleh tukang bekam, sebagai pendapat yang kotor. Meski membekamnya sendiri boleh (mubah).

Dari dalil ini juga bisa ditarik kesimpulan, bahwa hukum *ijarah*, melakukan kontrak jasa dalam masalah

pengobatan ini juga mubah. Hanya, yang perlu diperhatikan, bahwa akad *ijarah* dalam konteks ini hanya sebatas memberikan layanan pengobatan dan kesehatan, bukan akad memberikan jaminan kesembuhan. Karena, kesembuhan ini tidak jelas. Berbeda dengan akad memberikan layanan kesehatan, dan pengobatan, jelas.

Karena itu, tidak boleh melakukan akad *ijarah* dalam konteks pengobatan dan kesehatan ini dengan jaminan kesembuhan. Karena kesembuhan itu urusan Allah, sedangkan urusan manusia adalah mencari, dan berikhtiar mengusahakan kesembuhan. Bisa berhasil, dan bisa juga tidak. Karena itu, upah yang diberikan kepada tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, ditentukan berdasarkan pada jasanya memberikan layanan kesehatan, atau medis, bukan ditentukan oleh sembuh dan tidaknya.

Dokter dan perawat wajib dibayar, ketika sudah memberikan layanan kesehatan, atau medis, tanpa harus melihat, apakah pasien yang diberi layanan tersebut sembuh dan tidaknya. Sebagaimana tenaga marketing, dibayar sesuai dengan pekerjaannya memasarkan barang yang dijual, yang menjadi amanahnya, tanpa melihat, apakah barang tersebut benar-benar laku, atau tidak.

Semua ini terkait dengan pekerja yang manfaat (jasa)-nya khusus untuk individu. Seperti dokter, guru, ustaz, dan sebagainya. *Wallahu a'lam.* ■ **har**



Jiwasraya mengalami kerugian yang luar biasa. Bukan hanya miliar, tapi triliun. Kok bisa? Ke mana larinya uang itu? Benarkah uang itu digunakan untuk biaya politik sebagaimana skandal sebelumnya? Fokus membahasnya berikut ini.

Orang Istana di Pusaran Skandal Jiwasraya?

Mengapa OJK lamban? Apakah hal ini karena salah satu direksi Jiwasraya kala itu dipegang oleh ring 1 Jokowi?

Wajah Lee Kang Hyun, Vice President Samsung Electronics Indonesia, di layar kaca dalam acara ILC: Jiwasraya, tampak kesal. Ia bersama beberapa warga Korea Selatan lainnya termasuk jajaran korban skandal perusahaan asuransi plat merah Jiwasraya.

Lee menyebut 16 miliar uangnya tertanam sebagai saham di Jiwasraya, dan baru 8 miliar rupiah yang dapat ditarik. Saat menanyakan penyelesaian sisanya kepada Bank Mandiri, ia mendapat jawaban prosesnya butuh waktu 2-3 tahun. "Bagaimana warga Korea dapat betah sampai 2-3 tahun?" Demikian kesalnya ia menuding pemerintah Indonesia tak dapat melindungi rakyatnya sendiri.

Skandal Jiwasraya adalah hadiah tahun baru 2020 di era pemerintahan Jokowi. Perusahaan asuransi milik negara itu diperkirakan berpotensi merugi hingga Rp 13,7 triliun, akibat 'bermain-main' dengan saham 'gorengan' (baca: kualitas rendah). Inilah yang disebut Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kalau Jiwasraya sudah dirampok.

Ia pun mengeluarkan tiga hipotesis tentang sebuah perusahaan yang sedang untung dan tiba-tiba anjlok. "Pertama karena pimpinan jadi gila, kedua ada tsunami

ekonomi, dan ketiga ada perampokan," katanya.

Karenanya, pihak pertama yang patut disoroti adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena itulah lembaga negara yang semestinya mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Said Didu dan sejumlah pengamat asuransi seperti Irvan Rahardjo mengungkapkan seluruh pejabat OJK dari awal terbentuk harus diperiksa. Sebab, sebagai regulator jasa keuangan, seharusnya OJK sudah mendeteksi hal tersebut sejak awal dan melakukan tindakan serius. "OJK harus bertanggung jawab penuh, semua komisioner harus diperiksa," kata Irvan seperti dikutip *CNNIndonesia.com*.

Sementara itu OJK berkelit dengan mengklaim sudah mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya bermasalah sejak Januari 2018. Namun, OJK memilih menunggu Jiwasraya mengatasi sendiri tekanan likuiditasnya. Di bulan Oktober 2018, OJK malah menganggap itu adalah hal yang normal dalam bisnis asuransi, "Sekarang yang terjadi (di Jiwasraya) mungkin ada seperti ini. Itu biasa seperti itu. Selama ini *kan* Jiwasraya juga *enggak* ada masalah," kata Riswinandi kepada wartawan di sela rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

Irvan menilai, sikap OJK yang membiarkan krisis Jiwasraya berlarut-larut tidak tepat. Menurutnya, OJK tak memiliki kepekaan pada krisis dan tak paham akar masalah bahkan bersikap anti-pasar.

Sampai kemudian akhirnya skandal ini meledak, semua pihak menuding OJK bertanggung jawab. BPK akan memeriksa OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kejaksaan Agung (Kejagung) pun mengungkapkan bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK (OJK) Hoesen diperiksa sebagai saksi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sikap OJK banyak mengundang pertanyaan; mengapa lamban merespon, bahkan seperti membiarkan Jiwasraya terus babak belur dan merugikan negara sampai akhirnya alami gagal bayar polis? Apakah hal ini karena salah satu direksi Jiwasraya kala itu dipegang oleh ring 1 Jokowi? Salah satu anggota dewan direksi era itu adalah Harry Prasetyo. Kala itu ia menjabat sebagai direktur keuangan. Harry diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedepuyan III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden.

Muatan Politik

Wajar bila kemudian kecurigaan mengarah skandal Jiwasraya ini tak lepas dari muatan politik. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu misalnya, ia

menuturkan bahwa dengan kasus Jiwasraya yang terjadi di puncak Pemilu 2019 dan dekatnya mantan salah satu pimpinan direksi dengan simpul kekuasaan, mungkin akan membuat kasus ini sulit untuk dibongkar dengan tuntas.

Pandangan penuh curiga juga turut diungkapkan oleh Arief Poyuono. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra ini bahkan menilai kegagalan Jiwasraya dalam membayar polis karena terdapat kerja sama antar pimpinan perusahaan untuk melakukan investasi fiktif yang diperuntukkan untuk membobol dana masyarakat.

Kepala KSP Moeldoko semula menolak mengakui keberadaan Harry di kantornya, namun akhirnya mengakui. Setelah kasus Jiwasraya meledak, Harry dikabarkan mundur (dimundurkan) dari Deputy di KSP.

Kini, mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Moeldoko memastikan tak akan melindungi Harry jika memang polisi menemukan bukti ia terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan Jiwasraya. "Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, Istana melindungi, apalagi Istana. Moeldoko tidak ada melindungi, KSP sama sekali tidak, apalagi Istana. Istana saja *enggak ngerti* kalau Pak Hari di sini," katanya.

Tapi, Harry tidak sendirian dalam skandal Jiwasraya ini, ada Dato Seri Tahir Mayapada yang ternyata Anggota Dewan Petimbangan (Wantimpres). Tahir disebut-sebut terkait dengan penggorengan saham-saham lapis bawah yang dibeli PT Asuransi Jiwasraya. Tahir yang mendapat gelar Dato Seri dari Kesultanan di Malaysia ini adalah pemilik kelompok usaha Mayapada Grup.

Diduga Tahir menampung saham kakak-beradik Benny Tjokrosaputro dan Teddy Tjokrosaputro yang dibeli dari Jiwasraya. Benny adalah pemilik PT Hanson International (MYRX), sedangkan Teddy pemilik PT Rimo Internasional Lestari (RIMO). Namun baik Tahir maupun Benny sama-sama membantah terlibat dalam pembelian saham gorengan Jiwasraya.

Jiwasraya ini benar-benar menggetarkan jiwa. Banyak orang menunggu bagaimana *ending*-nya, karena menyeret sejumlah orang dekat Istana dalam pusarannya. Meski banyak yang skeptis kasus Jiwasraya akan tuntas, ada kemungkinan dibuat skenario seperti skandal Century yang selesai begitu saja, *bail out* dan mengorbankan sejumlah orang, sementara aktor-aktor utamanya tak terjajah. Bahkan Sri Mulyani yang diduga kuat terlibat di dalamnya terus mendapat panggung di pemerintahan. Inilah lingkaran setan politik Indonesia. []

iwan/ls

BPK: Ada Penyimpangan!

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 16 temuan terkait mega skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ini disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Ke-16 temuan tersebut terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT AJS selama 2014-2015.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi *fraud* atau curang dalam pengelolaan *saving plan* dan investasi.

Saat ini, berdasarkan permintaan DPR dan Kejaksaan Agung, BPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan investigatif pendahuluan dan penghitungan kerugian negara. [] **Is**

Jiwasraya: Cermin Rapuhnya Sistem Keuangan Kapitalisme

Skema Ponzi pun dijalankan: pendapatan dari nasabah baru dipakai untuk membayar nasabah lama.



Kerugian negara akibat badai yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya semakin besar. BPK memperkirakan kerugian perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu, pada September 2019, mencapai Rp 13,7 triliun. Pada November 2019, kondisi keuangan perusahaan itu telah negatif Rp 27,2 triliun. Namun, angka kerugian itu tampaknya belum mencapai dasarnya.

Seperti diketahui, perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, sangat bergantung pada jumlah setoran premi nasabahnya. Prinsipnya, semakin banyak peserta, dana premi yang diraup semakin besar dibandingkan dengan pembayaran klaim. Keuntungan pun akan semakin besar. Terlebih lagi, dana premi tersebut ditanam pada produk-produk keuangan seperti deposito, saham, dan obligasi, dan reksa dana—wadah yang menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi melalui investasi pada berbagai produk keuangan. Pendapatan pun mengucur tanpa perlu berkeringat.

Karena itu, kinerja perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya, sangat bergantung pada performa sektor keuangan secara keseluruhan, dan secara khusus, perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kepada perusahaan asuransi. Pasalnya, performa aset-aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan produk-produk di pasar modal dan pasar uang lainnya, sangat mudah berfluktuasi, baik akibat persoalan internal perusahaan, kondisi pasar domestik, dan pasar global.

Dalam perkembangannya, agar dana yang dapat dikumpulkan lebih besar, perusahaan asuransi menawarkan produk investasi yang dikawinkan dengan investasi. Menghadapi persaingan yang semakin sengit dalam berebut nasabah, perusahaan asuransi berjibaku menawarkan produk asuransi plus investasi yang paling memikat. Maka, lahirlah produk-produk asuransi yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan investasi normal, seperti bunga deposito. Dalam kasus Jiwasraya, produk JS Saving Plan, yang menawarkan asuransi plus investasi, memberikan imbal hasil sekitar 9-13 persen pada 2013-2018. Padahal, rata-rata bunga deposito pada 2018 hanya tujuh persen.

Agar tetap untung, Jiwasraya berupaya memutar dana nasabah yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Celaknya, sebagaimana prinsip "*high risk, high return*," semakin tinggi tawaran pendapatan, maka risiko kerugian semakin besar. Pasalnya, produk-produk yang menawarkan pendapatan besar tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan yang rapuh sehingga

harus menawarkan pendapatan lebih di atas harga normal agar menarik minat investor, termasuk perusahaan-perusahaan asuransi yang mengempit dana besar. Namun, jika mereka kolaps, dana nasabah juga akan raib.

Spekulasi

Dalam kasus Jiwasraya, misalnya, mengutip laporan BPK tahun 2016, sebanyak Rp 6,4 triliun aset Jiwasraya diinvestasikan hanya untuk membeli saham satu perusahaan, yakni PT Inti Agri Resources, yang asetnya hanya Rp 332 miliar. Dengan kinerja yang tidak begitu bagus, investasi tersebut jelas berisiko raib ketika perusahaan tersebut bangkrut. Akibat guyuran investasi itu, harga saham perusahaan itu melambung: dari Rp 95 per lembar menjadi Rp 3.675. Kondisi tersebut jelas tidak sehat, sebab kenaikannya tidak ditopang faktor fundamental perusahaan.

Contoh lainnya, Jiwasraya juga membeli Medium Term Notes (MTN), semacam obligasi yang jangka waktunya lebih pendek, pada segelintir perusahaan yang kurang bonafide, alias labanya kecil bahkan merugi. Jiwasraya, misalnya, nekat memborong 97 persen MTN milik PT Hanson Internasional sebesar Rp 680 miliar, yang menawarkan bunga 12 persen.

Nahasnya, perusahaan-perusahaan belakangan kesulitan likuiditas dan tak lagi mampu membayar bunga kepada Jiwasraya. Dampaknya, pembayaran kepada nasabah pun macet. Ibarat terkena stroke, tubuh Jiwasraya menjadi kaku lantaran aliran pendapatan dari perusahaan-perusahaan itu macet. Pembayaran klaim kepada nasabah pun ikut macet.

Dalam situasi yang tidak normal itu, pihak manajemen kemudian melakukan berbagai rekayasa keuangan untuk menutupi borok perusahaan itu. Harapannya, minat calon nasabah untuk berinvestasi tetap tinggi dan nasabah lama bertahan. Skema Ponzi pun dijalankan: pendapatan dari nasabah baru dipakai untuk membayar nasabah lama.

Selain faktor 'kesalahan strategi', penyebab kerugian yang menimpa Jiwasraya juga dapat berasal dari penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengelola.

Contohnya, pada tahun 1995, direktur PT Asabri menggarong perusahaan investasi prajurit TNI itu sebesar Rp 410 miliar. Sang direktur kemudian diganjar lima tahun kurungan plus denda Rp 34 miliar. Sialnya, di tengah bergolaknya kasus Jiwasraya, perusahaan ini juga diterpa isu korupsi sebesar Rp 10 triliun.

Kemelut yang terjadi pada perusahaan asuransi tersebut menambah daftar panjang cacat sektor keuangan di tanah air. Sebelum meledaknya kasus Jiwasraya, OJK bahkan belum mampu menuntaskan kasus yang menerpa PT AJB Bumiputera yang sekarat. Pada tahun 2019, keuangan perusahaan sudah negatif Rp 20 triliun. Sebelumnya, Bakrie Life juga bangkrut lantaran aset-asetnya yang mayoritas saham terjun bebas akibat krisis tahun 2008 silam. Uang nasabahnya pun ikut tenggelam.

Meskipun demikian, sepang terjang pelaku usaha di sektor keuangan dalam sistem kapitalisme memang sarat risiko, penyimpangan, dan krisis. Sebab, basis aset kegiatan mereka berkuat pada investasi produk-produk keuangan yang keuntungannya lebih mengandalkan investasi pada sektor-sektor non-riil, seperti saham, deposito, obligasi, dan reksa dana. Namun, pemerintah tetap berjuang untuk melindungi sistem tersebut, meskipun telah menguras kantong negara dan menilap dana jutaan investornya.

Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, produk yang ditawarkan oleh Jiwasraya, memiliki problem pada dua aspek: asuransi dan investasi. Asuransi dalam sistem kapitalisme dibangun atas akad yang ilegal sebab bertentangan dengan konsep 'jaminan' (*dhamanah*) yang diatur oleh Islam.

Menurut aturan Islam, objek yang dijamin itu adalah sesuatu yang wajib ditunaikan oleh pihak terjamin seperti menjamin pembayaran utang seseorang yang memang harus ditunaikan. Sementara itu, dalam kasus asuransi objek jaminannya adalah sesuatu yang tidak wajib dijamin, seperti kematian dan kecelakaan.

Selain itu, kegiatan investasi perusahaan-perusahaan asuransi berkuat pada produk-produk yang batil menurut Islam. Sebagai contoh, investasi pada saham Perusahaan Terbatas (PT) bertentangan dengan konsep syirkah di samping penuh spekulasi. Demikian pula investasi pada deposito perbankan, *Medium Term Notes*, dan obligasi yang mengandung transaksi riba serta reksa dana yang melebur dana investor ke berbagai portofolio investasi yang haram.

Alhasil, kasus Jiwasraya menjadi bukti kesekian kali bahwa industri asuransi, sebagaimana halnya industri perbankan dan pasar modal dalam sistem kapitalisme, sangat rapuh, di samping bertentangan dengan Islam. Lalu mengapa kita tetap mempertahankannya? **ishak**

Kembali dari Uhud dan Mengobati Luka

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Seleasai menguburkan para syuhada', memuji Allah, dan berpasrah kepada-Nya, Rasulullah kembali ke Madinah. Nanti akan terlihat jelas ekspresi cinta dan kasih sayang dari Mukminah-Mukminah sejati, seperti cinta yang juga diperlihatkan oleh Mukmin-Mukmin di kancah peperangan. Dalam perjalanan pulang, baginda SAW berpapasan dengan Hamnah binti Jahsy. Saat dikabari kematian saudara lelakinya, 'Abdullah bin Jahsy, dia mengucapkan *istirja'*, *inna li-Llahi wa inna ilaihi rajiun*, dan memohonkan ampunan untuknya.

Disampaikan pula kepadanya kabar kematian pamannya, Hamzah bin 'Abdul Muththalib. Dia menyampaikan *istirja'*, *inna li-Llahi wa inna ilaihi rajiun*, dan memohonkan ampunan untuknya. Selanjutnya dibarkanlah kematian suaminya, Mush'ab bin 'Umair. Dia langsung menjerit dan tidak percaya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Seungguhnya suami perempuan itu mempunyai tempat tersendiri di hatinya.*"

Rasulullah SAW juga bertemu dengan wanita dari Bani Dinar, yang suami, saudara lelaki, dan ayahnya gugur dalam perang Perang Uhud. Ketika para sahabat menyampaikan kabar duka itu, dia bertanya, "*Lalu bagaimana kabar Rasulullah?*" Mereka menjawab, "*Baik-baik saja, Ummu Fulan. Baginda, Alhamdulillah, sebagaimana yang Anda harapkan.*" Dia bersikeras, "*Tunjukkan kepadaku. Aku ingin melihat baginda.*" Ketika sudah melihat baginda, perempuan itu berkata, "*Semua musibah, asalkan tidak menimpa Anda, tiada artinya!*"

Lalu datanglah ibunda Sa'ad bin Mu'adz sambil berlari-lari, sementara Sa'ad memegang tali kekang kuda Rasulullah SAW. Dia memberi tahu, "*Ya Rasulullah, itu ibuku.*" Maka baginda menyambutnya, "*Selamat datang.*" Selanjutnya baginda berhenti untuk menemuinya. Setelah dekat, baginda mengabarkan kematian anak lelakinya, 'Amr bin Mu'adz. Dia menjawab, "*Selagi kulihat Anda selamat, semua musibah yang menimpa kuanggap kecil.*" Kemudian Rasulullah mendoakan keluarga para korban Perang Uhud.

Baginda bersabda, "*Ummu Sa'ad, bergembiralah dan sampaikanlah kabar gembira kepada keluarga mereka, tentang mereka yang sedang berkasih sayang di surga, dan mereka juga memohonkan syafaat untuk seluruh keluargamu.*" Dia menjawab, "*Kami ridha, Rasulullah. Siapa lagi orang yang masih ingin menangis setelah ini?*" Dia melanjutkan, "*Ya Rasulullah, berdoaah untuk keluarga yang mereka tinggalkan.*" Maka baginda pun berdoa, "*Ya Allah, singkirkanlah duka cita dari hati mereka, gantilah yang hilang, dan jadikanlah orang-orang yang menggantikan mereka baik bagi yang ditinggalkan.*"

Pada petang itu pula, Sabtu, 7 Syaw-

wal 3 H, Rasulullah SAW tiba di Madinah. Setelah bertemu keluarga, baginda menyerahkan pedangnya kepada putrinya, Fathimah, dan bersabda, "*Bersihkanlah darah di pedang ini, putraku. Demi Allah, dia telah membuktikan kehebatannya pada perang kali ini.*" Ali bin Abu Thalib juga menyerahkan pedangnya kepada Fathimah seraya berkata, "*Bersihkan darah pedang ini. Demi Allah, dia telah memperlihatkan kehebatannya kepadaku pada perang kali ini.*" Rasulullah bersabda, "*Jika kau telah memenangkan pertempuran dalam perang ini, Sahl bin Hunaif dan Abu Dujanah juga mirip denganmu.*"

Setelah peperangan Uhud itu usai, dan kaum Muslim kembali ke Madinah, korban tewas di kubu Muslim berjumlah 70 orang, sebagian besar dari kaum Anshar. Dari mereka ada 65 orang yang gugur, de-

materiil yang berarti, dalam perang yang baru berakhir. Jika demikian, mereka pasti kecewa dan menyesal, dan mungkin berpikir untuk menyerang Madinah lagi. Maka baginda SAW berencana untuk mengejar mereka saat itu juga.

Para ahli perang mengatakan, bahwa Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan memerintahkan untuk menyusul pasukan musuh. Instruksi itu disampaikan esok paginya, setelah Perang Uhud, yaitu hari Ahad, 8 Syawwal 3 H. Baginda bersabda, "*Tidak boleh keluar bersama-sama, kecuali yang kemarin ikut berperang.*"

Gembong munafik 'Abdullah bin Ubay bertanya, "*Bolehkah aku ikut bersamamu?*" Nabi menjawab, "*Tidak.*" Kaum Muslim melaksanakan perintah itu dengan patuh, kendati luka-luka mereka belum kering dan dilakukan karena perang belum lagi kendur.



ngan rincian 41 orang dari Khazraj, dan 24 dari Aus. Satu korban dari golongan Yahudi, sementara dari Muhajirin 4 orang saja.

Sementara korban di kubu musyrik, menurut penuturan Ibn Ishaq ada 22 orang. Namun, setelah dilakukan penelusuran dengan teliti, ditemukan jumlah korban di kubu musyrikin sebanyak 37 orang.

Kaum Muslim tinggal di Madinah pada malam Ahad, 8 Syawwal 3 H, sepulang dari Uhud. Suasana berkabung pekat menyelimuti, ditambah kondisi tubuh yang masih payah luar biasa dan luka-luka masih menyisakan luka. Begitupun mereka tetap melakukan penjagaan di lorong-lorong dan jalan-jalan menuju Madinah. Secara khusus mereka juga menjaga panglima tertinggi mereka, Rasulullah, karena bahaya bisa datang dari mana saja.

Rasulullah tidak berhenti merenungkan keadaan saat itu. Mungkin saja orang-orang Quraisy berpikir, bahwa mereka belum memperoleh kemenangan mutlak, juga tidak bisa mendapatkan keuntungan

Mereka berkata, "*Kami siap berangkat, Rasulullah.*" Jabir bin 'Abdullah memohon-mohon agar ikut bergabung, "*Ya Rasulullah, aku ingin selalu menemani kamu di perang mana pun. Aku kemarin tidak ikut perang karena ayahku menyuruhku bekerja sebagai saudara-saudara perempuanku. Kali ini, izinkanlah aku ikut bersama kamu.*" Nabi mengizinkan mereka.

Rasulullah bersama kaum Muslim berangkat ke daerah Hamra'ul Asad, 8 mil dari Madinah, lalu mulai mendirikan perkemahan. Di sana pula Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuza'i mendatangi Rasulullah SAW mengumumkan keislamannya. Namun ada pendapat yang mengatakan, bahwa dia waktu itu masih musyrik. Yang jelas, dia memberi nasihat dan mengingatkan Rasulullah tentang persekutuan antara Bani Khuza'ah dan Bani Hasyim. Katanya, "*Muhammad, demi Allah, kami (Quraisy) merasa terhibur karena musibah yang menimpa sahabat-sahabatmu, tetapi kami berharap*

Allah senantiasa menjagamu." Lalu Rasulullah menyuruhnya menyusul Abu Sufyan dan membiarkannya pergi.

Kekhawatiran Rasulullah akan kembalinya pasukan musyrik ke Madinah nyaris menjadi kenyataan. Saat beristirahat di Rauha' yang berjarak 36 mil dari Madinah, pasukan musyrik ribut saling membantah, "*Kalian belum melakukan apa pun! Kalian sudah menghancurkan kekuatan mereka, tetapi meninggalkan mereka begitu saja. Padahal pemimpin mereka bisa menghimpun kekuatan lagi untuk menghadapi kalian. Kita harus kembali untuk menghabisi mereka hingga ke akar-akarnya!*"

Pandangan ini sebenarnya hanya di permukaan, yaitu dari orang-orang yang tidak bisa mengukur kekuatan kedua kubu dan semangat juangnya belum padam. Karena itu, salah satu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pasukan Quraisy, Shafwan bin Umayyah, menolak jalan pemikiran tersebut. Dia berkata, "*Saudara-saudara, jangan lakukan itu! Aku khawatir kaum Muslim yang kemarin tidak ikut perang akan bergabung dengan mereka. Pulanglah! Biarlah kemenangan ini di tangan kalian, sebab jika kalian kembali, aku tidak berani menjamin, bahwa kemenangan tetap di tangan kalian.*"

Namun, pandangan ini ditolak oleh mayoritas kaum musyrik. Tetapi, sebelum Abu Sufyan dan balatentaranya meninggalkan tempat, Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuza'i muncul di situ, sementara mereka tidak tahu kalau dia sudah memeluk Islam. Dia pun bertanya, "*Apa yang kulihat di belakangmu, Ma'bad?*" Ma'bad menjawab, "*Muhammad bersama sahabat-sahabatnya telah berangkat untuk mencariimu dengan membawa pasukan dalam jumlah yang belum pernah kulihat sebelumnya, dengan kemarahan yang membara melawan terhadap kalian. Orang-orang yang kemarin tidak ikut perang telah bergabung bersamanya. Mereka sangat geram dan ingin membalas dendam.*"

Abu Sufyan menghardik, "*Celaka kau! Apa yang kaukatakan?*" Dia menjawab, "*Demi Allah, menurut pendapatku, lebih baik kalian segera pulang sebelum barisan depan pasukan mereka memergoki barisan depan pasukan ini.*" Abu Sufyan berkata, "*Demi Allah, kami awalnya telah memutuskan untuk kembali menyerang mereka hingga binasa sampai ke akar-akarnya.*" Ma'bad berkata tandas, "*Jangan lakukan! Itu nasihatku.*"

Dalam sekejap, runtuhlah moral pasukan kaum musyrik, berganti menjadi ketakutan dan gemetar. Tak ada pilihan untuk menyelamatkan diri, kecuali segera kembali ke Makkah. Begitulah cara Nabi mengobati luka, akibat kekalahan dalam Perang Uhud.[]



2020 TERANG DENGAN ISLAM

Yogyakarta - Follback Dakwah menggelar Talk Show Dua Ribu Dua Puluh dengan menghadirkan pembicara Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto, Rabu (1/1) di Aula Mustanir Yogyakarta.[]



KETAKWAAN MENGHASILKAN MARDHATILLAH

Ngawi – Pemuda dan jamaah Masjid Al-Falaah Kasreman Ngawi selenggarakan kajian bulanan dengan tema Ketakwaan Menghasilkan Mardhatillah, Sabtu (11/1) di Kasreman, Ngawi.[]



OBSESI: 2019 GELAP, AKANKAH 2020 TERANG?

Pontianak - Majelis Taklim Inhadul Fikri gelar kajian Obrolan Seputar Syariah Islam (Obsesi): 2019 Gelap, apakah 2020 Terang? Ahad (12/1) di Pontianak.[]



MENEGAKKAN KHILAFAH, MAHKOTA KEWAJIBAN

Pasuruan – Sejumlah kiai dan ustaz dalam Multaqa Ulama' Aswaja Pasuruan, bersepakat bahwa menegakkan khilafah adalah mahkota kewajiban, Sabtu (11/1) di TPQ Al Arqom Pasuruan.[]



MUSIBAH, PERINGATAN AGAR KEMBALI PADA SYARIAT

Sidoarjo –MT Baitul Faizin selenggarakan Kajian Rutin Kitab Nashaihl Ibad, Jumat (10/1). Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa musibah adalah peringatan dari Allah SWT agar umat kembali kepada syariat.[]



KHILAFAH SOLUSI TUNTAS MASALAH UIGHUR

Sumedang – Multaqa Ulama Aswaja Jabar membahas khilafah sebagai solusi tuntas masalah Muslim Uighur, Ahad (12/1) di Sumedang.[]



KHILAFAH SOLUSI PROBLEMATIKA UMAT

Sumenep – Majelis Taqarrub Ilallah Sumenep asuhan KH Ahmad Danniji menyelenggarakan kajian Islam membahas khilafah sebagai solusi atas problematika umat, Ahad (12/1) di Sumenep.[]



WISUDA PERDANA HAFIDZ AL-QUR'AN PONPES DARUL BAYAN

Sumedang - Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Darul Bayan asuhan Ajengan KH Ali Bayanullah, al-Hafidz menggelar wisuda perdana para santri hafidz Al-Qur'an pejuang syariah dan khilafah, Ahad (29/12/2019) di Kompleks Ponpes Tahfidz Al-Qur'an Darul Bayan, Jatinangor, Sumedang.[]

Ketika Umar Bin 'Abdul 'Aziz Terlambat Shalat

'Abdul 'Aziz, ayah Umar bin 'Abdul 'Aziz, pernah mengirim anaknya, Umar, yang ketika itu masih kecil, ke Madinah, agar mendapatkan pendidikan adab di sana dari penduduk Madinah. 'Abdul 'Aziz, yang merupakan keluarga Bani Umayyah itu pun menulis sepucuk surat kepada Shalih bin Kisan, salah seorang ulama' terpercaya. Supaya ia bisa mendidiknya, mengurus, dan mengasuhnya, serta memperhatikan perkembangan putranya.

Suatu ketika, Umar bin 'Abdul 'Aziz berangkat menemui 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah untuk menimba ilmu darinya. Ketika itu, Shalih bin Kisan bertugas untuk mendisiplinkannya dalam urusan shalat, agar Umar bin 'Abdul 'Aziz selalu menjaga shalatnya di masjid.

Suatu ketika, Umar bin 'Abdul 'Aziz terlambat shalat jamaah di masjid. Shalih bin Kisan bertanya kepadanya, *"Apa yang membuatmu terlambat? [sehingga terlambat shalat di masjid]."*

Umar bin 'Abdul 'Aziz menjawab, *"Tukang cukurku sedang merapikan dan memperbaiki rambutku"* katanya.

Shalih bin Kisan pun marah besar, *"Telah sampai kepadamu, kamu lebih memperhatikan rambutmu, ketimbang shalatmu?"*

Karena tak kuasa menahan marah, Shalih bin Kisan pun menulis surat kepada orang tua Umar bin 'Abdul 'Aziz, untuk memberitahukan apa yang telah terjadi pada putranya.



nya.

Apa yang dilakukan oleh 'Abdul 'Aziz terhadap Umar? 'Abdul 'Aziz mengirim orang kepada putranya, untuk menangkapnya, dan menggunduli rambutnya, sehingga

tidak membuatnya sibuk, dan sanggup meninggalkan shalatnya, hanya gara-gara mengurus rambutnya.

Pendidikan yang keras dilakukan oleh orang tua Umar bin 'Abdul 'Aziz kepada Umar itulah yang kelak membentuk karakter putranya. Orang tua yang bertakwa kepada Allah, seperti 'Abdul 'Aziz inilah yang kelak menjadikan putranya menjadi salah seorang Khalifah Rasyid, yang luar biasa. Tentu di sana juga ada peranan para ulama' hebat, seperti Shalih bin Kisan, 'Ubaidillah bin 'Utbah, dan generasi sahabat lainnya.

Selain itu, Madinah, yang menjadi tempat tumbuh dan belajar Umar bin 'Abdul 'Aziz. Adab dan *tsaqafah* juga telah membentuk kepribadiannya. Di sana, tempat para sahabat Nabi berada. Masyarakat Madinah juga merupakan masyarakat yang luar biasa. Akhlak penduduknya juga merupakan tertinggi di dunia. Bahkan, konvensi [*urf*] penduduknya pun dianggap oleh Imam Malik sebagai salah satu sumber hukum. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Madinah.

Semuanya itu membentuk pribadi dan sosok Khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz yang luar biasa. Ketakwaan, adab, *tsaqafah*, kepemimpinan dan sebagainya, yang kelak mengantarkannya menjadi salah satu khalifah tersukses dalam sejarah. Namanya pun ditulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban umat manusia. **har**

KRISTOLOGI

Poligami Bibel Boleh, Gereja Melarang

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

Mengenai poligami, banyak orang yang salah paham. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami. Padahal, berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Bahkan sebelum Islam, orang bisa memiliki puluhan istri bahkan ratusan.

Orang-orang Kristen dan orientalis menempatkan poligami sebagai salah satu tata cara Islam atau salah satu kewajiban Muslim. "Jangan jadi Islam, nanti kamu dipoligami!" terkadang demikian lontaran negatif mereka terhadap ajaran Islam.

Bibel Mendukung Poligami

Yang menarik, mereka tidak pernah berkaca pada kitab yang mereka gunakan setiap hari Ahad, Bibel. Di dalamnya, ternyata banyak memuat kisah-kisah poligami, aturan-aturan poligami. Ya, Bibel sesungguhnya mendukung poligami, bukan menolak.

Dalam Perjanjian Lama, dibahas ten-

tang kebolehan berpoligami tanpa ada batasan-batasan tertentu, yakni jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Taurat dalam Perjanjian Lama juga menyebutkan beberapa nabi yang melakukan poligami tanpa menyebutkan jumlahnya. Taurat menyebutkan Nabi Sulaiman memiliki lebih dari satu istri,

1 Raja-raja 11:3. Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-istrinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.

Jadi, poligami pernah lahir dalam syariat-syariat sebelum Islam. Poligami sangat diperbolehkan, walau berapa banyak sekalipun.

Keluaran 21:10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.

Juga termasuk apa yang ada dalam Ulangan 21:15-17. Jelas sekali, Bibel sama sekali tak mengharamkan poligami, malah mengatur hukum-hukumnya agar adil. Dalam hal ini, poligami sudah banyak dipraktikkan pada zaman Bani Israil.

Adapun ketentuan yang diberikan oleh Dewan Gereja dan jemaat gereja untuk melarang poligami adalah ketentuan hukum yang diletakkan oleh manusia,

bukan oleh agama. Dalam Kristen tidak ada *nash kitabiyah* yang melarang pengikutnya untuk berpoligami, apabila mereka mau melakukannya maka hal tersebut sungguh diperbolehkan.

Pihak Gereja melarang poligami sejak abad pertengahan, tapi terkadang memberikan keringanan bagi para pembesar. Ketetapan Gereja tersebut hanyalah semata-mata karena hawa nafsu. Buktinya, di satu sisi mereka memberikan keringanan untuk berpoligami dan di sisi lain melarangnya.

Raja Irlandia, Daisarmith, memiliki dua istri, begitu juga halnya dengan Raja Prancis yang menikahi dua istri. Raja Prancis sendiri berusaha mengisi istana dengan perempuan supaya bisa bersenang-senang dengan mereka. Raja Fredrik II memiliki dua istri berdasarkan kesepakatan dari Gereja. Gereja dalam hal ini membolehkan poligami, tetapi di sisi lain melarangnya dan tidak menjaga agama serta ketetapan hukum-hukumnya.

Martin Luther, bapak pendiri Kristen Protestan menganggap poligami sebagai sistem dan undang-undang yang tidak terpisah dari ketetapan hukum yang dibawa oleh Yesus. Ia menerangkan kecocokan poligami dengan mengatakan, "Sesung-

guhnya Tuhan memberikan izin bagi setiap pengikut Perjanjian Lama dalam segala ihwal, tetapi pengikut al-Masih yang mengikuti mereka dan berhak untuk melakukannya kapan pun dia yakin jika situasinya mendukung. Bagaimanapun juga, poligami lebih baik daripada harus bercerai."

Namun sekte Kristen yang sependapat dengan hal ini hanya terdapat di Jerman dan beberapa negara tetangganya.

Larangan tetap larangan, pihak Gereja telah membuat pernyataan larangan tentang tindakan poligami pada pengikutnya. Gereja memegang larangan ini dan mencukupkan untuk menikah dengan satu istri saja, serta melarang untuk menceraikannya. Kejadian 2:22-24.

Gereja saat ini di bawah Paus Roma mengharamkan poligami dan kebanyakan negeri-negeri lainnya ikut mengharamkannya. Seorang suami tidak boleh menikah lagi selama istri pertamanya masih hidup. Hukum ini juga dipakai sejumlah aliran Kristen Protestan yang juga mengatakan bahwa suami tidak boleh menikah kembali selama istri pertamanya belum diceraikan.[]



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**



■ Banjir di jalan tol Cikampek

Musibah kembali menyapa di hari pertama tahun 2020. Kali ini dalam wujud banjir yang kembali hadir. Di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor dan beberapa daerah sekitar. Sebagian memicu tanah longsor. Seperti terjadi di beberapa titik di Kecamatan Sukajaya Bogor.

Banjir adalah bencana bertemunya “faktor langit” yaitu kehendak Allah dalam menurunkan curah hujan, dengan “faktor bumi” – yaitu akibat tangan-tangan manusia.

Dalam kasus banjir bandang dan tanah longsor di Lebak, Banten, misalnya, penyebabnya antara lain perambahan hutan dan penambangan liar.

Adapun banjir dan longsor di Bogor, antara lain di Kecamatan Sukajaya, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selain akibat curah hujan yang cukup lama, di atas perbukitan di sepanjang jalan maupun aliran sungai di daerah tersebut yang berupa lempung dengan kemiringan nyaris vertikal, namun sudah banyak dijadikan permukiman.

Sementara itu banjir yang melanda kawasan Jakarta, khususnya di sebagian area Tol Jakarta-Cikampek, menurut Kemenhub, adalah akibat drainase yang tertutup buangan tanah atau puing dari Proyek Kereta Cepat. Akibatnya, air meluap dan menimbulkan banjir.

Semua bencana yang terakhir ini jelas akibat dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan manusia. Ada dalam wujud perusakan hutan, penambangan liar, pengabaian Amdal, dll. Sudah begitu, pemerintah cenderung lalai bahkan abai terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan yang ironis, pemerintah sendiri malah demi menggenjot investasi, berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dalam bahasa Al-Qur'an, ini akibat dari dosa dan kemaksiatan manusia. Allah SWT berfirman:

Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia supaya Allah timpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali (ke jalan-Nya) (TQS ar-Rum [30]: 41).

Para ahli sumber daya air sudah berabad-

abad memahami, bahwa ada empat jenis banjir, yaitu “banjir bandang” (biasanya di pegunungan akibat longsor menanggul air hujan, yang kemudian jebol), “banjir rob” (di pesisir akibat air pasang), “banjir luapan” (di tepi sungai), dan “banjir genangan” (di kota, akibat debit air oleh hujan dan limpahan, jauh lebih besar dari air yang diserap tanah dan yang dialirkan).

Bagaimana banjir saat Daulah Islam masih tegak?

Sebenarnya wilayah Daulah Islam yang amat luas juga bersentuhan dengan berbagai potensi bencana alam. Wilayah sekitar gurun di Timur Tengah dan Afrika Utara amat rawan kekeringan. Lembah sungai Nil di Mesir atau sungai Efrat-Tigris di Irak amat rawan banjir. Sementara itu Turki, Iran dan Afghanistan sampai sekarang juga masih sangat rawan gempa. Selain itu kadang-kadang wabah penyakit yang hingga abad 18 belum diketahui pasti penyebab maupun obatnya datang menghantam, misalnya cacar (variolla) atau pes. Namun toh Daulah Islam tetap berdiri tegak lebih dari 12 abad. Kalaupun Daulah ini kemudian sirna, itu bukan karena kelaparan, penyakit, atau bencana alam, tetapi karena kelemahan di antara mereka sendiri, terutama elite politisnya, sehingga dapat diperalat oleh para penjajah untuk saling bertengkar, membunuh dan memusnahkan.

Ketika Kota Baghdad didirikan tahun 758 M, bulan Juli dipilih sebagai waktu

mulai karena dua astronom, Naubakht Ahvaz dan Masyallah percaya bahwa itu saat yang tepat, sebab air pasang sungai Tigris sedang maksimum, sehingga tanah yang tidak tergenang dijamin untuk seterusnya aman dari banjir.

Meski demikian, para penguasa Muslim tetap membangun bendungan, terusan dan alat peringatan dini. Insinyur Al-Farghani (abad 9 M) telah membangun alat yang disebut *Nilometer* untuk mengukur dan mencatat tinggi air sungai Nil di berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun mengukur, al-Farghani berhasil memprediksi banjir sungai Nil baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Peradaban Islam memiliki jasa tak ternilai dalam mengendalikan air. Abu Rayhan al-Biruni (973-1048) mengembangkan teknik untuk mengukur beda tinggi antara gunung dan lembah guna merencanakan irigasi.

Sementara itu Abū Zayd 'Abdu r-Rahman bin Muhammad bin Khaldūn Al-Hadrami, (1332-1406) menulis dalam kitab monumentalnya “Muqadimah” suatu bab khusus tentang berbagai aspek geografi iklim.

Jadi, di mana manusia sebaiknya bermukim, memang seharusnya mempertimbangkan keberadaan sumber air serta iklim di situ dalam jangka panjang, sehingga kekurangan air maupun banjir bagi suatu negeri yang didiami manusia sudah dari awal dapat diantisipasi.

Pada 1206 al-Jazari menemukan berbagai variasi mesin air yang bekerja otomatis. Berbagai elemen mesin buataannya ini tetap aktual hingga sekarang, ketika mesin digerakkan dengan uap atau listrik.

Industri irigasi menjadi perhatian utama di negeri-negeri Islam, baik untuk air minum, wudhu, kebutuhan rumah tangga maupun pertanian pada umumnya. Ini berbeda dengan Eropa Utara yang relatif memiliki curah hujan yang tinggi dan banyak sungai.

Al-Jazari, membuat lima jenis pompa air yang berbeda dari rancangan tradisional. Saat ini, sisa-sisa saqiya maupun noria masih bisa ditemui di beberapa desa di Suriah maupun Mesir, meski pompa listrik telah banyak menggantikannya. Kemampuan peradaban Islam

bertahan berabad-abad, bahkan terhadap berbagai bencana alam termasuk kekeringan dan banjir adalah buah sinergi dari keimanan, ketaatan pada syariat, dan ketekunan mereka mempelajari sunnatullah sehingga mampu menggunakan teknologi yang tepat dalam mengelola air. Inilah paduan antara ilmu langit (akherat) dengan ilmu bumi (dunia)

Jadi bencana dihadap lebih dulu dengan ikhtiar. Tata Ruang disesuaikan dengan ekosistem. Daerah aliran sungai dijaga. Hutan-hutan di hulu dijaga. Pendangkalan sungai diantisipasi. Sebelum suatu daerah disulap menjadi kawasan permukiman, dimodelkan dan dihitung dulu dampak lingkungannya ke depan, jangan sampai kebanjiran, terdampak banjir atau bahkan menyebabkan banjir di tempat lain.

Penguasa Daulah Islam menaruh



■ Noria untuk menaikkan air yang masih ada di Suriah

perhatian yang besar agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana. Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun cadangan logistik, hingga melatih masyarakat untuk selalu tanggap darurat. Aktivitas jihad adalah cara yang efektif agar masyarakat selalu siap menghadapi situasi terburuk. Mereka tahu bagaimana harus mengevakuasi diri dengan cepat, bagaimana menyiapkan barang-barang yang vital selama evakuasi, bagaimana mengurus jenazah yang bertebaran, dan bagaimana merehabilitasi diri pasca kedaruratan.

Mereka bukan orang-orang yang hanya pandai pencitraan dalam seremonial yang dibumbui kata-kata Ayo Tawakkal ataupun orang-orang yang terlalu percaya diri lalu sombong menantang bencana.

Namun tidak semua musibah adalah azab. Mayoritas musibah adalah ujian. Azab hanyalah musibah yang terjadi atas para pendosa, tanpa mereka sempat bertaubat hingga ajalnya.[]



■ Nilometer yang dibangun al-Farghani untuk peringatan dini banjir Sungai Nil.

NU dan Fatwanya tentang Syariat Islam di Masa Lalu

Stop mempolitisasi Pancasila untuk menolak syariah dan khilafah. Apalagi para pendiri bangsa sendiri pun belum pernah menyatakan kata sepakat atas keabsahannya.

Geger isu masuknya kapal rezim komunis Cina di wilayah perairan Indonesia membuat kaum sekuler liberal megap-megap. Aneh, yang dibredel komunis tetapi mereka yang sakit hati. *Emang* mereka juga komunis?

Kalau bukan, apa coba? Dulu, misalnya, bukannya mendukung Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyosialisasikan tentang kebudayaan Partai Komunis Indonesia (PKI), ini malah memfitnah Panglima sebagai aparat korban politisasi. Ternyata bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), sekelas Panglima tertinggi tentara pun berani mereka buli jika tidak sesuai selera.

Seiring berjalannya waktu, rupanya mereka kehabisan akal. Mereka pun mau menuai simpati, agar dinilai turut peduli mewaspadai kebangkitan PKI. Sayang, apa yang dilakukannya tidak dari hati. Tetap saja, akhirnya HTI/FPI lagi yang coba mereka cemari. Dengan maksud agar masyarakat benci kepada HTI/FPI, mereka

memfitnahnya, bahwa HTI/FPI pun sama saja dengan PKI yang berpotensi menghancurkan negeri.

Digorenglah sejarah Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII), gerakan Islam masa lalu yang memberontak pemerintah. Kaum sekuler liberal mengopini umat, bukan hanya PKI yang dahulu bikin rusuh negara, tetapi juga DI/TII. Bedanya, PKI hendak menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, DI/TII hendak menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum Islam.

Dikaitkanlah dengan HTI dan FPI. Gerakan kaum Muslimin ini digambarkan sebagai embrio kebangkitan DI/TII yang harus diwaspadai, bahkan melebihi PKI, karena sama-sama hendak menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum-hukum Ilahi. *'Ajib!* *Emang* otaknya orang liberal begitu, beda *ama* peci yang dipakainya. Penampilannya nyantri tapi pola pikirnya tidak islami. Sarung *ama* peci hanya sekadar aksesoris.



■ Pendiri NU Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari

NU Juga

Apabila HTI dan FPI dituduh sebagai embrio kebangkitan DI/TII disebabkan mereka berupaya menegakkan hukum Islam di negeri ini, seharusnya Nahdlatul Ulama (NU) pun dituduh, karena mereka juga sama, hendak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Dalam Instruksi PB Syuriah NU, 27 Jumadil Ulaa 1398 H, disebutkan: "Setiap Anggota DPR dari NU harus senantiasa berjuang di parlemen agar diterapkannya hukum Islam di Indonesia. Hukum positif negara harus disesuaikan dengan hukum syariat. Jika bertentangan dengan syariat, maka hukum positif harus dirubah."

Itu perintah resmi dari PBNU terdahulu. Tidak percaya? Silahkan lihat di *Ahkamul Fuqaha* (kitab kumpulan fatwa-fatwa muktamar NU), hal. 325 dan 910, terbitan tahun 2010.

Ternyata bukan hanya HTI dan FPI yang berjuang menegakkan hukum Islam di negeri ini, NU pun sama. Jika merujuk pada pola pikir kaum sekuler liberal, maka NU pun termasuk embrio dari DI/TII yang harus diwaspadai!

Percuma saja berpenampilan santri kalau menolak diatur dengan aturan Allah Yang Maha Suci. Mirip PKI.

Jangan lupa, NU pun tidak pernah sepakat secara mutlak atas asas Pancasila. Sebab, seandainya mereka benar-benar sudah sepakat, niscaya ulama-ulama NU tidak akan bersusah payah memperjuangkan Piagam Jakarta di parlemen. Tetapi faktanya mereka tetap memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta, yang mengharuskan hukum Islam ditegakkan, meskipun Pancasila sudah ditetapkan oleh pihak Istana.

NU sendiri baru menerima Pancasila pada 1983, ketika Gus Dur menjadi pimpinannya. Berarti puluhan tahun ke belakang sebelum itu NU masih anti Pancasila. Mereka masih menghendaki

Piagam Jakarta. Ini pula yang pernah disampaikan Gus Sholah pada 2013 di pesantrennya. Silahkan baca sejarahnya!

Kesepakatan Pendiri Bangsa?

Jika memang para ulama sudah bersepakat dengan Pancasila, lalu mengapa mereka berinisiatif untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta, dengan membentuk Partai Masyumi (yang di antaranya dibidani oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari) guna memperjuangkan tegaknya hukum Islam di negeri ini? Beliau pernah menggelorakan resolusi jihad, tetapi beliau akhirnya dikhianati.

Sekali lagi, pertanyaan intinya adalah: Jika Mbah Hasyim memang sepakat dengan Pancasila, lalu mengapa pasca kemerdekaan beliau membentuk Partai Masyumi yang jelas-jelas memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta?

Maka, buka mata buka telinga! Stop mempolitisasi Pancasila untuk menolak syariah dan khilafah. Apalagi para pendiri bangsa sendiri pun belum pernah menyatakan kata sepakat atas keabsahannya.

Apabila dikatakan bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, maka jangan halang-halangi mereka yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Jika masih saja tetap menghalangi dengan mengatasnamakan Pancasila, maka wajar apabila kalangan agamis di Tim Sembilan dahulu begitu semangat untuk menggantinya.

Beberapa orang menganggap saya telah memelintir sejarah, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menjawab kenapa Mbah Hasyim membentuk Masyumi (yang memperjuangkan syariat Islam) padahal Pancasila saat itu sudah ditetapkan.[]

Ustaz Irkham Fahmi al-Anjatani,
Pengasuh Ma'had Nurul Falah Cirebon

Ini Alasan NU Pilih Islam sebagai Dasar Negara

Meski NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri, tetapi dalam Sidang Konstituante partainya kaum sarungan tersebut tetap satu blok dengan Masyumi yakni Blok Islam. Sedangkan lawannya, yakni Blok Pancasila, didukung oleh partai sekuler (ngaku beragama Islam tetapi tidak mau pakai aturan Islam), partai Kristen, partai Katolik bahkan PKI!

Dalam sidang Konstituante tanggal 14 November 1957 tersebut tokoh NU KH Achmad Zaini menyoroti tentang sumber dan pedoman dari ajaran Pancasila. "Kalau Pancasila itu adalah sebagai suatu ajaran, dari manakah sumbernya dan bagaimana pula saluran serta pedoman-pedomannya?" tanya KH Zaini kepada seluruh hadirin.

Dia membandingkan jika dasar negara adalah Islam. Menurutnya, seluruh sila dalam Pancasila telah terkandung dalam ajaran Islam. Islam telah memiliki aturan-aturan terperinci tentang cara hidup bermasyarakat dan cara hidup bernegara.

"Sehingga masing-masing dari kelima sila itu benar akan merupakan suatu pokok rumusan yang mempunyai perincian-perincian dengan dasar yang kokoh serta kuat yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Al-Qias, dan Al-Ijmak," paparnya.

Berdasarkan pertimbangan filosofis dan teologis tersebut, KH Achmad Zaini tidak ragu lagi bahwa dasar negara yang tepat untuk Indonesia adalah dasar negara Islam.

"Saudara Ketua yang terhormat, jelaslah kiranya saudara Ketua bilamana Nahdlatul Ulama (NU) beserta partai Islam lainnya menuntut hanya dasar Islamlah yang harus dijadikan Dasar Negara kita," pungkasnya.

Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955. Mereka terbelah menjadi dua blok besar yakni Islam (230 kursi, 44,8 persen) dan Pancasila (274 kursi, 53,3 persen) serta satu blok kecil yakni Sosio-Ekonomi (10 kursi, 2 persen).

Dengan rincian, Blok Islam: Masyumi (112 kursi), NU (91), Partai Syarikat Islam Indonesia [PSII] (16), Persatuan Tarbiyah Islamiyah [Pertii] (7) dan lainnya (4); Blok Pancasila: Partai Nasional Indonesia [PNI] (119), Partai Komunis Indonesia [PKI] (60), Republik Proklamasi (20), Partai Kristen Indonesia [Parkindo] (16), Partai Katolik (10), Partai Sosialis Indonesia [PSI] (10), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia [IPKI] (8) dan lainnya (31); serta Blok Sosio-Ekonomi: Partai Buruh (5), Partai Murba (1), Partai Acoma (1) dan lainnya (3).[] joy



Rusak, Tatkala Politik Bermodal Skandal

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Citra buruk perpolitikan di Indonesia kembali menjadi sorotan. Hal tersebut sebagai imbas dari berbagai skandal besar yang kini terkuak. Mulai dari skandal PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hingga kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah seorang Komisioner KPU.

Semua skandal tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas politik di negeri ini. *Pertama*, PT Jiwasraya dan PT Asabri merupakan perusahaan milik negara (BUMN) dalam bentuk Perseroan Terbatas. Sehingga skandal korupsi di dua perusahaan negara tersebut hampir dipastikan melibatkan pejabat negara yang berafiliasi dengan elite politik tertentu.

Kasus ini merupakan skandal besar yang menggasak uang negara hingga puluhan triliun

rupiah. Kejaksaan Agung telah menemukan indikasi korupsi di Jiwasraya yang diprediksi merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun. Sementara pada kasus korupsi di Asabri, negara diprediksi dirugikan paling sedikit Rp 10 triliun. Parahnya sebagian besar uang korupsi tersebut disyalir ada kaitannya dengan pembiayaan politik untuk kepentingan kelompok tertentu.

Kedua, kasus OTT KPK terhadap Komisioner KPU telah meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini bisa berdampak pada merosotnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan legislatif maupun eksekutif yang diselenggarakan oleh KPU.

Komisioner KPU tersebut diindikasikan menerima suap berkaitan dengan pengurusan Pergantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR dari salah satu partai politik. Tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan politik di KPU tersebut tidak seorang diri,

namun sudah berbentuk semacam mafia atau jaringan. Terbukti negeri ini telah dirusak oleh para politisi hitam semacam itu, sehingga skandal jahatnya harus dibongkar dari akar hingga ke pucuknya.

Ketiga, mereka yang diindikasikan terlibat skandal itu sebelumnya gemar menuding negatif kepada pihak lain. Khususnya kepada kelompok umat Islam melalui isu radikal-radikal. Kini mulai terungkap bahwa tuduhan itu sekadar kamuflase untuk menutupi kejahatan dirinya. Mereka misalnya kerap menuding kelompok Islam pejuang syariah sebagai ancaman yang membahayakan negeri ini. Padahal merekalah justru yang membahayakan karena telah menggasak keuangan negeri ini melalui berbagai skandal korupsi.

Para koruptor dan kroni skandalnya itu sejatinya merupakan penjahat besar yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya korupsi disebut sebagai tindak

pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik dan endemik yang berdampak besar. Tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merampas hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

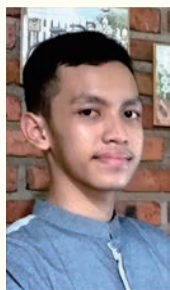
Keempat, umat Islam sudah seharusnya mewaspadai berbagai manipulasi dari para politisi dan partai yang terlibat berbagai skandal jahat itu. Agar umat tidak menjadi korban dari berbagai manuver politik mereka. Umat Islam sudah semestinya menjadi subjek, bukan lagi objek, dalam melakukan aktivitas politik di negeri ini.

Sejatinya politik bagi umat Islam itu merupakan bagian dari aktivitas dakwah. Sehingga modal utamanya adalah kebenaran (*al-haq*) yang bersumber dari ajaran Islam, bukan skandal dan manipulasi. Wujudnya bisa berupa perjuangan politik (*al-kifah as-siyasi*). Seperti mengkritik penguasa misalnya ketika kebija-

kannya bertentangan dengan syariah.

Prosesnya dilakukan secara argumentatif dan edukatif. Syariah didakwahkan dan ditawarkan sebagai solusi kaffah terhadap berbagai problem yang membelit negeri ini. Mulai dari problem akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan, hingga problem politik. Itulah salah satu wujud ril kepedulian umat Islam pada negeri ini.

Jadi politik umat Islam yang memperjuangkan penegakan syariah itu bersifat mulia dan terhormat. Tidak seperti para politisi hitam yang bermodal skandal jahat tersebut. Sebab ujung perjuangan politik bagi umat Islam bukanlah harta dan jabatan. Melainkan meraih ridha dan rahmat Allah SWT dengan menegakkan syariah-Nya secara kaffah. *Wallaahu 'alamb bash-shawaab.[]*



MEDIA GAUL

Apakah Prestasi Sebatas Ekspektasi?

Oleh: Muhamad Arsyad Azharulhaq

Allah SWT telah menciptakan manusia untuk beribadah. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzaariyat [51]: 56, bahwa sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Agar manusia tahu tujuan mereka beribadah, diberikanlah kepada mereka potensi akal. Dengan begitu, manusia bisa memikirkan alam semesta dan menemukan siapakah Sang Pencipta itu.

Lantas, bagaimana dengan para pemuda yang masih duduk di bangku sekolah? Bukankah kita masih dalam proses pembelajaran?

Sudah seharusnya kita meniatkan masa pembelajaran kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebelum itu, kita perlu mengetahui alasan berikut tata caranya. Misalnya kita berdakwah karena kita tahu bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* itu termasuk kewajiban setiap muslim. Sebelum terjun ke medan dakwah, kita perlu memahami dakwah inilah masa pembelajaran kita. Kita menempuh jalan pendidikan untuk beribadah. Alhasil, ilmu yang kita pelajari di dunia mendapat keberkahan di akhirat karena diperjuangkan untuk Allah SWT.

Sayangnya, banyak dari para pelajar yang justru terjerumus pada pemahaman materialistik. Mereka beranggapan bahwa sekolah hanya sekadar untuk menyiapkan diri di dunia kerja dan mendapat penghasilan yang cukup. Anggaphlah seperti tupai yang akan berhibernasi,

mempersiapkan banyak makanan untuk masa tidur panjangnya. Tidak salah memang karena pasti kita ingin mendapat pekerjaan. Namun, jika kita belajar hanya untuk dunia kerja, maka yang kita dapatkan hanyalah ilmu dunia itu saja tanpa keberkahan di akhirat.

Bandingkan dengan masa kejayaan Islam ratusan tahun silam. Mereka adalah generasi yang mumpuni.



Banyak penemuan yang mereka temukan. Abbas bin Firnas, manusia pertama yang menciptakan konsep untuk menerbangkan manusia jauh sebelum Wright bersaudara. Al-Jazari yang menciptakan alat penunjuk waktu berupa jam gajah dan piston pada kendaraan bermotor. Al-Zahrawi yang berpartisipasi dalam dunia pembedahan yang menjadi cikal bakal alat-alat bedah modern saat ini. Apa motivasi mereka?

Mereka melakukan itu hanya mengharap ridha Allah SWT. Kendaraan bermotor tentu dapat mengantarkan manusia menuju tempat ibadah bahkan dengan adanya pesawat, perjalanan ke tanah suci menjadi lebih cepat dibandingkan dengan berjalan kaki. Alat penunjuk waktu yang membuat kita terjaga agar tidak terlambat pergi menuntut ilmu, serta alat pembedahan yang digunakan untuk membantu kita melanjutkan ibadah setelah penyakit telah disembuhkan. Betapa besar jasa mereka telah memudahkan kita dalam beribadah kepada-Nya.

Manusia itu harus berusaha. Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mau mengubah diri mereka (QS. Ar-Ra'du [13]: 11). Boleh saja kita berangan-angan besar, menjadi pengusaha sukses misalnya. Namun, hanya sekadar angan-angan belaka bila tak ada perjuangan di dalamnya. Apalagi bila hanya diniatkan sebatas dunia saja.

Salah satu ciri orang sukses yang efektif, dalam buku Stephen R Covey berjudul *Seven Habits of Highly Effective People*, bahwa dia memulai dengan *the end of mind* atau visi jangka panjang. Dengan begitu, dia tahu apa tujuan, hasil, serta cara yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi jangka panjangnya. Jadi, semakin panjang jangka dari visinya, maka kesuksesannya insyaallah lebih besar. Jika yang memiliki visi sebatas dunia saja bisa menggapai keuntungan berlimpah ruah, bagaimana dengan kita yang memperjuangkan diri untuk kehidupan yang hakiki di akhirat kelak? []



Istri pendamping suami, bukan pekerja. Jika ia memilih bekerja, boleh asal tugas utama tidak terabaikan.

Perempuan harus bekerja, adalah sebuah kalimat yang mampu menjadi arus utama perjuangan perempuan dewasa ini. Keinginan itu diakomodasi dengan terbuka oleh penguasa yang sudah bersimbiosis dengan korporat. Inilah era ketika perempuan tercengkeram dalam korporatokrasi global.

Berbagai negara terus menggenjot tingkat partisipasi kaum perempuan di dunia kerja. Korporat-korporat raksasa lebih suka memilih kaum perempuan sebagai tenaga kerjanya. Mereka merelokasi pabrik-pabrik ke dunia ketiga dan merekrut sebanyak-banyaknya pekerja perempuan.

Data Bank Dunia pada 2018 menyebut, 50,7 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja. Baik bekerja atau mencari pekerjaan. Menurut standar internasional angka ini termasuk rendah.

Padahal, angka ini sebenarnya naik terus setiap tahun. Sebab, persentase jumlah pekerja perempuan mencapai 50 persen lebih dibandingkan pekerja laki-laki. Bahkan di sektor tertentu seperti jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja perempuan hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. (katadata.co.id).

Secara global, negara-negara di dunia, partisipasi perempuan pekerja jauh lebih tinggi. Kamboja memiliki angka partisipasi pekerja perempuan mencapai 81,2 persen pada 2018. Vietnam di angka 73,2 persen dan Thailand di posisi 60,3 persen. Mengapa perempuan digenjut di sektor kerja?

Azas Manfaat

Korporat-korporat raksasa ini lebih senang memanfaatkan tenaga kerja perempuan karena azas manfaat yang sangat banyak. Dari sisi gaji, perempuan relatif tidak protes dengan imbalan apa adanya. Korporat tahu, perempuan bekerja untuk mendapatkan "uang belanja tambahan" dan bukan "nafkah utama."

Akibatnya, mereka digaji tidak seperti kaum laki-laki yang notabene memang harus membiayai keluarga sebagai tanggungannya. Sementara gaji perempuan, untuk memanjakan diri dan mengongkosi hidup perempuan itu

sendiri. Bukan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Itulah mengapa, meski diperjuangkan sejak dulu, di banyak negara, gaji perempuan tetap tidak setara dengan pekerja pria. Laki-laki digaji lebih tinggi dibanding perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Korporat menjadi lebih hemat jika mayoritas pekerjanya perempuan.

Alasan lainnya, untuk jenis pekerjaan tertentu, keahlian dan keterampilan perempuan, juga lebih baik dibanding laki-laki. Jari-jemari mereka lebih luwes, teliti dan sabar dalam menekuni proses produksi.

Apalagi untuk pekerjaan sektor jasa, banyak sekali manfaat dengan memasang kaum perempuan. Jasa adalah layanan yang membutuhkan kepuasan. Ukuran puas ini bisa berasal dari sekadar senyuman, keramahan dan perhatian. Nah, di sinilah keunggulan perempuan.

Di area *front line*, merekalah yang kerap dipasang untuk menjadi pemuas. Perempuan memiliki *selling point* dari sisi penampilan, senyum dan sapaan. Siapa yang tidak meleleh ketika masuk sebuah bank yang dingin dan harum, mendapati seorang *teller* yang cantik menawan.

Belum lagi perempuan yang dipasang sebagai *sales promotion girl* di gerai-gerai busana, kosmetik hingga menjajakan produk pria seperti rokok. Begitulah paradigma kapitalisme global, yang menjadikan perempuan sebagai ujung tombak pelayanan.

Hal itu diakui oleh pendiri perusahaan besar, Alibaba grup dari Cina, Jack Ma. Ia memuji kontribusi pekerja perempuan sebagai salah satu kunci sukses bisnisnya. "Berilah perhatian khusus untuk karyawan perempuan. Perempuan lebih peduli terhadap orang lain melebihi laki-laki, sedangkan laki-laki hanya peduli dengan diri mereka sendiri," tutur Ma seperti dilansir *Tempo*.

Ma mengimbau perusahaan-perusahaan untuk merekrut lebih banyak perempuan. "Sebisanya mungkin rekrutlah perempuan sebanyak-banyaknya. Inilah yang telah kami lakukan dan ini adalah kunci sukses kami," ungkap salah satu orang terkaya di dunia tersebut.

Apresiasi Semu

Peran domestik perempuan, telah

ditarik ke ranah publik sejak isu kesetaraan gender diusung kaum Feminis. Inilah biang kerok hingga perempuan tidak berada di habitat asalnya, yaitu sektor domestik. Ketika kaum perempuan keluar dari habitatnya, bahaya pun mengancam.

Di sektor ekonomi, perempuan tereksplorasi tenaga dan pikirannya untuk menggerakkan mesin produksi. Keringat mereka diperas untuk menghasilkan uang berlimpah yang memperkaya para korporat. Hanya sedikit dari porsi laba itu yang mengalir ke dompet mereka sebagai gaji.

Lantas, sedikit imbalan itu untuk apa? Tak lain, uang itupun larinya kepada korporat-korporat juga. Ya, setelah diperas keringatnya, mereka lantas dijadikan konsumen utama produk buatan korporat itu sendiri. Iming-iming *life style*, mereka menjadi target 6F: *fast food, fast drink, fast fashion, fast cosmetic, fast travelling* dan *fast technology*.

Meluaslah konsumerisme. Dengan alasan memanjakan diri, mengapresiasi atas kerja keras diri, *shopping* menjadi rutinitas. Perempuan membelanjakan gajinya untuk membeli produk-produk yang sebenarnya hasil karya mereka. Uang pun mengalir dari kantong para perempuan ke kantong para korporat. Demikianlah lingkaran setan itu.

Hidup para perempuan hanya mengabdikan pada kesenangan jasadiyah. Menjadi budak 6F. Pagi buta bekerja, siang menikmati kuliner kesukaan, malam perawatan muka. Awal bulan *shopping*, akhir pekan *travelling*. Begitu saja daur hidupnya.

Dampak Global

Apa yang menjadi keunggulan pekerja perempuan, sejatinya juga dimiliki pekerja laki-laki. Artinya, laki-laki juga bisa produktif, kreatif, telaten, ramah dan segala hal yang dibutuhkan dalam bekerja. Andai saja mereka diberi kesempatan. Sayangnya, dunia menuju keterbalikan. Kaum perempuan di publik, laki-laki di domestik.

Bagaimana tidak. Saat ini, angkatan kerja laki-laki banyak yang tidak terserap di dunia kerja, karena sudah keburu diduduki para perempuan. Terpaksa kaum laki-laki tersudut di ruang domestik tanpa bisa berbuat banyak. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan untuk menikah,

menghidupi keluarga dan menjamin masa depan anak-anaknya.

Banyak kaum pria yang akhirnya menjadi lembek, tidak memiliki kegigihan dalam berusaha dan menyerah pada keadaan. Apalagi jika di sebelahnya ada perempuan *strong* yang tidak menuntut nafkah darinya, karena telah mampu menanggung biaya hidup karena bekerja sendiri.

Pada saat yang sama, perempuan yang sudah terlanjur eksis di publik tadi, membuat adrenalin kaum laki-laki di luar sana tergoda. Jadilah mereka sebagai objek eksploitasi. Bukan hal asing terjadinya perselingkuhan atau skandal yang akhirnya meretakan hubungan keluarga-keluarga yang telah dibina susah payah. Demikian bila kita bicara efek global perempuan dalam cengkeraman sistem korporatokrasi dunia.

Kemuliaan Kodrati

Kemuliaan seorang perempuan tidak diukur dari apakah dia bekerja atau tidak. Apakah dia punya gaji sendiri atau tidak. Apakah dia eksis di ruang publik atau tidak. Apakah ia ibu rumah tangga penuh waktu atau bekerja paruh waktu. Sebab, Islam membolehkan perempuan bekerja. Tetapi, sistem Islam tidak membiarkan korporat menguasai potensi mereka.

Perempuan dalam sistem Islam dikembalikan ke habitat aslinya di ranah domestik. Sebagai hamba Allah SWT, yang bertugas mengatur rumah tangga dan mendidik generasi penerus. Istri pendamping suami, bukan pekerja. Jika ia memilih bekerja, boleh asal tugas utama tidak terabaikan. Tetapi itu bukanlah pilihan bijak, ketika tanggung jawab rumah terabaikan.

Itu sebabnya sistem Islam akan mengatur, sektor publik mana yang bisa mengakomodir peran perempuan. Memberi kesempatan berkontribusi untuk kemajuan kaumnya. Seperti sektor pendidikan, parenting, kesehatan dan hal-hal yang butuh sentuhan pemikiran perempuan. Tak ada korporat-korporat raksasa yang akan mengeksploitasi mereka. Sebab mereka dijaga dengan penerapan sistem sosial yang tegas oleh negara. □ **kholda**

Wahai Suami, Kasih Sayang dan Kasih Uang!

Fenomena perceraian semakin menjamur. Dari banyaknya curhatan dan fakta sekitar, setidaknya ada dua hal yang membuat para istri tidak kuat membersamai suami. Kasih sayang dan kasih uang (nafkah).

"Istri matre dong?" Siapa bilang? Seorang istri menagih nafkah pada suami itu fitrah. Bukankah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, pada saat itu ia sedang berikrar pada Allah SWT untuk menggantikan kewajiban sang ayah. Salah satu yang utama adalah urusan nafkah.

"Bertakwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian". (HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi)

Islam memandang penting urusan ini, sampai-sampai Rasulullah yang mulia pernah mencium tangan seorang lelaki biasa, hanya karena ia pekerja keras dalam menafkahi keluarganya.

Satu hal yang perlu diketahui para suami, yang dipermasalahkan kaum istri bukan jumlahnya, tapi seberapa besar kerja keras suaminya. Andai pun di sore hari seorang suami pulang dengan tangan kosong, setelah seharian bekerja apa saja yang halal, lalu berkata lembut kepada istrinya, "Maaf, hari ini Abang tidak dapat rezeki."

Tak akan ada istri yang tega menagih macam-



macam. Jadi sekali lagi, yang membuat para istri tak kuat bertahan bukan jumlah nafkahnya. Tapi lemahnya usaha suami padahal secara fisik dan mental mampu melakukannya.

Apalagi jika para suami bersantai 'menikmati' harta hasil banting tulang istri. Duh, perempuan mana yang tahan? Jikapun banyak istri yang diam, sebenarnya mereka hanya tak ingin anak-anak jadi korban. Tapi suatu hari, jika hatinya tak kuat lagi, jangan kaget jika tiba-tiba mereka minta pisah. Sebelum itu terjadi, pekalah wahai suami. Tunjukkanlah kerja keras Anda!

Hal kedua yang bisa bikin para istri tak kuat bersama adalah kurangnya kasih sayang. Jangan karena merasa sudah bisa memberi uang berlebih (apalagi kurang), suami boleh sesuka hati memperlakukan istri.

Istri adalah sahabat. Bukan rakyat jelata, bukan pula bawahan. Suami adalah pakaian bagi istri yang harusnya mampu memperindah, menghangatkan dan melindunginya dari segala yang buruk. Bukan malah mengganggu pikiran dan hatinya dengan sikap kasar.

Bersabarlah atas cerewetnya. Kadang ia penat, dan tak tahu lagi harus bagaimana. Ajak mereka bicara, besarkan hatinya. Jika mereka salah, nasihatilah dengan kelembutan. Para istri itu tidak anti nasihat. Justru kadang mereka mendambakannya. Di situlah nilai lebih kepemimpinan seorang suami di mata istri.

Bukanlah hal berlebihan, jika setelah lelah mengalah dengan keluar-biasaan anak-anak, para istri ingin sedikit saja perhatian dari ayahnya anak-anak. Bukankah wajar, jika setelah

belasan jam bahkan lebih, para istri merayu anak-anak agar mau makan, mau belajar, mau jadi anak baik lalu ia hanya minta sedikit saja rayuan suaminya.

"Tapi kami para suami sudah capek kerja!" Ya, betul. Maka bisakah para suami membayangkan betapa capeknya seorang istri yang juga harus bekerja, lalu ia masih harus mengurus anak-anak dan rumah?

Padahal, jika mau bertukar peran sekalipun, pasti banyak istri yang sanggup menggantikan pekerjaan suaminya. Tapi tak banyak suami yang sanggup menggantikan tugas istrinya.

Karenanya, wahai suami, peliharalah rumah tangga Anda dengan berusaha maksimal memberikan dua hal penting ini. Kasih sayang dan kasih uang (nafkah) istri Anda. Semaksimal yang Anda bisa.

Bagi para istri yang dikaruniai suami penyayang dan pekerja keras, bersyukurlah kepada Allah meski kehidupan masih pas-pasan atau kurang. Balas kasihnya dengan memelihara kehormatan dan berkhidmat padanya. Insya Allah sehidup sesurga bersama.[] **umi diwanti**



Pentingnya Satu Cara Pandang

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan pendidikan anak. Saya seorang ibu yang terus berupaya untuk bisa mendidik anak sesuai ajaran Islam. Saya pun terus belajar dan belajar. Yang menjadi kendala justru suami saya sendiri. Sepertinya, belum terbersit bayangan pada beliau mau diapakan anak-anaknya. Padahal sebagai kepala keluarga suami punya kewajiban membuat rencana-rencana pendidikan anak-anak. Saya cuma ingin mendidik anak-anak dengan benar. Tapi suami tidak pernah punya *mindset* yang sama. Saya harus bagaimana?

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

IF

Wa'alaikumussalam Wr Wb.

Ibu IF yang baik,

Semua orang tua tentu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah. Anak seperti itu tentu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu pengasuhan dan pendidikan yang terarah dari kedua orang tuanya.

Orang tua (ayah dan ibu) adalah pelaku

utama pendidikan anak dalam keluarga. Maka, keduanya harus kompak dalam mendampingi, mengarahkan dan mendidik anak-anak. Kekompakan, kesamaan cara pandang ini sangatlah penting agar terhidar dari pendidikan anak yang tak tentu arah. Anak pun akan menjadi bingung, jika ada dua perlakuan yang berbeda antara ayah dan ibu.

Ibu IF yang baik,

Peran ayah sangat penting dalam pendidikan anak. Dalam Al-Qur'an diceritakan seorang ayah bernama Luqman, yang memberikan nasihat untuk anaknya. Allah sampaikan nasihat-nasihat itu dalam Surat Luqman ayat 13-19. Pendidikan dalam keluarga harus memiliki visi, rencana tidak semata-mata praktek. Ayah dan ibu sersama-sama membangun visi itu. Ibu lebih banyak bertugas sebagai pelaksana, karena ibu adalah sosok yang lebih banyak berinteraksi dengan anak, terlibat langsung dalam keseharian anak. Sehebat apa pun seorang ibu dalam mendidik anak, ia akan kesulitan untuk membuat perencanaan pendidikan keluarga jika ayah tak terlibat.

Bukan karena tidak punya kemampuan, namun karena situasinya kerap tidak me-

mungkinkan. Waktunya lebih banyak tersita untuk persoalan-persoalan teknis. Oleh karena itu, ketika ayah tak hadir, tidak ikut terlibat utamanya dalam masalah perencanaan arah pendidikan dalam keluarga, maka pendidikan anak hanya menjadi rutinitas saja. Memberikan misi, visi, dan strategi inilah tugas utama ayah. Ayahlah yang berkewajiban memutuskan orientasi mau dibawa kemana, mau jadi apa, dan apa target mendidik anak.

Ibu IF yang baik,

Dialog sangat penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan psikis yang muncul karena perbedaan cara pandang, termasuk perbedaan dalam melakukan proses pendidikan anak. Munculnya masalah terkadang bukan karena tidak ada kecocokan antara ayah dan ibu, tapi karena sangat kurangnya kesempatan untuk berbincang-bincang.

Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara Anda dan suami. Anda harus sadar bahwa suami adalah orang lain yang memiliki pribadi yang unik dan berbeda dengan Anda. Anda tidak akan pernah bisa membangun sebuah kesamaan tanpa menyadari atau mengenali perbedaan yang ada.

Kesadaran terhadap perbedaan akan mempermudah dalam membangun kesamaan cara pandang dengan lebih bijaksana. Maka, kenali karakter suami, agar bisa melakukan cara pendekatan yang tepat untuk memberi masukan dan mengingatkan. Anda yang lebih mengenali karakter suami Anda.

Ibu IF yang baik,

Ada hal yang perlu diperhatikan dan diingat saat Anda memberi nasihat, saran, juga koreksi terhadap suami. Bagaimanapun, posisi suami dalam keluarga adalah sebagai pemimpin. Maka, jangan mengurangi kewibawaan dan kehormatan suami di saat Anda memberi masukan.

Satukan komitmen dalam berumah tangga, yaitu untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam naungan Islam. Sesekali ajaklah suami mengikuti kegiatan-kegiatan parenting misalnya, atau berkunjung pada keluarga-keluarga yang menurut Anda bisa dijadikan contoh. Barangkali dengan berbincang bersama mereka, suami akan lebih mudah untuk mengambil pelajaran akan pentingnya peran ayah dalam pendidikan, kesamaan visi dan misi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak.[]

Bolehkah Kompensasi dalam Akad Ijarah Berupa Jasa?

Diasuh Oleh: **Ustaz M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustaz, bolehkah orang bermuamalah jasa ditukar dengan jasa? Dalilnya apa? (Abu Hanif, Tangerang)

Jawab:

Terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya menjadikan manfaat (jasa) sebagai kompensasi (*'iwadh*) dalam akad ijarah (akad sewa/jasa). Misalnya, A (dokter) menyewakan rumahnya di Jakarta kepada B (arsitek) selama 1 tahun. Namun B tidak membayar ongkos sewa rumah itu dengan uang, melainkan dengan cara menyerahkan rumahnya di Bandung untuk digunakan A selama 2 tahun sebagai kompensasinya. Atau B membayarnya dengan cara memberikan jasa konsultasi arsitektur darinya kepada A sebagai kompensasinya.

Jumhur ulama, yaitu ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan akad ijarah seperti itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi tidak membolehkannya jika objek akadnya sama jenis seperti contoh tersebut. Adapun jika objek akadnya berbeda jenis, hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut ulama mazhab Hanafi, tidak boleh hukumnya A menyewakan rumahnya kepada B, dan sebaliknya B menyerahkan rumahnya untuk digunakan A. Namun boleh hukumnya, jika A menyewakan rumahnya kepada B, dan B menyerahkan mobilnya untuk digunakan A. (*Al Mausuu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz I, hlm. 263; Ahmad Hasan,

Nazhariyyat Al Ujuur fi Al Fiqh Al Islami, hlm. 237; M. Sulaiman An Nuur, *Ikhtilaf Al Fuqahaa' fii Maaliyyat Al Manaafi' wa Aatsaruhu*, 2015).

Akar perbedaan pendapat itu dalam fikih disebut dengan istilah "*maaliyatul manfaat*" yaitu apakah terdapat sifat harta (*maal*) pada manfaat. Jumhur ulama, yaitu ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengakui adanya "*maaliyatul manfaat*", yaitu manfaat dihukumi sebagai harta. Sedang ulama mazhab Hanafi tidak mengakui "*maaliyatul manfaat*", yaitu manfaat tidak dihukumi sebagai harta. (*Al Mausuu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz 36, hlm. 32; Ahmad Hasan, *Nazhariyyat Al Ujuur fi Al Fiqh Al Islami*, hlm. 235-237).

Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat jumhur yang mengakui adanya "*maaliyatul manfaat*", sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Rajab Al Hanbali, Imam Syaukani, dan Imam Taqiyuddin An Nabhani, *rahimahumullah*. (Ibnu Rajab Al Hanbali, *Al Qawa'id*, hlm. 213; Imam Syaukani, *Al Sailul Al Jarraar*, hlm. 574; Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 89).

Imam Ibnu Rajab Al Hanbali menjelaskan dalilnya, yaitu bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar berupa "manfaat", yaitu mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya, setelah sebelumnya laki-laki itu tidak berhasil mendapat harta untuk mahar walau cincin dari besi. (HR Bukhari, no. 2186;

Muslim, no. 1425). Imam Ibnu Rajab Al Hanbali kemudian mengatakan, "Kalau manfaat itu tidak bernilai harta, pasti tidak sah untuk tujuan ini [menjadi mahar]." (*law lam takun al manfa'atu maalaan la-maa shahhat li haadza al gharadh*). (Ibnu Rajab Al Hanbali, *Al Qawa'id*, hlm. 213; Ziyad Ghazzal, *Masyruu' Qanuun Al Buyuu'*, hlm. 133; Imam Syaukani, *Al Sailul Al Jarraar*, hlm. 367 & 574).

Imam Taqiyuddin An Nabhani berkata, "Kompensasi (*'iwadh*) dalam ijarah itu boleh berupa uang (*naqd*), boleh berupa bukan uang, boleh berupa harta (*maal*), dan boleh pula berupa jasa (*manfa'ah*). Kaidah fikih dalam masalah ini menyatakan: "Kullu maa jaaza an yakuuna tsamanan jaaza an yakuuna 'iwadhan." (Segala sesuatu yang boleh menjadi harga boleh pula menjadi kompensasi)." (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 89).

Imam Taqiyuddin An Nabhani berkata pula, "Kompensasi ini tidak harus berupa harta, tetapi boleh juga kompensasi itu berupa manfaat (jasa)." (*Wa haadza al 'iwadh laa dharuurata an yakuuna maalan bal qad yakuunu manfaatan*). (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah*, Juz II, hlm. 316).

Berdasarkan penjelasan di atas, kompensasi dalam akad ijarah itu bukan hanya boleh berupa uang atau barang, tetapi boleh pula berupa jasa (*manfa'at*), baik manfaat yang muncul dari kerja manusia (*ijaaratul ajiir*) atau dari barang (*ijaaratul a'yaan*). Wallahu a'lam.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat
mediaumat.news | Memberjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :

Alamat Pengiriman 1 :

Alamat Pengiriman 2 :

Telpon/ No. Hp-WA :

Jumlah Langganan : eksemplar

Dikirim Mulai edisi :

Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Hak-hak Muslim Uighur Terus Menerus Dirampas

Oleh: **Lukman Noerochim**, Staf Ahli Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia (Forkei)



Di saat sebagian dari kita bisa makan enak dan tidur nyenyak, saudara-saudari kita Muslim Uighur masih dirampas hak-haknya. Kejahatan multidimensi terus menerus dilakukan rezim kriminal Cina terhadap Muslim Uighur di Turkistan Timur, termasuk menerapkan kebijakan kamp indoktrinasi yang brutal dan melakukan kejahatan keji memerangi Islam dan umatnya di Xinjiang.

Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur sekarang, bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang Cina keturunan Han yang banyak melakukan berba-

gai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli. Penduduk asli diperlakukan seperti suku Indian di Amerika.

Melalui gambar-gambar yang pernah ditampilkan di berbagai media, benar-benar memperlihatkan bahwa warga Han membawa tongkat dan senjata. Mereka mengusir kaum Muslim Uighur. Begitu juga tampak sekali kegembiraan mereka dan mereka bersorak-sorai ketika militer Cina melakukan pengepungan, penangkapan, dan penyiksaan terhadap warga Uighur.

Sesungguhnya, kejadian serupa kita melihatnya di Palestina. Pasukan pendudukan dan penyiksaan warga Yahudi terhadap warga Palestina, membunuh, memblokir, merusak lingkungan, dan merampas tanah mereka.

Jadi, apa yang dilakukan Cina di Turkistan Timur adalah sama persis dengan apa yang dilakukan Israel di Palestina: menduduki, membangun pemukiman, membunuh, menghancurkan, mengusir, dan memblokir kaum Muslim dan merampas tanah airnya.

Untuk semua kekuatan ekonominya, penggertakan dan pencaplokan tanah dan perebutan laut, kefanatikan nasionalisnya yang melengking di dalam negeri, pemerintah totaliter Cina masih harus menghancurkan orang-orang yang ditaklukkan dari Turkistan Timur.

Cina menyiksa orang-orang tak berdosa, baik wanita, anak-anak dan orang tua, tidak ada yang selamat. Satu-

satunya kejahatan mereka adalah karena mereka menyembah Tuhan Yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika gaya hidup komunis mereka 'dengan karakteristik Cina' begitu superior, mengapa mereka mencekik kaum Muslim di Turkistan Timur?

Pertanyaan yang menghantui diri sendiri sekarang adalah: Bagaimana kaum Muslim menghadapi berbagai kejahatan, penyiksaan, dan permusuhan yang dilakukan oleh kafir komunis Cina ini terhadap kaum Muslim?

Maka umat perlu melakukan aktivitas bersama, yaitu kaum Muslim melakukan tekanan terhadap pemerintah negeri-negeri Islam untuk mengambil tindakan aktif terhadap Cina, seperti menghentikan impor dari Cina, serta memutuskan hubungan perdagangan, ekonomi, dan politik dengan Cina.

Namun, reaksi dari pemerintah dunia Islam yang mandul dan lemah terhadap kejahatan dan kekejaman Cina adalah benar-benar menjadi bukti baru pengkhianatan pemerintah dan pengabaian terhadap hak-hak umat Islam. Sehingga ini menjadi pembenaran di samping pembenaran-pembenaran yang sudah ada bagi umat Islam hari ini untuk segera menggantikan pemerintah sekuler yang ada.

Jika kita cermati umat Islam hari ini sedang bergerak menuju pada perubahan besar.[]

Khilafah Merusak atau Merawat?

Oleh: **Intan Ayu Agustin**, Aktivis Muslimah Kota Cilegon

Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu memfitnah bahwa ajaran khilafah itu bersifat merusak. "Sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak," ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1) seperti diberitakan *kumparan.com*.

Pernyataan Mahfud MD ini tidak memiliki landasan yang jelas. Ia menilai khilafah ataupun ide dan agendanya merusak tatanan negara Indonesia, tetapi nyatanya negeri ini bukan rusak karena ide khilafah. Banyaknya problematika di negeri ini bukan karena khilafah.

Korupsi yang sistemik serta utang negara yang menggunung pun jelas bukan gara-gara khilafah. Belum lagi segudang permasalahan lainnya di negeri ini. Pernyataan Menko Polhukam ini kembali menegaskan bahwa agenda untuk mengerdikan ajaran Islam itu tetap ada dan harus terus digaungkan.

Permusuhan penguasa terhadap Islam itu terbukti dengan terus digulirkannya penyesatan opini publik mengenai khilafah. Sebaliknya masalah mega korupsi, bencana alam, dan permasalahan lainnya yang butuh segera untuk diselesaikan, nyatanya penguasa tidak segera turun tangan. Kasus dugaan skandal Jiwasraya pun butuh proses yang 'panjang', dalihnya.

Lantas, apakah benar khilafah itu merusak? Khilafah merawat, bukan merusak.

Dari abad kedigdayaannya selama lebih dari 13 abad, khilafah nyatanya tidak merusak. Tetapi justru merawat keadilan antara Muslim dan non Muslim (*ahlu dzim-mah*) serta melindungi darah dan kehormatannya.

Bahkan sejarawan Barat sendiri mengakuinya. Salah

satunya adalah TW Arnold. Dalam bukunya *The Preaching of Islam* menuliskan bagaimana perlakuan yang diterima oleh non Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah.

Dia menyatakan, "Sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak dari jumlah orang Turki di berbagai provinsi Khilafah yang ada di bagian Eropa, toleransi keagamaan diberikan pada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atas seluruh umat Kristen."

Khilafah pun menyemai dan memberikan pelayanan serta merawat rakyatnya hingga terwujud kesejahteraan. Hal ini yang tidak akan pernah kita dapatkan di era demokrasi kapitalis. Kesejahteraan hanyalah sesuatu yang utopis dan mustahil terwujud bagi seluruh rakyat.

Di era pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab selama 10 tahun, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Muadz adalah staf Rasulullah SAW yang diutus untuk memungut zakat di Yaman.

Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Demikian berulang pada tahun berikutnya. Umar pun memberikan gaji yang besar kepada pegawai negara.

Hal yang sama terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Sampai-sampai tak ada lagi orang miskin yang

berhak menerima zakat.

Begitu pun pada masa Khilafah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang taat beragama, salih, dermawan, hampir bisa disamakan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Jabatan khalifah tidak membuatnya terhalang untuk turun ke jalan-jalan pada malam hari, tujuannya untuk melihat keadaan rakyat yang sebenarnya. Ia ingin melihat apa yang terjadi dan menimpa kaum lemah dengan mata kepala sendiri untuk kemudian memberikan bantuan.

Pada masa itu, Baghdad menjadi mercusuar kota impian 1.001 malam yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Daulah Abbasiyah pada masa itu, mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindukush, India. Kekuatan militer yang dimilikinya juga sangat luar biasa.

Inilah kisah peradaban mulia dalam naungan khilafah Islam. Fakta menunjukkan bahwa khilafah itu merawat dan mengurus rakyat. Karena di dalam Islam tugas pemimpin adalah sebagai *raa'in*.

Rasulullah SAW bersabda: "Imam (Khalifah) adalah *raa'in* (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR al-Bukhari).

Jadi, ternyata khilafah itu bukan merusak, justru hanya syariat Islam satu satunya aturan yang mampu melepaskan negeri dari berbagai kerusakan.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Drama Eskalasi Konflik Iran Amerika

"Jadi ini semacam show of force Donald Trump kepada negara-negara Arab, bahwa Iran tetap dalam kendali Amerika Serikat".



Donald Trump dan Hassan Rouhani

Ahad (12/1), sebuah roket kembali ditembakkan Iran ke markas pasukan koalisi yang dipimpin AS di Irak Utara. Roket jenis Katyusha tersebut mendarat di pangkalan udara Al-Balad. Pangkalan udara ini merupakan rumah bagi pesawat F-16. Serangan ini melukai dua perwira Irak dan dua penerbang. Tentara AS dan pekerja AS sendiri tidak terluka, hanya dievakuasi setelah serangan ini.

Sebelumnya, sebagaimana yang diberitakan BBC online (8/1), dua pangkalan udara di Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat dan koalisi dilanda hantaman sejumlah rudal balistik, menurut Departemen Pertahanan AS. Kantor berita negara Iran yang mengutip Garda Revolusi

Iran menyebut serangan ke Pangkalan Al-Asad adalah aksi pembalasan setelah komandan pasukan elite Iran, Jenderal Qasem Soleimani, tewas dalam serangan drone di Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1), atas perintah Presiden AS Donald Trump.

Saling klaim pun terjadi antara AS dan Iran terkait adanya korban dalam serangan ini. Iran mengatakan serangan ke pangkalan koalisi AS-Irak di Irbil dan Ayn al Asad ini menewaskan 80 tentara AS. Namun Gedung Putih membantahnya. "Tidak ada warga AS terluka dalam serangan rudal Iran," ujar Trump itu di Gedung Putih sebagaimana dilansir AFP, Kamis (9/1). Bahkan, AS juga mengatakan kerusakan yang dialami pun sangat minim.

Pasca pembunuhan terhadap jende-

ral nomor satu Iran yang turut bertanggung jawab dalam pembantaian kaum Muslimin di Suriah, beberapa pihak khawatir hal ini akan menyebabkan perang besar, bahkan menjadi pemicu perang dunia III. Namun ternyata tidak terbukti. Serangan balas dendam Iran pun bukan serangan yang fatal dan serius. Tidak sedikit yang menyatakan ketegangan Iran dan Amerika ini hanyalah drama yang berulang.

Trump sendiri dengan dingin menanggapi serangan rudal ini. Yang menunjukkan tanda-tanda kuat tidak ada implikasi serius serangan Iran ini. Trump sendiri menyatakan tidak akan membalas dengan tindak militer serangan rudal Iran ini. Di sisi lain, Iran sebelumnya sudah memberikan sinyal memilih untuk menurunkan eskalasi konflik.

Dalam pertemuan antara Presiden Iran Hassan Rouhani dan Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani yang dikenal dekat dengan Gedung Putih, kedua belah pihak sepakat bahwa penurunan eskalasi adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis di kawasan. "Kami telah memutuskan untuk melakukan lebih banyak konsultasi dan kerja sama untuk keamanan seluruh wilayah," kata Rouhani. "Kami sepakat bahwa satu-satunya solusi untuk krisis ini adalah de-eskalasi dari semua pihak dan dialog," kata Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani, Minggu (12/1) dikutip dari AFP.

Hubungan Amerika-Iran memang semakin memanas di era Presiden Trump. Ketegangan antara Iran dan AS mulai meningkat pada Mei 2018 ketika AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Sejak ultimatum Rouhani tersebut, AS dan Iran terus saling lontar ancaman. Presiden Donald Trump bahkan mengerahkan kapal induk dan sejumlah pesawat pengebom ke Timur Tengah.

Meskipun ada opsi menyerang Iran, Amerika menyatakan tidak ada keinginan untuk melakukan perang terbuka. AS memang terus menyalahkan Iran atas serangan ke dua kapal tanker yang terbakar di Teluk Oman pada pertengahan tahun 2019. Meski demikian, Menteri Pertahanan AS Shanahan memastikan pengerahan pasukan tambahan ini bukan berarti AS ingin berperang dengan Iran. "AS tidak ingin konflik dengan Iran. [Pengerahan ini] untuk memastikan keamanan personel militer kami yang bekerja di kawasan dan menjaga kepentingan nasional kami," katanya.

Di Balik Eskalasi

Pengamat politik Timur Tengah Budi Mulyana, menyakini naik turun eskalasi hubungan Iran dan Amerika Serikat, hanyalah drama. Dalam pandangan Budi Mulyana, permainan ini sepenuhnya dikendalikan

Amerika Serikat sementara Iran kerap berperan di Timur Tengah untuk kepentingan Amerika.

Dalam banyak kasus, ujarnya, Iran membantu kepentingan Amerika di Timur Tengah seperti mempertahankan Basyar Assad di Suriah, menjaga pemerintahan boneka Amerika di Irak. Termasuk Iran banyak berperan membantu rezim boneka Amerika di Afghanistan. Budi menyebutkan selama ini Amerika membiarkan Iran mendukung kelompok milisi Syiah di Irak untuk melawan kelompok perlawanan Sunni yang anti Amerika.

"Amerika tentu tidak ceroboh ketika membiarkan Iran campur tangan di Suriah, membiarkan Hizbullah yang dekat dengan perbatasan Israel anak emas Amerika, termasuk membiarkan Iran memiliki pengaruh besar dalam rezim Irak yang dibentuk Amerika," tegasnya.

Lantas apa kepentingan politik di balik pembunuhan jenderal top Iran ini? Pengamat politik Timur Tengah ini menyatakan banyak kemungkinan. Menurutnya, bisa jadi ini untuk menarik hati penguasa-penguasa Arab yang selama ini ketakutan dengan keberadaan Iran. Amerika ingin menunjukkan bahwa Amerika bisa menjadi pelindung mereka. "Jadi ini semacam show of force Donald Trump kepada negara-negara Arab, bahwa Iran tetap dalam kendali Amerika Serikat".

Apalagi saat ini, menurutnya, Amerika Serikat sedang berupaya membangun aliansi Amerika-Arab dan entitas Yahudi. Amerika sedang menjadikan Iran sebagai ancaman utama di Timur Tengah dan musuh bersama negara-negara Arab dan Israel. "Bagi penguasa Arab, menguatnya ancaman Iran, bisa menjadi legitimasi bagi mereka untuk bekerja sama dengan Israel melawan Iran," paparnya.

Kemungkinan lain, sambungnya, terkait dengan kepentingan bisnis minyak. Amerika dan beberapa negara produsen minyak, tentu sangat mungkin berharap serangan ini akan menaikkan harga minyak. Dan sementara, harga minyak sempat melejit pada perdagangan Rabu (8/1) pasca aksi balasan Iran menyerang dua pangkalan militer gabungan AS dan Irak.

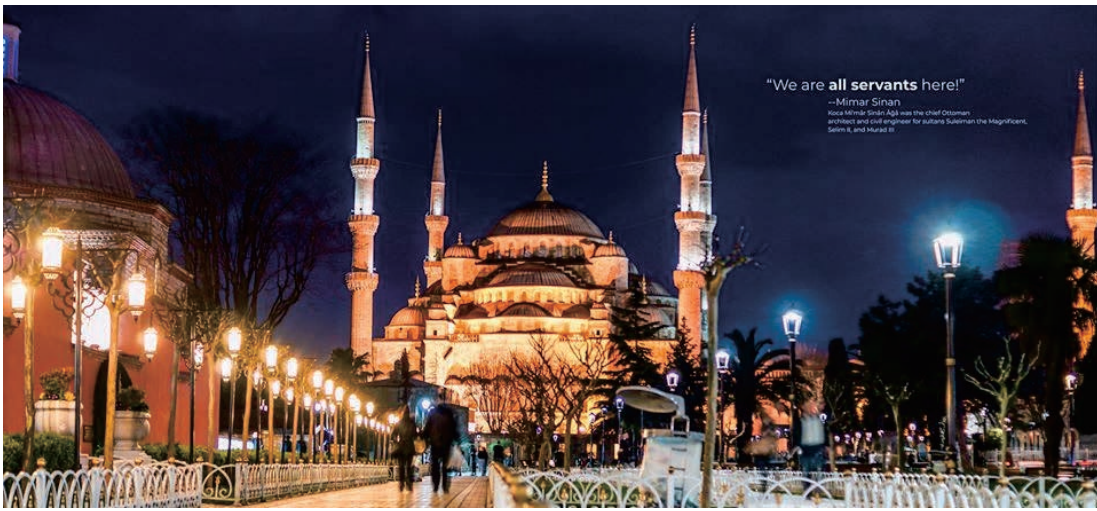
Budi Mulyana juga mengingatkan setiap kebijakan Amerika Serikat, penting dikaitkan dengan kepentingan domestik negara Paman Sam ini. Jadi, menurutnya, kemungkinan lain serangan ini untuk meningkatkan pencitraan presiden Donald Trump pada pemilu AS November tahun ini. "Terutama untuk menarik hati kelompok 'Elang' garis keras, Kristen fundamentalis, sayap kanan, yang selama ini memang menganggap Iran sebagai bagian dari poros Iblis yang harus ditumpas habis," ujarnya. **af**

Peran Rahasia Amerika dalam Revolusi Iran

Sebenarnya peran Amerika dalam Revolusi Iran tampak jelas sejak awal revolusi. Selama keberadaan Khomeini di Perancis di "Neauphle-le-Château" ia dikunjungi delegasi Gedung Putih dan telah terjadi perjanjian kerja sama antara Khomeini dengan Amerika. Pada waktu itu surat kabar Amerika membicarakan hal tersebut dan pertemuan-pertemuan yang terjadi di sana.

Belakangan hal itu diungkap oleh presiden pertama Iran Abu al-Hasan Banu Shadr pada tahun 2000, bersama saluran Aljazeera. Banyak pertemuan di antara kedua pihak. Yang paling terkenal adalah Pertemuan Oktober yang terjadi di daerah pedesaan Paris. Di situ terjadi perjanjian-perjanjian antara kelompok Reagan dan Bush dengan kelompok Khomeini.

Khomeini menyatakan siap bekerja sama dengan Amerika dengan syarat Amerika tidak melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Iran. Setelah itu pada tanggal 1 Februari 1979 Khomeini kembali dengan pesawat Prancis untuk mendarat di Teheran. Amerika pun menekan Shahpour Bakhtiyar untuk menyerahkan pemerintahan kepada Khomeini. AS juga mengancam panglima militer Iran jika menghalangi jalan Khomeini. Berikutnya, Khomeini pun menjadi mursyid dan penguasa. **af** Sumber: <http://hizb-indonesia.info/2013/11/06/utsman-bakhasy-direktur-central-media-office-hizbut-tahrir-iran-setia-melayani-as/>



Menyusuri Jejak Kemuliaan Muhammad al-Fatih

Kalau sudah sampai Istanbul, jangan lewatkan untuk menyusuri indahanya Selat Bosphorus menggunakan kapal reguler (transportasi publik). Menyusuri Selat Bosphorus menggunakan kapal akan disugahi *cityscape* Istanbul, terlihat Aya Sofia, Istana Topkapi, Masjid Khalifah Sulaiman Al Qonuny, Menara Galata, Istana Kekhilafan Utsmani Dolmabahce, Rumeli Hisari, Anadolu Hisari, Masjid Ortakoy, Masjid Camlica dan banyak situs peninggalan era Khilafah Utsmani.

Konstantinopel yang kemudian berubah menjadi Islambol (Kota Islam) dan dikenal dengan Istanbul, dibebaskan oleh Sultan Muhammad II yang kemudian digelar dengan Al-Fatih pada 29 Mei 1453, setelah sejak 6 April 1453 ekspedisi pembebasan diberangkatkan. Muhammad al-Fatih, memenuhi bisarah Rasulullah SAW bahwa akan ditaklukkan Kota Konstantinopel, setelah 825 tahun kabar gembira itu keluar dari lisan suci Nabi

Bosphorus Cruise bisa menjadi rangkaian cerita peristiwa itu. Mulai dari persiapan Benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Kakek Buyut Muhammad Al-Fatih, Sultan Beyazid I, Pembangunan Benteng Rumeli Hisari 1452 dengan luasan 3 Ha yang dibangun hanya dalam waktu 3 bulan, serta kisah heroik diperjalankannya 72 kapal perang melewati Bukit Galata hanya dalam semalam dari Selat Bosphorus ke Teluk Tanduk Emas, yang kesemuanya adalah tangga kemenangan yang luar biasa

Muhammad al-Fatih mulai menyerang dan mengepung Konstantinopel mulai 26 Rabiul Awal atau 6 April 1453 M, sampai bisa ditaklukkan pada fajar hari Selasa 20 Jumadul Ula 857 H seperti bulan ini di dalam kalender masehi 29 Mei 1453 M. Artinya, pengepungan berlangsung selama sekira dua bulan. Ketika memasuki kota sebagai pemenang, al-Fatih turun dari kudanya, berjalan kaki dan bersujud kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur atas kemenangan dan keberhasilan ini

Kemudian al-Fatih menuju gereja Aya Shofia. Di situ rakyat Bizantium dan para rahibnya berkumpul. Al-Fatih memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Penantian 825 Tahun sejak terucap dari lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW, hadits yang mulia dari Abdullah bin Bisyr al-Khats'amiy dari ayahnya bahwa dia mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin ada-lah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu". Kabar gem-bira itu terealisasi di tangan pemuda ini Muhammad al-Fatih yang usianya belum genap 21 tahun, tetapi dia telah dipersiapkan dengan baik untuk itu sejak masa kanak-kanaknya

Bapakny, Sulthan Murad II menaruh perhatian besar kepadanya. Ia menjadikan Muhammad al-Fatih belajar kepada para ustaz terbaik di masa-

nya, termasuk Ahmad bin Ismail al-Kawrani yang disebutkan oleh as-Suyuthi sebagai pengajar pertama al-Fatih. As-Suyuthi berkata tentangnya, bahwa ia "seorang 'alim faqih. Para ulama masanya mengakuinya lebih unggul dan sempurna. Bahkan para ulama masanya menyebutnya Abu Hanifah zamannya".

Demikian juga syaikh 'Aq Syamsuddin Sanqar yang menjadi orang pertama yang menanamkan di benak Muhammad al-Fatih sejak kecil hadits Rasulullah saw tentang "penaklukan Konstantinopel". Pemuda itu pun tumbuh besar memusatkan perhatian agar penaklukan itu terealisasi melalui tangannya

Syaikh 'Aq Syamsuddin mengajarkan kepada Muhammad al-Fatih ilmu-ilmu mendasar berupa al-Quran, hadits, sunnah nabawiyah dan fikih. Demikian juga Bahasa Arab, Persia dan Turki. Sebagaimana juga mengajarkan sebagian ilmu kehidupan seperti matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi dan sejarah

Hasil tak akan menyalahi proses. Sebuah keyakinan kemenangan yang dihasilkan lewat proses serius

Jejak keagungan Muhammad Fatih pun tampak di Masjid Muhammad al-Fatih Istanbul hingga kini. Setiap bakda Subuh di masjid ini terdapat halqah 20 santri Darul Quran khataman Al-Qur'an. Halqah-halqah ini sebagai bentuk upaya melestarikan wasiat Muhammad al-Fatih untuk penerusnya khusus di Masjid Al-Fatih, yaitu: *Pertama*, Sepuluh orang Hafizul Qur'an harus ditugaskan untuk membaca Al-Quran setiap hari Jum'at sebelum shalat Jum'at. *Kedua*, dua puluh orang shalih harus ditugaskan untuk mengkhawatamkan Al-Quran tiap hari bakda shalat Subuh. *Ketiga*, dua puluh orang shalih harus ditugaskan untuk membaca 70.000 kalimat tauhid tiap hari bakda shalat Subuh. *Empat*, sepuluh orang harus ditugaskan untuk membaca 10.000 shalawat atas Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam* bakda shalat Subuh.

Generasi terdahulu telah mencatat dengan tinta emas kejayaan Islam, sekaranglah giliran kita mengembalikan kembali kejayaan Islam.[] *catatan perjalanan husain assadi*



KRONIK MANCANEGARA

Hak Unjuk Rasa pun Dirampas Israel

Abdullah Abu Rahma sudah delapan kali ditangkap tentara Israel selama 15 tahun terakhir. Kadang ia menghabiskan waktu berpekan-pekan atau berbulan-bulan di penjara.

Dia membayar jaminan yang totalnya kini mencapai puluhan ribu dolar AS hanya karena menggelar unjuk rasa damai.

Seperti diberitakan *republika.co.id*, Ahad (5/1/2020), dia salah satu di antara warga Palestina yang menggelar unjuk rasa damai untuk memprotes penguasaan militer dan perluasan pemukiman Israel. Kini warga Palestina semakin sulit menemukan tempat untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi mereka tetap berupaya berunjuk rasa.

Dalam unjuk rasa itu pemuda-pemuda Palestina kerap melemparkan batu ke pasukan Israel yang membalasnya dengan gas air mata dan peluru karet. Tapi Abu Rahma mengatakan ia tidak pernah melempar batu dan memberitahu pengunjuk rasa untuk tidak melakukannya. Karena berpotensi mengenai pengunjuk rasa lain. Tapi hal itu tidak mencegah Abu Rahma ditahan.[]

Sudan Hilangkan Pelajaran Al-Qur'an dari Sekolah TK



Sudan akan menghentikan pelajaran Al-Qur'an dari sekolah TK di bawah reformasi yang sedang dilaksanakan selama tahun akademik berikutnya, Direktur Pusat Kurikulum dan Penelitian Pendidikan Nasional, Dr. Omar al-Qairi, telah mengumumkan.

Perubahan skala besar sebagian besar akan diamati dalam sistem pendidikan taman kanak-kanak, menurut rekaman audio yang didengar oleh editor outlet berita Sudan *Matarees* seperti dikutip *arrahmah.com*, Ahad (12/1/2020).

Dalam audio, Al-Qairi terdengar menjelaskan bahwa restrukturisasi akan terdiri dari membagi taman kanak-kanak menjadi dua fase; yang pertama terdiri dari anak-anak berusia antara tiga hingga empat tahun dan akan memerlukan "permainan saja".

Fase kedua siswa diajarkan alfabet dalam bahasa Arab dan Inggris.

Pembelajaran Al-Qur'an akan dihilangkan dari taman kanak-kanak secara keseluruhan, Al-Qairi mengatakan, menambahkan bahwa itu akan dibawa ke kurikulum di sekolah dasar.

Siswa-siswa prasekolah dan TK sebaliknya akan berlatih dan menghafal lagu-lagu nasionalis yang menanamkan dalam diri mereka cinta untuk negara mereka. Penyair telah ditugaskan untuk menyusun bahan patriotik baru, jelasnya.

Sementara itu, pemerintah telah menghentikan Radio Al-Furqan, yang menyiarkan Al-Qur'an, dari penyiaran.

Dalam sebuah pernyataan, pembawa acara radio mengatakan: "Menghilangkan jutaan pendengar yang telah terbiasa mendengarkan program radio yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan mereka adalah ketidakadilan yang hebat, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan yang menimbulkan kekhawatiran tentang pemerintahan ini."

"Membungkam suara Al-Qur'an merampas kebaikan orang-orang, dan di dalamnya juga menantang kitab Allah SWT dan merupakan penghinaan bagi mereka yang meyakini, dan mereka yang mendengarnya sepanjang hari dan malam melalui Radio Al-Furqan".[]

Presiden Petahana Taiwan Penentang Cina Menang Pemilu

Presiden Petahana Taiwan, Tsai Ing-wen, yang dikenal menentang Cina, mengklaim menang dalam pemilu. Dilansir *AFP* via *Channel News Asia* Sabtu (11/1/2020) dan dikutip *kompas.com* esoknya, dia menjadi perempuan pertama yang menjadi orang nomor satu selama dua periode.

Tsai Ing-wen disambut ribuan pendukungnya di luar markas Partai Progresif Demokratik, dalam hasil yang bakal membuat marah Cina.

Dalam pemilu, petahana berusia 63 tahun itu meraup 57,1 persen dengan 8,2 juta suara. Lebih banyak 1,3 juta dibandingkan 2016. Dia mengalahkan pesaingnya dari Kuomintang, Han Kuo-yu yang dikenal dekat dengan Beijing, setelah memperoleh 39 persen.

"Hari ini (Sabtu), kita mempertahankan kemerdekaan dan demokrasi kita. Esoknya, mari kita bersatu mengalahkan segala tantangan yang ada," kata Tsai dalam pidato kemenangannya.

Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka sejak berakhirnya perang saudara mematan pada 1949 silam. Selama empat tahun sejak Tsai berkuasa pada 2016, Negeri "Panda" menekan pulau berdikari itu dengan tekanan ekonomi hingga militer. Namun, taktik itu malah membuat rakyat berbondong-bondong memberikan suaranya bagi Tsai.[] *joy dari berbagai sumber*

Penaklukan Kota Roma



Su'ila Rasûlullah shallâllâhu 'alayhi wa sallama: "ayyu al-madînatî tuftahu awwalan, qusthathîniyatu aw rûmiyyatu?" Faqâla Rasûlullah shallâllâhu 'alayhi wa sallama: "madînatu hiraqla tuftahu awwalan ya'nî qusthathîniyyatu"

(Rasulullah SAW ditanya: "Kota manakah yang ditaklukkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Maka Rasul menjawab: "Kotanya Heraklius ditaklukkan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel" (HR Ahmad, ad-Darimi dan al-Hakim)

Mam Ahmad mengeluarkan hadits tersebut di dalam Musnad-nya pada bab musnad 'Abdullâh ibn Amru ibn ibn al-'Ash. Al-Haytsami di dalam Majma' az-Zawâ'id wa Manba'u al-Fawâ'id (6/219) mengomentari, "para perawinya adalah para perawi sahîh kecuali Abu Qabil dan ia tsiqah".

Komentar al-Haytsami bahwa para perawi hadits ini adalah perawi shahîh kecuali Abu Qabil yang ia nilai tsiqah, mengisyaratkan bahwa ia menilai hadits ini hasan.

Penilaian ini sesuai dengan penilaian Abdul Ghani al-Maqdisi. Adapun al-Hakim menilainya shahîh dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Syeikh Nashiruddin al-Albani di dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah (I/33) juga menilainya shahîh. Walhasil hadits ini bisa dijadikan hujah.

Makna

Hadits ini adalah hadits gharib karena hanya diriwayatkan dari jalur Abu Qabil dari Abdullah ibn 'Amru ibn al-'Ash. Kota Rûmiyah itu seperti yang dijelaskan oleh Yaqut ibn Abdillâh al-Humawi di dalam Mu'jam al-Buldân (1/312) adalah Kota Roma, Italia. Penaklukan kedua kota ini merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi.

Kabar gembira penaklukan Kota Konstantinopel juga diriwayatkan dalam hadits lain. Kabar gembira tersebut memacu kaum Muslim sejak masa para sahabat untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sebagai orang yang berhasil mewujudkannya.

Syeikh Nashiruddin al-Albani di dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah wa Syay'un min Fiqihî wa Fawâ'idihâ (I/33) mengomentari hadits di atas, "Penaklukan pertama telah berhasil direalisasikan melalui tangan Muhammad al-Fâtih al-'Utsmani seperti yang sudah diketahui. Dan hal itu terealisasi setelah lebih dari 800 tahun sejak kabar gembiranya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan penaklukan kedua (yaitu penaklukan Kota Roma) dengan izin Allah akan terealisasi dan itu pasti. Dan sungguh beritanya akan Anda ketahui di kemudian hari. Dan tidak diragukan bahwa terwujudnya penaklukan kedua itu menuntut kembalinya Khilafah Rasyidah ke tengah-tengah umat Muslim. Dan hal itu telah dibargembirkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau: "Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas

izin Allah ia tetap ada. Kemudian ia akan mengangkatnya jika ia berkehendak menngangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim, ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Kemudian Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan, ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian", kemudian beliau diam." (HR. Ahmad, al-Bazar, ath-Thayalisi).

Kabar gembira dari Rasul itu tidak boleh justru menjadikan kita diam dan tidak turut terlibat aktif memperjuangkannya karena menganggap toh pasti akan tegak kembali. Kabar gembira penaklukan Konstantinopel justru membuat generasi terdahulu sejak masa para sahabat radhiyallah 'anhum berusaha mewujudkannya, hingga terwujud melalui Muhammad al-Fatih dan pasukannya. Mereka yakin penaklukan Konstantinopel pasti terwujud.

Begitu pulalah seharusnya sikap kita, Umat Islam saat ini. Kabar gembira penaklukan Kota Roma dan didahului dengan tegaknya kembali Khilafah Rasyidah, meski itu diyakini pasti terjadi, tidak boleh membuat Umat Islam diam menunggunya. Sebaliknya kabar gembira dan keyakinan akan kepastian terwujudnya kedua kabar gembira itu seharusnya justru memacu kita, Umat Islam untuk berjuang serius mewujudkannya tanpa kenal lelah—seperti generasi terdahulu—dengan harapan kabar gembira itu terwujud melalui tangan-tangan kita dan di masa kita. Wallâh a'lam bi ash-shawâb. **yahya abdurrahman**




SAATNYA SEKARANG!

Nabi SAW bersabda:
من زار قبري وجبت له شفاعتي

"Barangsiapa yang berziarah ke kuburku maka wajib baginya mendapat syafaatku."
(HR. Tirmidzi, Baihaqi, Al-Barra, Daruqutni)

Bersama Syahara Tour & Travel Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa ke Tanah Suci. Tak sekadar ibadah, tapi juga lebih paham sirah Rasulullah SAW.

- Umroh Reguler (**1700 USD**): 27 Maret; 21 September; 19 Oktober; 23 November; dan 19 Desember (+**100 USD**).
- Umroh Plus Turki (**2400 USD**): 27 Maret
- Umroh Awal Ramadhan (**2000 USD**): 25 April
- Umroh Syawal (**1500 USD**): 8 Juni
- Umroh Plus Aqsha-Mesir (**3400 USD**): 10 Juni

Informasi dan pendaftaran:
0812-99-66-55-76
0856-9876-300
08777-0293-564



Pembimbing Utama:
KH. Drs. Halidz Abdurrahman, MA

Pendamping ke Tanah Suci
Meniti Jejak Peradaban Nabi

*Biaya belum termasuk perlengkapan & handling, asuransi Saudi dan pengurusan paspor dan vaksinasi.
*S&K berlaku

LIVE ON AIR

DaktaFM



Secretan

Dunia Islam



BERSAMA:
UST MUJIYANTO
(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM
SETIAP SENIN JAM 07.30-08.00 WIB



ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:



www.mediaumat.com

MediaUmat
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam



Ketentuan Iklan

- ☒ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: **iklan.tabloidmu@gmail.com**
- ☒ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ☒ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ☒ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ☒ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ☒ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ☒ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
¼ Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

**DAPATKAN
DISCOUNT
SPECIAL**

Informasi :
0857.1713.5759



Islam
Selamatkan
Negeri

  Islam Selamatkan Negeri

QADHA MASHOLIH

ISLAM SELAMATKAN
NEGERI

Peduli Bencana Banjir & Longsor
Jabodetabek - Banten
Januari 2020



PENYERAHAN BANTUAN
KEPADA PARA KORBAN BANJIR

Terima kasih atas kepercayaan Kaum Muslimin Indonesia yang telah mengamanahkan bantuannya kepada saudara kita yang terdampak banjir-longsor di Jabodetabek-Banten yang sebagiannya masih dalam masa penataan dan *recovery* pasca bencana. Atas kedermawanannya kami sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jazaa*.



 **Ust Agus**
0852 1887 9500

Salurkan Donasi Anda ke rekening:
a.n. Islam Selamatkan Negeri
BSM: 720 2420 208